

LAPORAN PEREKONOMIAN
PROVINSI ACEH
NOVEMBER 2023

VISI

Menjadi Kantor Perwakilan yang kredibel dalam pelaksanaan tugas BI dan kontributif bagi pembangunan ekonomi daerah maupun nasional.

MISI

Menjalankan kebijakan BI dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem keuangan, efektivitas pengelolaan uang dan kehandalan sistem pembayaran untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah maupun nasional jangka panjang yang inklusif dan berkesinambungan.

FUNGSI

1. Fungsi *Advisory* Kebijakan
2. Fungsi Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah
3. Fungsi Sistem Pembayaran
4. Fungsi Pengembangan UMKM dan Keuangan Inklusif
5. Fungsi *Regional Financial Surveillance* (RFS)
6. Fungsi Pengelolaan Uang Rupiah (PUR)
7. Fungsi Pengawasan SP dan PUR
8. Fungsi Komunikasi Kebijakan

TUGAS POKOK

1. Memberikan masukan kepada Dewan Gubernur kondisi ekonomi dan keuangan daerah di wilayah kerjanya.
2. Memberikan saran kepada pemerintah daerah mengenai kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, yang didukung dengan penyediaan informasi berdasarkan hasil kajian/riset serta memfasilitasi pengendalian inflasi, pemberdayaan sektor riil dan UMKM
3. Melaksanakan kegiatan perizinan dan pengawasan serta operasionalisasi sistem pembayaran tunai dan non tunai sesuai dengan kebutuhan ekonomi daerah di wilayah kerjanya.
4. Melaksanakan kebijakan stabilitas keuangan, program perluasan dan pemerataan akses dan keterjangkauan keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
5. Mengelola sumber daya internal yang dibutuhkan sebagai faktor pendukung fungsi-fungsi utama.

Kalender Publikasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Aceh

Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Mei	Agustus	November	Februari

Penerbit :

Tim Perumusan Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh

Jl. Cut Meutia No.15, Banda Aceh - Indonesia

Telp : 0651-33200 / Fax : 0651-34116

Publikasi LPP secara online dapat diperoleh di:

<https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/aceh/Default.aspx>

Kata Pengantar

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga buku “Laporan Perekonomian Provinsi Aceh November 2023” ini dapat dipublikasikan. Buku ini memaparkan informasi mengenai perkembangan beberapa indikator perekonomian daerah, diantaranya pertumbuhan ekonomi, perbankan, sistem pembayaran dan keuangan daerah yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan informasi internal maupun eksternal Bank Indonesia. Secara umum, ringkasan hasil kajian atas perkembangan ekonomi regional Provinsi Aceh periode triwulan laporan adalah sebagai berikut:

1. Ekonomi Aceh pada triwulan III 2023 ekonomi Aceh tumbuh sebesar 3,76% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,37% (yoy). Perlambatan tersebut disebabkan oleh rendahnya aktivitas pertambangan dan industri pengolahan serta melambatnya perkembangan ekspor di Provinsi Aceh. Meskipun demikian, ekonomi Aceh masih ditopang oleh peningkatan konsumsi pemerintah, PMTB, dan konsumsi rumah tangga pada sisi permintaan. Sementara pada sisi lapangan usaha, pertumbuhan ditopang oleh peningkatan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Lapangan Usaha Perdagangan.
2. Laju inflasi Aceh pada triwulan III 2023 tercatat terkendali didorong oleh terkendalinya inflasi kelompok makanan. Pada periode laporan, Provinsi Aceh mengalami inflasi sebesar 1,83% (yoy) atau lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 2,70% (yoy).
3. Pertumbuhan perekonomian Aceh pada tahun 2023 diperkirakan lebih tinggi dibanding tahun 2022. Kondisi tersebut diperkirakan dipengaruhi oleh kinerja konsumsi pemerintah yang diperkirakan terakselerasi seiring dengan pembangunan PSN yang terus berlanjut. Laju inflasi tahun 2023 diperkirakan berada di dalam batas bawahsasaran inflasi nasional sebesar $3\pm 1\%$, dengan perkiraan perlambatan inflasi pada bahan-bahan makanan.

Dalam kesempatan ini, kami menghaturkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Harapan kami, kerja sama yang telah tercipta dapat terus berlanjut dan ditingkatkan pada masa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa kualitas dan informasi yang disajikan masih perlu terus disempurnakan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran membangun dari seluruh pihak yang berkepentingan dengan buku ini.

Kami berharap, semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Banda Aceh, November 2023
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh

Rony Widijarto P.
Kepala Perwakilan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GRAFIK.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
TABEL INDIKATOR EKONOMI TERPILIH	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF	xi
BAB 1. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH.....	1
1.1. GAMBARAN UMUM	2
1.2. SISI PERMINTAAN	2
1.3. SISI LAPANGAN USAHA.....	7
BAB 2. PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH	12
2.1. GAMBARAN UMUM	13
2.2. PERKEMBANGAN KINERJA KEUANGAN DAERAH	13
2.3. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	15
BAB 3. PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH.....	19
3.1. PERKEMBANGAN UMUM INFLASI	20
3.2. ANALISIS PERKEMBANGAN INFLASI	20
3.3. <i>TRACKING</i> INFLASI TRIWULAN III 2023	24
3.4. INFLASI SPASIAL.....	25
3.5. AKTIVITAS TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (TPID) ACEH.....	26
BAB 4. STABILITAS KEUANGAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN UMKM	31
4.1. KINERJA PERBANKAN	32
4.2. INTERMEDIASI PERBANKAN.....	34
4.3. KINERJA PEMBIAYAAN/PEMBIAYAAN RUMAH TANGGA	40
4.4. LANGKAH PENINGKATAN AKSES KEUANGAN UMKM	40
BAB 5. PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH.....	42
5.1. SISTEM PEMBAYARAN TUNAI	43
5.2. SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI	44
5.3. KEGIATAN KUPVA BB.....	48
5.4. INKLUSI KEUANGAN	49
5.5. PENYALURAN PROGRAM SEMBAKO DAN PKH	50
5.6. ELEKTRONIFIKASI SISTEM PEMBAYARAN.....	51
BAB 6. KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN.....	53
6.1. KETENAGAKERJAAN	54
6.2. KEMISKINAN	56
BAB 7. PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH	58
7.1. PROSPEK MAKROEKONOMI	59
7.2. PROSPEK INFLASI	62
7.3. REKOMENDASI KEBIJAKAN	63

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Sumatera Tw III 2023	2
Grafik 1.2 Pertumbuhan Ekonomi.....	2
Grafik 1.3 Pertumbuhan dan Andil Pertumbuhan dari Sisi Permintaan Tw II 2023	3
Grafik 1.4 Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga.....	3
Grafik 1.5 Perkembangan Pembiayaan Konsumsi.....	3
Grafik 1.6 Perkembangan Hasil Survei Konsumen.....	3
Grafik 1.7 Perkembangan Nilai Tukar Petani	4
Grafik 1.8 Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah.....	4
Grafik 1.9 Pertumbuhan DPK Pemerintah.....	4
Grafik 1.10 Pertumbuhan Investasi.....	5
Grafik 1.11 Realisasi Investasi PMA-PMDN.....	5
Grafik 1.12 Realisasi Pengadaan Semen.....	5
Grafik 1.13 Pertumbuhan PDRB Ekspor Luar Negeri.....	5
Grafik 1.14 Realisasi Ekspor Batubara.....	6
Grafik 1.15 Perkembangan Ekspor Komoditas Utama Aceh.....	6
Grafik 1.16 Pertumbuhan PDRB Impor Luar Negeri Aceh.....	6
Grafik 1.17 Realisasi Impor Luar Negeri	6
Grafik 1.18 Pertumbuhan Defisit Net Ekspor Antar Daerah	7
Grafik 1.19 Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Aceh dari Sisi LU Utama	7
Grafik 1.20 Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian	8
Grafik 1.21 Produksi Padi Aceh	8
Grafik 1.22 Penyaluran Pembiayaan Sektor Pertanian.....	8
Grafik 1.23 Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan.....	9
Grafik 1.24 Pertumbuhan Penjualan Kendaraan.....	9
Grafik 1.25 Penyaluran Pembiayaan Sektor Perdagangan	9
Grafik 1.26 Pertumbuhan Lapangan Usaha Konstruksi.....	9
Grafik 1.27 Penyaluran Pembiayaan Sektor Kontruksi.....	10
Grafik 1.28 Pertumbuhan Pengadaaan Semen.....	10
Grafik 1.29 Pertumbuhan LU Pertambangan.....	10
Grafik 1.30 Perkembangan Ekspor Batu Bara.....	11
Grafik 1.31 Penyaluran Pembiayaan Sektor Pertambangan	11
Grafik 2.1 Perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal Provinsi Aceh.....	14
Grafik 3.1 Laju Inflasi Provinsi di Sumatera Triwulan III 2023	20
Grafik 3.2 Perkembangan Tangkapan Ikan Tuna	21
Grafik 3.3 Perkembangan Harga Minyak Kelapa Sawit.....	21
Grafik 3.4 Perkembangan Harga Emas Dunia	24

Grafik 3.5 Pergerakan Inflasi Kota Pantauan di Aceh	25
Grafik 4.1 Perkembangan Intermediasi Perbankan di Provinsi Aceh (LokBank)	32
Grafik 4.2 Perkembangan Intermediasi Perbankan di Provinsi Aceh (LokPro)	32
Grafik 4.3 Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) (% , yoy)	33
Grafik 4.4 Perkembangan <i>Non Performing Financing</i> (LokBank)	33
Grafik 4.5 Perkembangan Penyaluran Pembiayaan (LokBank).....	33
Grafik 4.6 Perkembangan Penyaluran Pembiayaan (LokPro)	33
Grafik 4.7 Proporsi DPK per Jenis (LokBank).....	34
Grafik 4.8 Perkembangan DPK berdasarkan jenis.....	34
Grafik 4.9 Proporsi DPK Berdasarkan Kepemilikan (%)	34
Grafik 4.10 Perkembangan DPK Perseorangan	34
Grafik 4.11 Perkembangan DPK Pemerintah.....	35
Grafik 4.12 Perkembangan DPK Korporasi	35
Grafik 4.13 Perkembangan Nilai Tabungan.....	35
Grafik 4.14 Jumlah Rekening Per Saldo	36
Grafik 4.15 Penghimpunan DPK Spasial	36
Grafik 4.16 Perkembangan Pembiayaan (LokPro)	36
Grafik 4.17 Proporsi Pembiayaan Berdasarkan Penggunaan.....	37
Grafik 4.18 Pembiayaan Konsumsi.....	37
Grafik 4.19 Proporsi Pembiayaan Konsumsi berdasarkan Penggunaan.....	37
Grafik 4.20 Penyaluran Pembiayaan LU.....	38
Grafik 4.21 Penyaluran Pembiayaan Spasial.....	38
Grafik 4.22 Perkembangan NPF Perbankan Aceh (LokPro).....	38
Grafik 4.23 Perkembangan Pembiayaan UMKM	39
Grafik 4.24 <i>Non Performing Financing</i> (NPF) UMKM	39
Grafik 4.25 Pembiayaan UMKM secara Spasial	39
Grafik 4.26 Tenaga Kerja berdasarkan Lapangan Usaha.....	39
Grafik 5.1 <i>Netflow</i> Kas	43
Grafik 5.2 Pertumbuhan Inflow dan Outflow	43
Grafik 5.3 Transaksi Kas Titipan	43
Grafik 5.4 Transaksi Inflow Outflow per Kas Titipan.....	44
Grafik 5.5 Total Transaksi Kas Titipan Triwulanan	44
Grafik 5.6 Temuan Uang Palsu (Lembar)	44
Grafik 5.7 Nominal SKNBI	45
Grafik 5.8 Volume SKNBI.....	45
Grafik 5.9 Nominal BI RTGS.....	45
Grafik 5.10 Volume BI RTGS.....	46
Grafik 5.11 Transaksi ATM Debit.....	46
Grafik 5.12 Transaksi Kartu Kredit.....	47
Grafik 5.13 Perkembangan Transaksi Uang Elektronik	47
Grafik 5.14 Pertumbuhan <i>Merchant</i> QRIS	47
Grafik 5.15 Pertumbuhan Nominal dan Transaksi QRIS	48
Grafik 5.16 Transaksi KUPVA BB	48
Grafik 5.17 Disagregasi Transaksi UKA	49

Grafik 5.18 Penyaluran PKH (KPM)	50
Grafik 5.19 Penyaluran PKH (Nominal)	50
Grafik 5.20 Perkembangan Program Sembako (Nominal).....	51
Grafik 5.21 Perkembangan Program Sembako (KPM).....	51
Grafik 6.1 Tingkat Pengangguran di Wilayah Sumatera	54
Grafik 6.2 Jumlah Penduduk Miskin Desa dan Kota	56
Grafik 6.3 Penduduk Miskin Provinsi di Sumatera	56
Grafik 6.4 Perkembangan Rasio Gini di Aceh	57

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Belanja APBD Triwulan III 2023	13
Tabel 2.2 Realisasi Belanja Transfer dan Dana Desa Triwulan III 2023.....	14
Tabel 2.3 Realisasi Pendapatan APBD se-Provinsi Aceh Triwulan III 2023.....	14
Tabel 2.4 Realisasi Belanja APBN di Aceh Triwulan III 2023	15
Tabel 2.5 Realisasi Pendapatan APB di Provinsi Aceh Triwulan III 2023.....	15
Tabel 2.6 Data Realisasi APBD se-Provinsi Aceh Triwulan III 2023	16
Tabel 2.7 Data Realisasi APBN di Provinsi Aceh Triwulan III 2023	16
Tabel 2.8 Kemandirian Fiskal Provinsi di Sumatera tahun 2021	17
Tabel 2.8 Hasil Estimasi GMM	18
Tabel 3.1 Inflasi Kelompok Barang	20
Tabel 3.2 Inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau	20
Tabel 3.3 Inflasi Kelompok Pakaian dan Alas Kaki	21
Tabel 3.4 Inflasi Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar	22
Tabel 3.5 Inflasi Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rumah Tangga	22
Tabel 3.6 Inflasi Kelompok Kesehatan.....	22
Tabel 3.7 Inflasi Kelompok Transportasi.....	22
Tabel 3.8 Inflasi Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Keuangan.....	23
Tabel 3.9 Inflasi Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya.....	23
Tabel 3.10 Inflasi Kelompok Pendidikan	23
Tabel 3.11 Inflasi Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran.....	23
Tabel 3.12 Inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	24
Tabel 6.1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).....	54
Tabel 6.2 Perkembangan TPT.....	54
Tabel 6.3 Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor	54
Tabel 6.4 Tenaga Kerja Menurut Pendidikan.....	55
Tabel 6.5 Tenaga Kerja Berdasarkan Pekerjaan	55
Tabel 6.6 Nilai Tukar Petani	55
Tabel 6.7 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan.....	57
Tabel 6.8 Indeks Kemiskinan	57
Tabel 7.1 <i>Global Economic Growth Outlook</i>	59

TABEL INDIKATOR EKONOMI TERPILIH

A. PDRB

PDRB ADHK Berdasarkan Lapangan Usaha (Sektoral)

Sektoral (Rp Triliun)	2020				2021				2022				2023		
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9,64	9,23	9,78	9,25	9,17	9,47	9,46	9,61	9,35	9,65	9,31	10,71	9,66	10,12	9,88
Pertambangan dan Penggalian	2,33	2,98	2,73	2,45	2,49	2,15	2,98	2,76	2,63	2,70	2,77	2,74	2,46	2,47	2,71
Industri Pengolahan	1,39	1,61	1,62	1,44	1,53	1,62	1,65	1,42	1,43	1,68	1,66	1,70	1,49	1,60	1,61
Pengadaan Listrik, Gas dan Produksi Es	0,05	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01
Konstruksi	3,35	3,3	3,64	3,61	3,32	3,21	3,53	3,77	3,04	2,96	3,51	3,99	3,28	3,32	3,74
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,74	4,78	4,69	5,03	4,48	5,18	4,96	5,41	5,18	5,27	5,19	5,69	5,74	5,60	5,66
Transportasi dan Pergudangan	2,32	1,18	1,76	1,8	2,12	1,93	2,06	2,31	2,25	2,25	2,25	2,28	2,34	2,49	2,46
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,41	0,39	0,4	0,44	0,36	0,34	0,35	0,50	0,47	0,51	0,53	0,54	0,53	0,55	0,56
Informasi dan Komunikasi	1,28	1,35	1,29	1,26	1,34	1,33	1,45	1,46	1,47	1,51	1,61	1,61	1,63	1,63	1,62
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,62	0,6	0,58	0,57	0,57	0,55	0,58	0,53	0,60	0,45	0,51	0,54	0,56	0,37	0,37
Real Estate	1,41	1,35	1,35	1,34	1,37	1,37	1,53	1,40	1,42	1,43	1,59	1,45	1,48	1,48	1,62
Jasa Perusahaan	0,21	0,2	0,21	0,22	0,20	0,19	0,23	0,22	0,22	0,24	0,24	0,24	0,23	0,22	0,23
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,67	2,94	2,81	3,05	2,62	3,30	2,98	3,29	2,56	3,04	3,32	3,26	2,78	3,25	3,13
Jasa Pendidikan	0,84	0,91	0,92	0,99	0,88	0,84	0,88	1,10	0,95	0,95	0,91	1,02	0,97	1,03	0,97
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,97	0,95	1,06	1,18	1,07	1,09	1,16	1,25	1,26	1,29	1,22	1,26	1,20	1,26	1,33
Jasa lainnya	0,48	0,45	0,48	0,51	0,48	0,44	0,47	0,56	0,54	0,56	0,57	0,56	0,57	0,61	0,62
PDRB	32,71	32,27	33,4	33,2	32,07	33,10	33,34	35,66	33,45	34,57	35,27	37,66	35,00	36,08	36,59
PDRB Non Migas	30,38	29,3	30,67	30,75	29,58	30,95	31,36	32,90	30,82	31,87	32,50	34,92	32,54	33,61	33,88

Sumber: BPS Provinsi Aceh, diolah

PDRB ADHK Berdasarkan Pengeluaran

Komponen (Rp Triliun)	2020				2021				2022				2023		
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
- Konsumsi Rumah Tangga	18,67	18,5	18,28	17,82	17,72	18,55	18,83	19,04	18,84	19,34	19,21	18,93	19,43	19,98	19,99
- Konsumsi Lembaga Nonprofit Rumah Tangga	0,65	0,65	0,66	0,61	0,60	0,58	0,63	0,64	0,64	0,64	0,67	0,68	0,67	0,67	0,67
- Konsumsi Pemerintah	3,24	5,95	5,85	6,44	5,24	6,54	5,87	7,29	3,32	5,36	5,66	7,61	3,40	6,60	6,04
- Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	10,92	10,78	11,53	11,92	10,32	10,97	11,36	11,97	10,96	10,94	11,37	11,86	11,46	11,69	12,20
- Perubahan Inventori	-0,11	-0,29	0,05	0,28	0,18	-0,05	0,01	-0,03	0,06	0,03	-0,02	0,09	0,34	-0,34	0,19
- Ekspor Luar Negeri	1,33	0,76	0,74	0,78	1,27	0,94	1,00	1,85	1,69	1,66	1,71	2,12	2,04	1,60	1,27
- Impor Luar Negeri	0,27	0,07	0,06	0,2	0,08	0,19	0,12	0,64	0,18	0,36	0,19	0,36	0,32	0,13	0,30
- Net Ekspor Antarprovinsi	-1,72	-4	-3,64	-4,45	-3,17	-4,24	-3,26	-4,45	-1,87	-3,04	-3,14	-3,27	-2,02	-4,00	-3,46
PDRB	32,71	32,27	33,4	33,2	32,07	33,10	33,34	35,66	33,45	34,57	35,27	37,66	35,00	36,08	36,59
PDRB Non Migas	30,38	29,3	30,67	30,75	1,4665	30,95	31,36	32,898	30,82	31,87	32,50	34,92	32,54	33,61	33,88

Sumber: BPS Provinsi Aceh, diolah

B. Inflasi

Inflasi (%, yoy)	2020				2021				2022				2023		
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
Banda Aceh	3,72	1,31	1,90	3,46	1,25	1,87	2,07	2,41	3,95	6,31	7,85	6,00	5,32	2,70	1,40
Lhokseumawe	3,36	1,08	1,67	3,55	2,31	3,18	2,52	1,97	2,97	5,23	6,10	5,37	5,35	2,69	2,55
Meulaboh	5,49	2,13	2,30	4,23	1,62	2,86	1,48	2,08	3,56	6,22	8,02	6,56	6,27	2,69	2,10
Gabungan 3 Kota IHK Aceh	3,84	1,36	1,89	3,59	1,61	2,37	2,12	2,24	3,62	5,99	7,38	5,89	5,46	2,70	1,83

Kota	Kelompok (%, yoy)											
	Makanan, Minuman, dan Tembakau	Pakaian dan Alas Kaki	Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar RT	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin RT	Kesehatan	Trans.	Infokom, dan Jasa Keuangan	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	Pend.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	Total
Banda Aceh	3.86	1.34	-0.15	0.47	4.56	-1.49	0.03	-0.30	0.22	2.25	2.85	1.40
Lhokseumawe	3.58	4.81	0.71	0.01	1.60	2.07	0.30	12.68	2.03	1.91	0.80	2.55
Meulaboh	1.71	2,05	1.07	3.53	8.21	3.10	0.24	3.02	0.73	2.76	3.83	2.13
Gabungan 3 Kota IHK Aceh	3.41	2.60	0.21	0.73	3.74	-0.16	0.14	4.19	0.32	2.23	2.88	1.83

Sumber: BPS Provinsi Aceh, diolah

C. Perbankan

Indikator Umum

Indikator	2020				2021				2022				2023		
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
Total Aset (Rp Triliun)	55,23	56,85	59,96	58,14	55,08	52,85	50,47	52,25	49,86	52,90	52,58	53,22	51,04	52,03	53,77
Pertumbuhan (yoy)%	4,74	-1,61	9,73	0,22	-0,27	-7,04	-15,83	-10,13	-9,48	0,09	4,19	1,85	2,35	-1,66	2,26
Pertumbuhan (mtm)%	3,74	8,93	-0,46	1,57	-0,74	-5,47	0,61	3,52	-0,89	0,63	1,18	0,49	2,51	-0,55	2,31
DPK (Rp Triliun)	39,02	40,23	43,39	41,72	38,46	38,96	39,90	39,50	38,47	41,11	40,14	40,09	38,98	38,86	39,87
Pertumbuhan (yoy)%	1,45	-5,23	9,37	-1,25	-1,43	-3,17	-8,04	-5,47	0,03	5,52	-0,50	0,33	1,34	-5,47	0,41
Pertumbuhan (mtm)%	1,90	7,95	-0,60	-0,41	-1,61	-0,55	6,38	6,21	0,75	1,40	-0,12	-4,69	4,24	-0,31	2,10
Kredit/Pembiayaan (Rp Triliun)	37,62	37,66	37,32	36,84	35,12	33,82	33,16	31,02	31,92	32,79	33,45	49,29	35,42	36,10	37,48
Pertumbuhan (yoy)%	3,42	2,83	-1,57	-3,74	-6,63	-10,12	-11,15	-15,30	-9,13	-3,03	0,87	9,71	10,99	10,09	12,07
Pertumbuhan (mtm)%	2,56	7,65	-1,30	1,95	-1,04	-3,30	0,71	-6,45	2,30	1,48	1,35	0,71	2,00	1,49	1,47
LDR %	96,42	93,61	86,00	88,30	91,33	86,81	83,09	78,99	82,97	79,42	83,33	122,95	90,87	92,90	94,02
NPL-gross %	1,44	1,87	2,50	2,26	1,84	2,25	2,86	1,94	2,02	1,92	1,78	3,40	1,82	1,96	1,80
NPL-Nominal (Rp Triliun)	0,54	0,70	0,93	0,83	0,65	0,76	0,95	0,60	0,64	0,63	0,60	1,67	0,64	0,71	0,67

Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Lokasi Bank, diolah

Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK)/Simpanan

Simpanan	2020				2021				2022				2023		
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
Total (Rp Triliun)	39,02	40,23	43,39	41,72	38,46	38,96	39,90	39,50	38,46	41,10	40,13	40,09	38,98	38,86	39,87
Pertumbuhan (yoy)%	1,45	-5,23	9,37	-1,25	-1,43	-3,17	-8,04	-5,32	0,03	5,52	0,58	1,48	1,34	-5,47	0,41
Giro (Rp Triliun)	7,80	8,25	11,20	9,23	7,30	7,97	7,99	9,05	10,61	9,25	7,28	6,32	6,90	6,73	8,19
Pertumbuhan (yoy)%	-10,32	-31,21	22,39	6,97	-6,33	-3,54	-28,71	-1,95	45,23	16,16	-8,71	-30,22	-34,94	-27,23	12,33
Tabungan (Rp Triliun)	20,54	21,19	21,81	23,33	19,4	19,33	21,04	22,09	20,27	21,45	21,49	24,07	21,55	22,52	22,07
Pertumbuhan (yoy)%	8,20	6,38	7,92	-4,41	-5,54	-8,77	-3,51	-5,31	4,50	10,95	2,13	7,93	6,27	4,97	3,43
Deposito (Rp Triliun)	10,67	10,77	10,38	9,16	11,75	11,66	10,88	8,15	7,58	10,40	11,35	9,71	10,53	9,61	9,62
Pertumbuhan (yoy)%	-0,95	2,42	0,66	-0,57	10,03	8,14	4,74	-11,02	-35,47	-10,76	4,40	19,04	38,94	-7,63	-13,23

Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Lokasi Bank, diolah

Kredit/Pembiayaan Berdasarkan Tujuan Penggunaan

Pinjaman	2020				2021				2022				2023		
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
Total Kredit (Rp Triliun)	37,62	37,66	37,32	36,84	35,12	33,82	33,16	31,20	31,91	32,46	33,45	34,23	35,42	36,1	37,48
Pertumbuhan (yoy) %	3,42	2,83	-1,57	-3,74	-6,63	-10,21	-11,15	-15,30	-9,13	-3,46	0,87	9,71	10,99	10,09	12,07
Modal Kerja (Rp Triliun)	9,87	11,17	10,74	10,32	9,63	8,47	8,26	7,36	7,33	7,54	7,26	6,8	6,51	66,14	6,75
Pertumbuhan (yoy)%	-9,82	1,95	-8,69	-7,41	-2,48	-24,21	-23,06	-28,68	-23,78	-10,87	-12,08	-7,63	-11,27	-12,79	-7,06
Investasi (Rp Triliun)	4,17	3,81	3,67	3,52	2,63	2,61	2,50	2,59	2,74	2,94	3,29	3,62	4,18	4,56	5,25
Pertumbuhan (yoy)%	-6,66	-15,77	-20,28	-21,92	-36,90	-31,58	-31,77	-26,42	4,30	12,56	31,82	39,86	52,56	53,45	59,27
Konsumsi (Rp Triliun)	23,57	22,66	22,91	23,00	22,86	22,73	22,39	21,24	21,83	22,15	22,88	23,79	14,72	24,92	25,48
Pertumbuhan (yoy)%	12,50	7,27	6,31	1,70	-3,01	0,29	-2,26	-7,65	-4,51	-2,54	2,19	12,04	13,25	12,1	11,33

Pinjaman	2020				2021				2022				2023		
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
Total Kredit (Rp Triliun)	43,88	43,00	43,54	41,64	40,62	42,37	44,86	46,46	47,21	47,57	47,09	49,29	48,38	48,97	49,88
Pertumbuhan (yoy) %	3,07	0,52	0,07	-5,32	-7,43	-1,48	3,03	11,58	16,22	12,28	5,00	6,09	2,49	2,65	5,91
Modal Kerja (Rp Triliun)	12,16	13,20	13,73	12,13	11,77	11,49	14,38	13,70	14,03	13,63	12,24	12,89	12,07	12,62	12,47
Pertumbuhan (yoy)%	(2,05)	4,82	1,86	(3,30)	(3,24)	(12,98)	4,73	12,94	19,23	18,67	-14,48	-5,92	-13,98	-7,61	1,84
Investasi (Rp Triliun)	7,07	6,40	6,27	5,86	5,17	6,86	5,93	8,89	8,96	9,38	9,59	10,24	9,75	9,62	10,15
Pertumbuhan (yoy)%	-9,00	-16,36	-13,10	-19,87	-26,89	7,08	-5,46	51,64	73,56	36,89	61,89	15,22	8,80	2,30	5,79
Konsumsi (Rp Triliun)	24,65	23,40	23,54	23,64	23,68	24,02	24,55	23,86	12,20	24,55	25,25	26,15	26,55	16,72	27,26
Pertumbuhan (yoy)%	10,10	3,85	3,19	-1,95	-3,92	2,67	4,29	0,95	2,22	2,20	2,88	9,64	9,69	8,49	7,93

Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Lokasi Proyek, diolah

Kredit/Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi

Sektor (Rp Triliun)	2020				2021				2022				2023		
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
Pertanian	3,29	3,6	3,47	2,63	1,78	1,99	1,81	1,29	1,27	1,23	1,39	1,57	1,74	1,92	2,20
Pertambangan	0,04	0,05	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,41	0,04	0,04	0,04	0,05
Industri Pengolahan	1,68	1,77	1,45	2,29	1,94	1,02	0,69	0,81	0,86	0,89	0,05	1,00	1,06	1,16	1,24
Listrik Gas dan Air	0,11	0,1	0,1	0,09	0,08	0,08	0,07	0,06	0,07	0,07	0,89	0,06	0,06	0,07	0,13
Konstruksi	0,88	0,94	0,98	0,98	0,82	0,68	0,72	0,56	0,47	0,57	0,06	0,63	0,51	0,58	0,62
Perdagangan	5,78	5,83	5,64	5,19	4,97	4,9	5,04	4,39	4,43	5,02	0,65	5,06	5,26	5,29	5,47
Pengangkutan	0,22	0,33	0,21	0,2	0,18	0,17	0,17	0,16	0,16	0,15	5,19	0,17	0,21	0,22	0,23
Jasa Dunia Usaha	0,36	0,37	0,3	0,33	0,32	0,15	0,14	0,12	0,14	0,15	0,16	0,16	0,20	0,23	0,23
Jasa Masyarakat	0,6	0,63	0,63	0,58	0,56	0,56	0,4	0,77	0,74	0,68	0,54	0,52	0,54	0,61	0,71
Lainnya	24,66	24,04	24,47	24,49	24,41	24,21	24,06	21,24	21,83	22,16	22,88	23,80	24,72	24,93	25,48
Total	37,62	37,66	37,32	36,84	35,12	33,82	33,16	31,2	31,92	32,65	33,45	34,23	35,42	36,10	37,48

Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Lokasi Bank, diolah

Sektor (Rp Triliun)	2020				2021				2022				2023		
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
Pertanian	3,74	3,83	3,82	3,66	2,89	2,55	3,53	2,47	2,41	2,41	2,59	2,88	2,97	3,79	4,05
Perikanan	0,19	0,33	0,36	0,34	0,40	0,40	0,39	0,76	0,69	0,42	0,42	0,31	0,30	0,30	0,30
Pertambangan	1,35	1,16	1,24	0,98	1,08	1,06	0,87	3,91	4,78	4,94	4,72	5,52	3,59	2,47	2,27
Ind. Pengolahan	3,27	3,28	3,76	2,87	2,62	2,55	2,34	1,47	1,58	2,44	1,73	2,65	3,43	4,13	3,97
Listrik, Gas & Air	0,52	0,62	0,63	0,60	0,60	2,63	0,78	0,49	0,37	0,36	0,35	0,35	0,33	0,27	0,33
Konstruksi	1,51	1,53	1,60	1,55	1,38	1,38	1,43	1,02	0,86	0,88	0,93	0,89	0,78	0,82	0,93
Perdagangan	6,34	6,30	6,02	5,54	5,53	5,45	6,70	6,31	6,18	6,70	6,83	6,64	6,67	6,66	6,85
Hotel & Restoran	0,39	0,47	0,48	0,45	0,48	0,46	0,72	0,65	0,63	0,63	0,63	0,43	0,46	0,49	0,52
Transportasi, Gudang & Kom.	0,49	0,45	0,44	0,40	0,38	0,33	0,98	0,92	1,00	0,41	0,40	0,34	0,30	0,30	0,36
Perantara Keuangan	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,04	0,04	0,01	0,17	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
Perumahan, usaha sewa & Js. Perusahaan	0,40	0,41	0,40	0,39	0,39	0,34	1,22	3,31	3,35	2,39	2,33	2,22	2,10	2,01	1,92
Adm Pemerintahan, Jasa Pendidikan	0,04	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jasa Kesehatan & Keg. Sosial	0,03	0,03	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,06	0,06
Jasa Kemasyarakatan	0,19	0,18	0,18	0,19	0,18	0,18	0,19	0,19	0,21	0,22	0,22	0,24	0,25	0,26	0,29
Jasa Perseorangan	0,65	0,66	0,66	0,60	0,59	0,59	0,47	0,81	0,79	0,72	0,57	0,55	0,56	0,62	0,73
Badan Internasional	0,07	0,11	0,11	0,10	0,10	0,11	0,22	0,15	0,12	0,09	0,08	0,06	0,06	0,05	0,05
Keg. Yg. Blm Jelas Keg-nya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerima Kredit Bukan Lap. Usaha	0,03	0,20	0,26	0,27	0,28	0,27	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	24,65	23,40	23,54	23,64	23,68	24,02	24,55	23,86	24,21	24,70	25,25	26,15	26,55	26,72	27,26

Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Lokasi Proyek, diolah

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perkembangan Ekonomi Daerah

Pada triwulan II 2023 ekonomi Aceh tumbuh sebesar 4,37% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,63% (yoy).

Pada triwulan II 2023, ekonomi Aceh tumbuh sebesar 4,37% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,63% (yoy). Perlambatan tersebut disebabkan oleh rendahnya aktivitas pertambangan terutama pada sektor migas serta melambatnya perkembangan ekspor di Provinsi Aceh. Meskipun demikian, ekonomi Aceh masih ditopang oleh peningkatan konsumsi pemerintah, PMTB, dan konsumsi rumah tangga pada sisi permintaan. Sementara pada sisi lapangan usaha, pertumbuhan ditopang oleh peningkatan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

Perkembangan Keuangan Daerah

Kinerja keuangan daerah pada triwulan II 2023 secara umum masih membaik, tercermin dari tumbuhnya persentase PAD.

Kinerja ekonomi Aceh tetap kuat ditopang oleh Konsumsi Pemerintah. Hal tersebut tercermin dari tumbuhnya persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menandakan momentum kembali normalnya aktivitas perekonomian meskipun terjadi penurunan pada Realisasi Belanja Negara (APBN). Realisasi Belanja Pemerintah Pusat hingga triwulan II 2023 mencapai 41,03% dari total pagu belanja (Rp47,58 triliun) atau sebesar Rp20,32 triliun.

Perkembangan Inflasi Daerah

Inflasi Gabungan Kota di Provinsi Aceh pada triwulan II 2023 tercatat

Pada triwulan II 2023, laju Inflasi Gabungan Kota IHK di Provinsi Aceh mengalami perlambatan dibandingkan dengan periode sebelumnya,

sebesar 2,70% (yoy) atau lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 5,46% (yoy).

seiring dengan deflasi pada beberapa komoditas pangan dan upaya pengendalian inflasi yang gencar dilakukan di Provinsi Aceh. Kendati demikian, terdapat kenaikan pada komoditas-komoditas tertentu seperti beras dan cabai sehingga perlu adanya kebijakan lebih lanjut dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Aceh untuk mengatasi kenaikan harga komoditas pangan sebagai dampak dari El Nino yang terjadi di sebagian besar wilayah di Provinsi Aceh.

Stabilitas Keuangan Daerah dan Pengembangan Akses Keuangan UMKM

Stabilitas Sistem Keuangan Provinsi Aceh pada triwulan II 2023 tetap terjaga.

Stabilitas Sistem Keuangan Provinsi Aceh pada triwulan II 2023 tetap terjaga. Hal ini tercermin dengan peningkatan pembiayaan berdasarkan lokasi bank. Peningkatan pembiayaan ini selanjutnya diikuti dengan peningkatan Financing to Deposit Ratio (FDR) menjadi 92,90%. Selain itu, pembiayaan berdasarkan lokasi proyek juga meningkat sehingga mendorong FDRnya menjadi 126,02%. Kemudian untuk pembiayaan UMKM, berdasarkan lokasi proyek, rasio pembiayaannya adalah sebesar 22,73%.

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Selama triwulan II 2023, perkembangan sistem pembayaran konsisten berjalan lancar dalam menopang pemulihan perekonomian Provinsi Aceh.

Selama triwulan II 2023, perkembangan sistem pembayaran secara konsisten berjalan lancar dalam menopang pemulihan perekonomian Provinsi Aceh. Sistem pembayaran tunai berjalan sesuai dengan pola historisnya dimana terjadi net outflow pada triwulan laporan. Sistem pembayaran non tunai nilai besar dan ritel mengalami penurunan. Di sisi lain, penggunaan kartu ATM/debit, kartu kredit dan QRIS tumbuh positif pada triwulan laporan.

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan, meskipun kemiskinan menunjukkan kenaikan dibandingkan periode sebelumnya.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) periode berjalan mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Namun berbanding terbalik pada aspek kemiskinan yang menunjukkan peningkatan persentase. Jika dibandingkan dengan seluruh provinsi di Sumatera, TPT Aceh berada pada urutan keempat, sedangkan kemiskinan masih berada pada peringkat pertama.

Prospek Perekonomian

Perekonomian Aceh pada tahun 2023 diperkirakan akan melanjutkan pertumbuhan positif dari tahun sebelumnya.

Kinerja perekonomian Aceh pada tahun 2023 diperkirakan tumbuh 4,25%-4,75% (yoy) atau berpotensi lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya (4,21%, yoy). Kondisi tersebut diperkirakan dipengaruhi oleh kinerja konsumsi pemerintah yang diperkirakan terakselerasi seiring dengan gencarnya proyek konstruksi pada PSN, serta adanya faktor *base effect* dari periode lalu. Laju inflasi tahun 2023 diperkirakan berada di dalam sasaran inflasi nasional sebesar $3\pm 1\%$ seiring dengan melambatnya inflasi kelompok bahan makanan akibat sinergi TPID Aceh dalam menjaga kecukupan pasokan bahan pangan strategis.



BAB I

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH

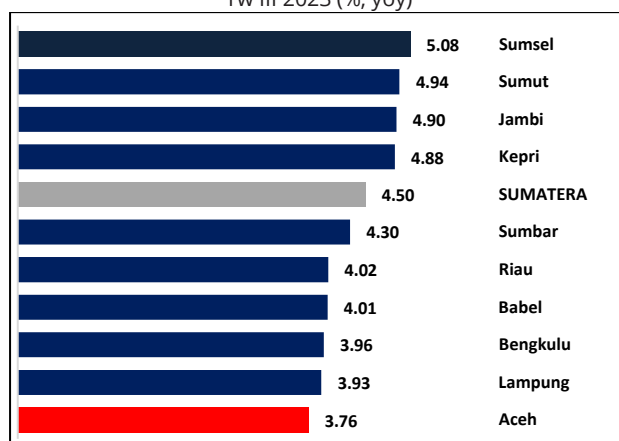
Pada triwulan III 2023, ekonomi Aceh tumbuh sebesar 3,76% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,37% (yoy). Perlambatan tersebut disebabkan oleh rendahnya aktivitas pertambangan dan industri pengolahan serta melambatnya perkembangan ekspor di Provinsi Aceh. Pertumbuhan ekonomi Aceh masih ditopang oleh peningkatan konsumsi pemerintah, PMTB, dan konsumsi rumah tangga pada sisi permintaan. Sementara pada sisi lapangan usaha, pertumbuhan ditopang oleh peningkatan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Lapangan Usaha Perdagangan.

1.1. Gambaran umum

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III 2023 mengalami pertumbuhan positif, namun melambat dibanding triwulan sebelumnya. Perekonomian nasional tumbuh sebesar 4,94% (yoy) mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,17% (yoy).

Perekonomian Sumatera pada triwulan III 2023 juga tumbuh positif sebesar 4,50% (yoy). Realisasi tersebut mengalami deselerasi dari periode sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,90% (yoy). Berdasarkan wilayah regional Sumatera (Grafik 1.1), semua wilayah mengalami pertumbuhan yang positif dimana Provinsi Sumatera Selatan mencatat angka pertumbuhan tertinggi sebesar 5,08%, diikuti oleh Provinsi Sumatera Utara sebesar 4,94% dan Provinsi Jambi sebesar 4,90%.

Grafik 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Sumatera
Tw III 2023 (% yoy)

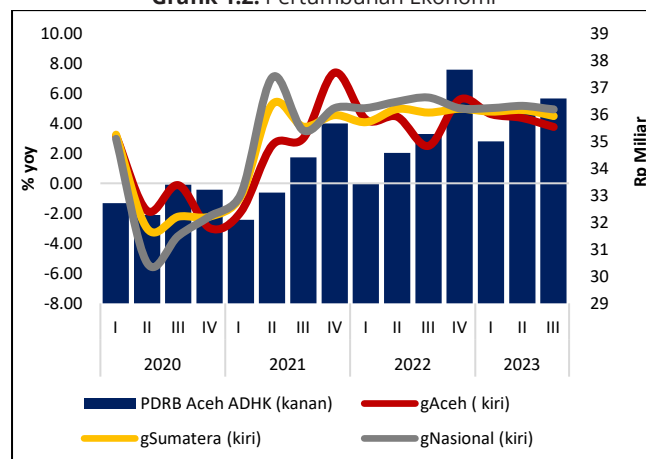


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Secara spasial, Provinsi Aceh tercatat memiliki pangsa sebesar 5,73% terhadap perekonomian Sumatera. Sumbangan tersebut relatif stabil dibanding periode-periode sebelumnya. Dengan proporsi tersebut, Aceh masih menjadi provinsi dengan perekonomian terkecil di Sumatera setelah Bengkulu (1,99%) dan Kepulauan Bangka Belitung (2,33%). Sementara itu, Sumatera Utara (23,12%), Riau (21,62%), dan Sumatera Selatan (13,53%) masih menjadi provinsi dengan sumbangan ekonomi paling dominan di Sumatera dengan pangsa dari ketiga provinsi tersebut mencapai lebih dari 50% dari total ekonomi Sumatera.

Ekonomi Aceh triwulan III 2023 tercatat tumbuh sebesar 3,76% (yoy) (Grafik 1.2), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,37% (yoy). Perlambatan yang terjadi pada triwulan laporan didorong oleh kontraksi ekspor akibat perekonomian global dan harga komoditas yang melemah, seperti batubara dan kelapa sawit. Ditinjau dari sisi permintaan, Perlambatan tersebut disebabkan oleh rendahnya aktivitas pertambangan terutama pada sektor migas. Pertumbuhan ekonomi Aceh masih didorong oleh peningkatan konsumsi pemerintah, PMTB, dan konsumsi rumah tangga. Sementara dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi Aceh ditopang oleh peningkatan pada Lapangan Usaha (LU) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

Grafik 1.2. Pertumbuhan Ekonomi

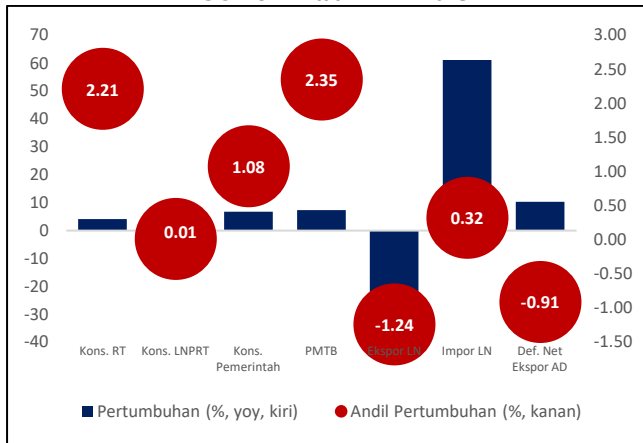


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

1.2. Sisi Permintaan

Dari sisi permintaan, perlambatan pertumbuhan utamanya bersumber dari menurunnya kinerja ekspor. Sementara itu, PMTB masih menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan laporan. PMTB menjadi komponen yang memberikan andil akselerasi tertinggi sebesar 2,35% pada triwulan laporan, diikuti oleh konsumsi rumah tangga (2,21%) dan konsumsi pemerintah (1,08%) (Grafik 1.3).

Grafik 1.3. Pertumbuhan dan Andil Pertumbuhan Sisi Permintaan Tw III 2023



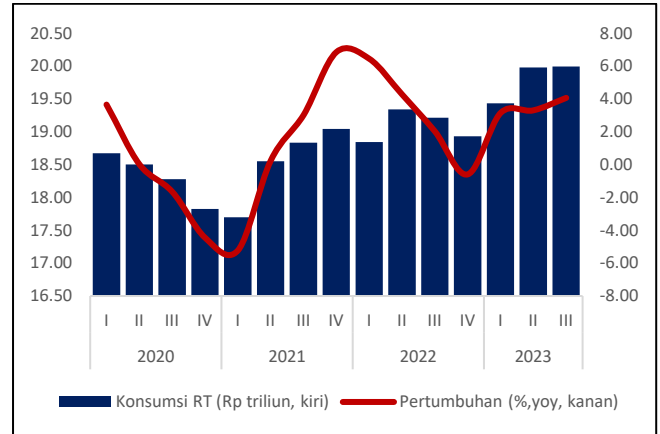
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Konsumsi Rumah Tangga

Pada triwulan III 2023, konsumsi rumah tangga tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 4,06% (yoy), atau lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya yang mengalami akselerasi sebesar 3,31% (yoy) (Grafik 1.4). Pertumbuhan tersebut memberikan andil sebesar 2,21% untuk pertumbuhan PDRB Aceh. Kondisi ini tidak terlepas dari momentum libur sekolah dan perayaan Maulid Nabi.

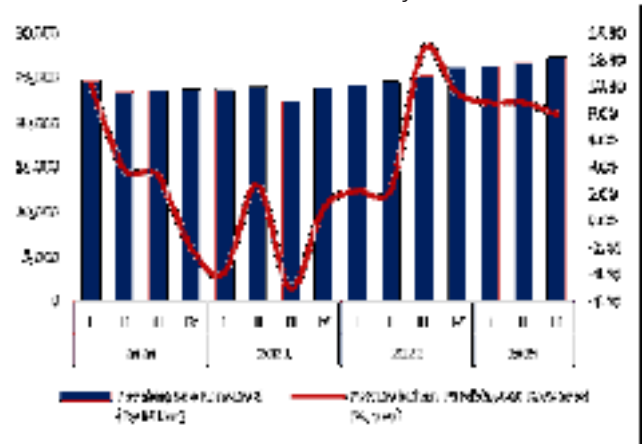
Sejalan dengan konsumsi rumah tangga, penyaluran pembiayaan konsumsi juga mengalami peningkatan pada periode laporan. Secara nominal, pembiayaan kepada rumah tangga tercatat sebesar Rp26,7 Triliun, atau meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya maupun periode yang sama tahun lalu (Grafik 1.5). Peningkatan kinerja pembiayaan rumah tangga terjadi pada seluruh jenis pembiayaan, terutama pembiayaan dengan penggunaan yang bersifat multiguna. Pertumbuhan pembiayaan konsumsi tercatat mengalami sedikit peningkatan dari 8,79% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi sebesar 8,82% (yoy) pada triwulan laporan.

Grafik 1.4. Pertumbuhan Konsumsi RT



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

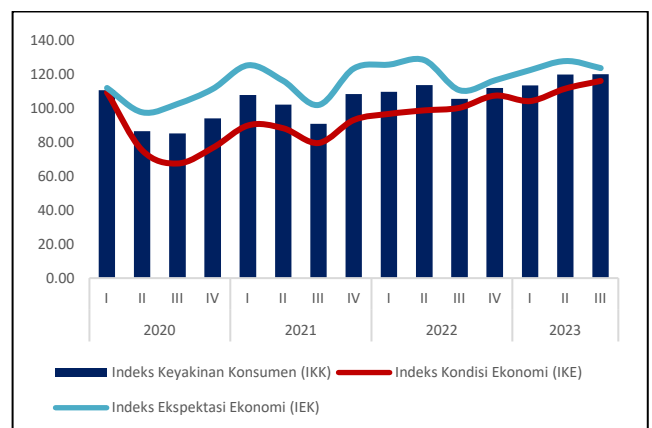
Grafik 1.5. Pertumbuhan Pembiayaan Konsumsi RT



Sumber: Laporan Bank Umum, lokasi proyek, diolah

Membaiknya konsumsi RT juga terlihat dari membaiknya hasil survei konsumen yang menunjukkan perbaikan optimisme masyarakat pada triwulan III 2023. Hal ini tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada triwulan III 2023 yang tercatat sebesar 120,24, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 120,05. (Grafik 1.6).

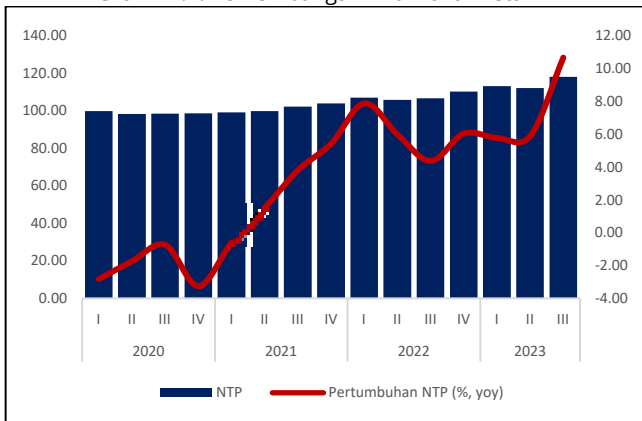
Grafik 1.6. Perkembangan Hasil Survei Konsumen



Sumber : Survei Konsumen, Bank Indonesia, diolah

Sementara itu, Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan II 2023 juga membaik. NTP pada triwulan laporan tercatat sebesar 111,96, atau lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 105,74 (Grafik 1.7). NTP menunjukkan daya tukar (*terms of trade*) dari produk pertanian dengan biaya produksi barang dan jasa yang dikonsumsi. Artinya pada triwulan laporan, daya tukar petani masih cukup baik, di mana indeks yang diterima lebih besar dari indeks yang dibayarkan.

Grafik 1.7. Perkembangan Nilai Tukar Petani



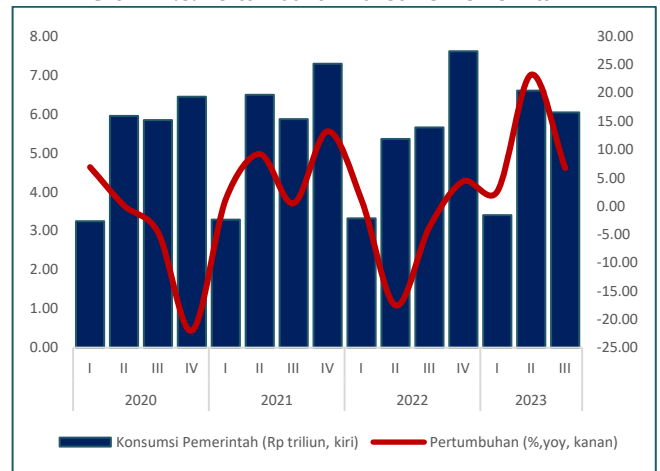
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Konsumsi Pemerintah

Kinerja konsumsi pemerintah pada triwulan III 2023 tercatat tumbuh sebesar 6,71% (yoy), atau mengalami deselerasi dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 23,20% (yoy) (Grafik 1.8). Deselerasi Konsumsi Pemerintah pada Tw III didorong oleh realisasi belanja pemerintah yang telah terealisasi cukup tinggi pada triwulan III.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Aceh, realisasi belanja pemerintah daerah pada triwulan III 2023 sebesar Rp20,56 Triliun (52,85% dari total pagu), meningkat dibandingkan persentase realisasi tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut didorong oleh seluruh komponen belanja operasi dan belanja transfer, belanja pegawai, subsidi, hibah, dan bansos. Realisasi belanja anggaran konsolidasi sampai dengan triwulan III 2023 sebesar Rp53,42 Triliun, atau melambat sebesar 4,66% (yoy) dibanding triwulan III 2022.

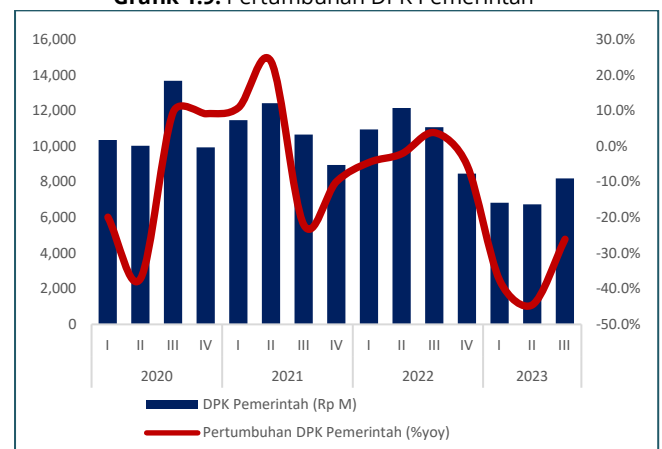
Grafik 1.8. Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Realisasi belanja pemerintah yang mengalami perlambatan sejalan dengan pertumbuhan DPK Pemerintah yang meningkat secara nominal dan *growth* dibanding triwulan sebelumnya. Pada triwulan III 2023, Dana Pihak Ketiga (DPK) Pemerintah tercatat sebesar Rp8,18 Triliun, lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya sebesar Rp6,73 Triliun (Grafik 1.9).

Grafik 1.9. Pertumbuhan DPK Pemerintah



Sumber: Laporan Bank Umum, lokasi proyek, diolah

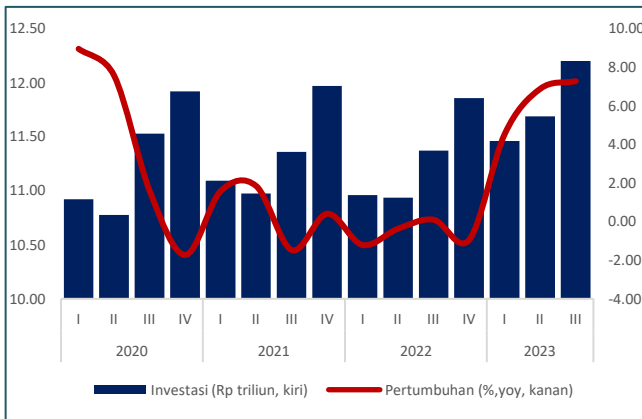
Investasi

Pada triwulan III 2023, kinerja investasi sebagaimana tercermin dari PMTB di wilayah Aceh meningkat sebesar 7,29% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami akselerasi sebesar 6,90% (yoy) (Grafik 1.10).

Ekspansi tersebut sejalan dengan kenaikan impor barang ke Provinsi Aceh yang didominasi oleh barang manufaktur dan bahan bangunan. Hal ini

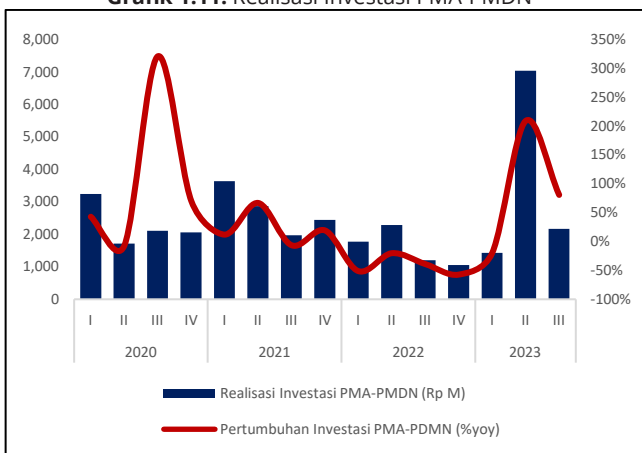
juga sejalan dengan peningkatan realisasi penanaman modal asing (PMA) dan dalam negeri (PMDN). Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Aceh, investasi pada triwulan III 2023 tercatat sebesar Rp2,16 Triliun, mengalami normalisasi dengan tumbuh sebesar 80,50% (yoy) dibanding triwulan lalu yang tumbuh ekstrem pada angka 208,47% (yoy). (Grafik 1.11).

Grafik 1.10. Pertumbuhan Investasi



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

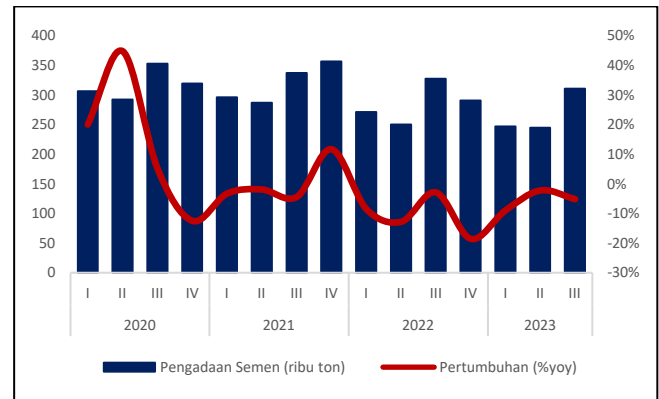
Grafik 1.11. Realisasi Investasi PMA-PMDN



Sumber: Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), diolah

Sementara itu, investasi bangunan yang diindikasikan dari pengadaan semen masih mengalami kontraksi pada triwulan III 2023. Pengadaan semen pada triwulan III 2023 terkontraksi sebesar 5,16% (yoy), mengalami penurunan dibanding dengan realisasi triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 2,21% (yoy) (Grafik 1.12).

Grafik 1.12. Realisasi Pengadaan Semen



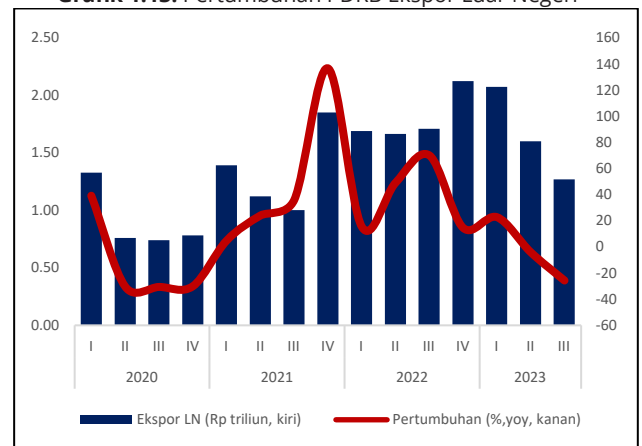
Sumber: Asosiasi Semen Indonesia (ASI), diolah

Ekspor Luar Negeri

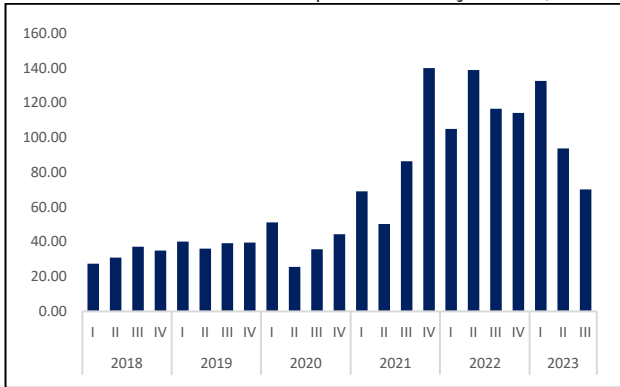
Ekspor luar negeri Provinsi Aceh pada triwulan II 2023 tercatat tumbuh sebesar 3,94% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 22,67% (yoy) (Grafik 1.13). Dengan laju tersebut, ekspor luar negeri Aceh memberikan andil negatif sebesar 0,18% terhadap kinerja ekonomi Aceh secara keseluruhan pada triwulan II 2023.

Kinerja komponen ekspor luar negeri yang melambat tersebut didorong oleh menurunnya harga komoditas ekspor unggulan Aceh seperti batu bara, kopi, dan minyak kelapa sawit. Nilai ekspor barang asal Provinsi Aceh pada triwulan II 2023 secara nominal tercatat sebesar USD 161,85 juta. Keseluruhan ekspor pada triwulan laporan semuanya berupa komoditas nonmigas terutama dari kelompok bahan bakar mineral; kopi, teh, rempah-rempah; dan buah-buahan.

Grafik 1.13. Pertumbuhan PDRB Ekspor Luar Negeri

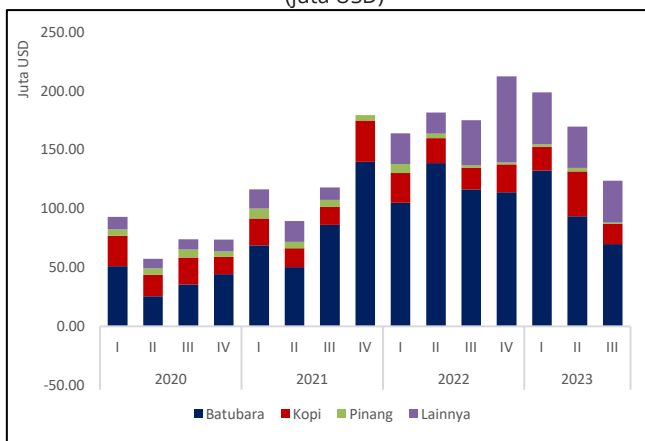


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Grafik 1.14. Realisasi Ekspor Batubara (juta USD)

Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), diolah

Secara umum, kinerja ekspor masih ditopang oleh komoditas utama yaitu batubara dan kopi dengan pangsa masing-masing sebesar 56,60% dan 13,76% dari total ekspor Provinsi Aceh. Ekspor komoditas batubara pada triwulan III 2023 mencapai USD 69,92 juta, tercatat mengalami kontraksi sebesar 39,94% (yoy) (Grafik 1.14). Kinerja ekspor batubara yang lebih tinggi tertahan oleh masih terbatasnya negara tujuan ekspor batubara Aceh yang saat ini didominasi India. Komoditas ekspor terbesar kedua adalah kopi, di mana pada triwulan laporan ekspor kopi Aceh mencapai USD 17,03 juta, atau mengalami kontraksi sebesar 8,37% (yoy).

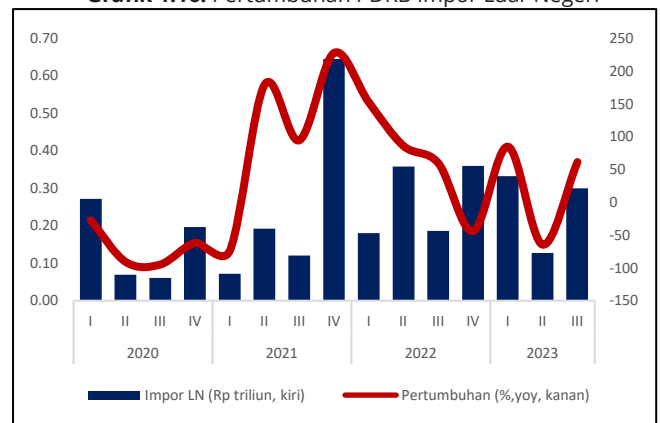
Grafik 1.15. Perkembangan Ekspor Komoditas Utama Aceh (juta USD)

Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), diolah

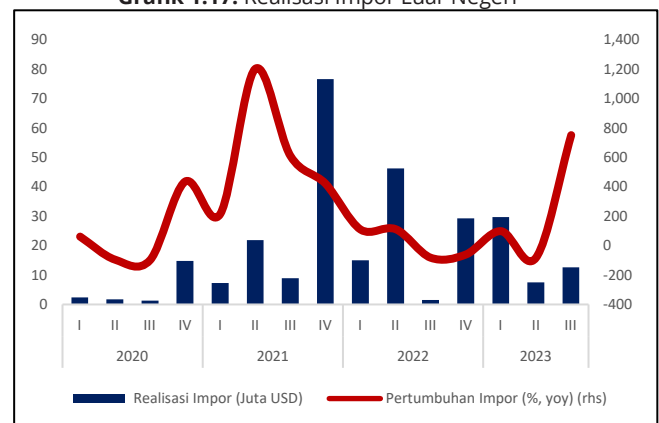
Impor Luar Negeri

Komponen impor luar negeri pada triwulan III 2023 tercatat mengalami ekspansi sebesar 61,11% (yoy), berbeda dengan triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 64,44% (yoy) (Grafik 1.16).

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Bea Cukai Aceh, nilai impor barang ke Provinsi Aceh pada triwulan III 2023 sebesar USD 12,55 juta, lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar USD 1,47 juta (Grafik 1.17). Nilai impor barang tersebut mengalami akselerasi sebesar 751,34% (yoy) pada triwulan III. Secara umum, kinerja impor luar negeri masih didominasi oleh kelompok peralatan mesin dan bahan kimia. Secara lebih spesifik, barang impor utamanya merupakan peralatan mesin khusus *civil engineering and contractor plant and equipment and parts* serta kebutuhan pokok seperti beras dan pupuk. Secara umum, perlambatan impor didorong oleh realisasi belanja modal yang umumnya masih terhambat seiring dengan belum dilakukannya proses pengadaan maupun lelang.

Grafik 1.16. Pertumbuhan PDRB Impor Luar Negeri

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Grafik 1.17. Realisasi Impor Luar Negeri

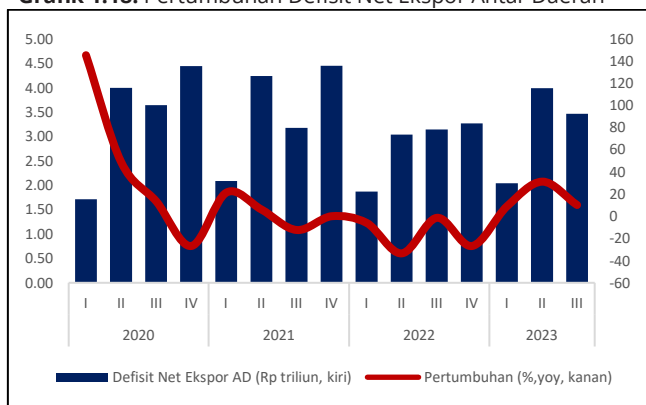
Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), diolah

Net Ekspor Antar Daerah

Defisit neraca ekspor antar daerah¹ Provinsi Aceh pada Triwulan III 2023 meningkat sebesar 10,26% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 31,42% (yoy). Pada triwulan III 2023, defisit neraca ekspor antar daerah tercatat Rp3,46 Triliun (ADHK), lebih rendah dibandingkan triwulan II 2023 sebesar Rp3,99 Triliun (ADHK), namun lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp3,14 Triliun (ADHK) (Grafik 1.18).

Berdasarkan data perdagangan antar wilayah dari Badan Pusat Statistik, penjualan antar wilayah paling besar di Provinsi Aceh dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang minyak mentah kelapa sawit dengan nilai penjualan sebesar Rp764 Miliar. Di sisi lain, komoditas pembelian dari daerah lain didominasi oleh mobil, sepeda motor, minyak bahan bakar, kendaraan bermotor dengan tujuan khusus, dan alat transportasi umum alat transportasi umum jenis kendaraan bermotor untuk penumpang. Lima kelompok komoditas ini mencakup 41,93% dari total pembelian antar wilayah di Provinsi Aceh. Provinsi Aceh melakukan pembelian terbesar dari Sumatera Utara dan DKI Jakarta.

Grafik 1.18. Pertumbuhan Defisit Net Ekspor Antar Daerah

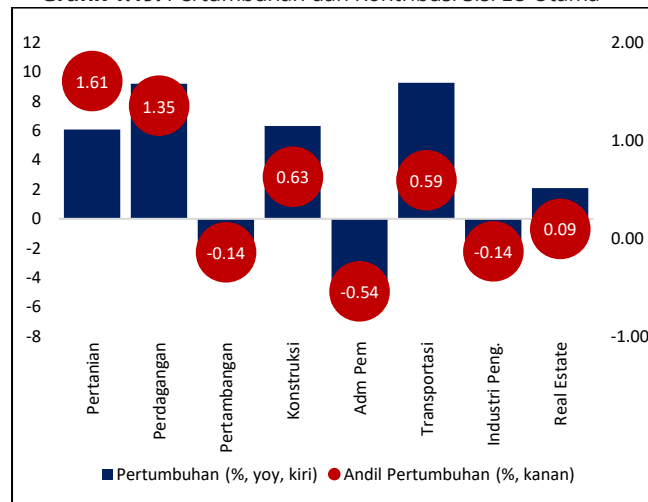


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

1.3. Sisi Lapangan Usaha

Perekonomian Aceh bersumber dari tiga lapangan usaha (LU) utama, yaitu LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (pangsa 27,00%), LU Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (pangsa 15,48%), serta LU Konstruksi (pangsa 10,21%). Secara kumulatif, ketiga LU tersebut memberikan kontribusi sebesar 52,68% terhadap struktur PDRB Provinsi Aceh. Kinerja ketiga LU utama Aceh pada triwulan III 2023 menunjukkan pertumbuhan yang positif sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh. Di sisi lain, perlambatan pada LU Pertambangan dan Penggalian menahan pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh ke level yang lebih tinggi. Adapun pertumbuhan ekonomi Aceh triwulan III 2023 ditopang oleh LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (andil 1,61%, yoy), LU Perdagangan Besar dan Eceran (andil 1,45%, yoy), dan LU Konstruksi (andil 0,63%, yoy), dan (Grafik 1.19).

Grafik 1.19. Pertumbuhan dan Kontribusi Sisi LU Utama



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Lapangan Usaha Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

Kinerja lapangan usaha pertanian pada triwulan III 2023 tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 6,08% (yoy), atau terakselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,74% (yoy) (Grafik 1.20).

¹ Defisit antar daerah mengindikasikan arus barang masuk lebih besar dari barang yang keluar.

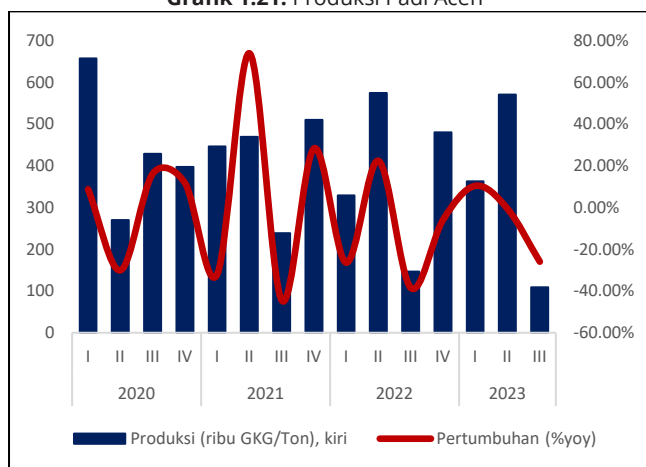
Dari sisi penyaluran pembiayaan sektoral, LU Pertanian mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya dan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada triwulan laporan, posisi pembiayaan mencapai Rp4,05 Triliun atau tumbuh sebesar 43,14% (yoy) (Grafik 1.22). Hal ini menunjukkan perkembangan seluruh sektor pertanian.

Grafik 1.20. Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Grafik 1.21. Produksi Padi Aceh



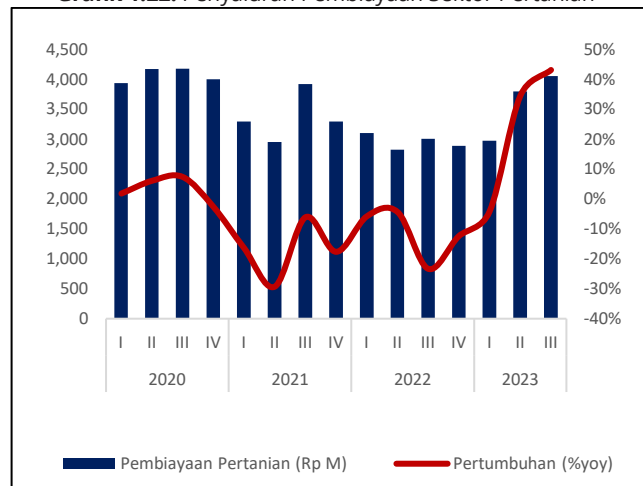
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Meskipun demikian, kinerja LU Pertanian tidak terfleksikan dengan produksi padi pada hasil Kerangka Sampel Area (KSA) BPS yang menunjukkan penurunan produksi padi pada triwulan III 2023 akibat pergeseran panen raya yang terjadi di triwulan IV. Pada triwulan III, produksi padi tercatat sebesar 108,04 ribu GKG/ton, lebih rendah dibandingkan triwulan II sebesar 570,42 ribu GKG/ton (Grafik 1.21).

Sehingga, kinerja LU Pertanian lebih ditunjang oleh

subsektor perkebunan, kehutanan dan perikanan. Pada sektor perkebunan, hasil liaison kepada pelaku usaha yang bergerak pada sektor tersebut menyatakan mengalami kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Hal ini juga didorong oleh peningkatan pengiriman produk dibandingkan tahun sebelumnya akibat tingginya permintaan. Tidak ada investasi tambahan yang dilakukan perusahaan selama periode 2023.

Grafik 1.22. Penyaluran Pembiayaan Sektor Pertanian

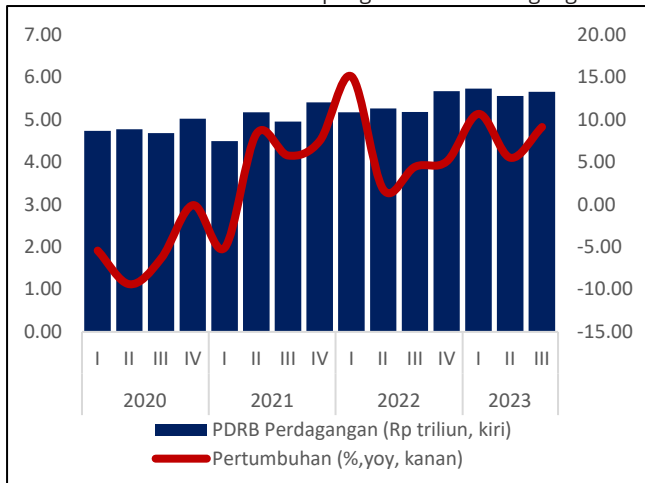


Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Lapangan usaha perdagangan pada triwulan laporan tercatat tumbuh sebesar 9,19% (yoy), mengalami akselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,53% (yoy) (Grafik 1.23). Pertumbuhan LU Perdagangan diindikasikan tidak terlepas dari lebih baiknya kinerja penjualan mobil dan motor di Provinsi Aceh pada Triwulan laporan. Lebih lanjut, lancarnya mobilitas masyarakat terutama di sektor ritel dan pusat perbelanjaan serta peningkatan mobilitas masyarakat sejalan dengan perayaan HBKN Maulid Nabi turut menjadi penopang LU perdagangan Aceh.

Grafik 1.23. Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan

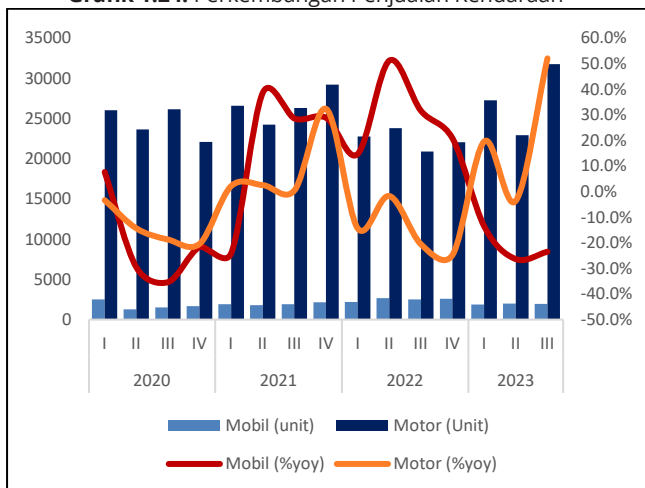


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Lebih lanjut, LU Perdagangan dari sektor penjualan kendaraan roda 4 mengalami perbaikan, meskipun masih kontraksi sebesar 23,46% (yoy), lebih baik dari triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi lebih dalam sebesar 26,33% (yoy). Total penjualan kendaraan mobil di Provinsi Aceh selama triwulan III 2023 sebanyak 1.922 unit kendaraan. Hal tersebut juga didukung oleh penjualan motor yang mengalami perbaikan hingga tumbuh sebesar 52,10% (yoy) atau sebanyak 31.744 unit kendaraan. (Grafik 1.24).

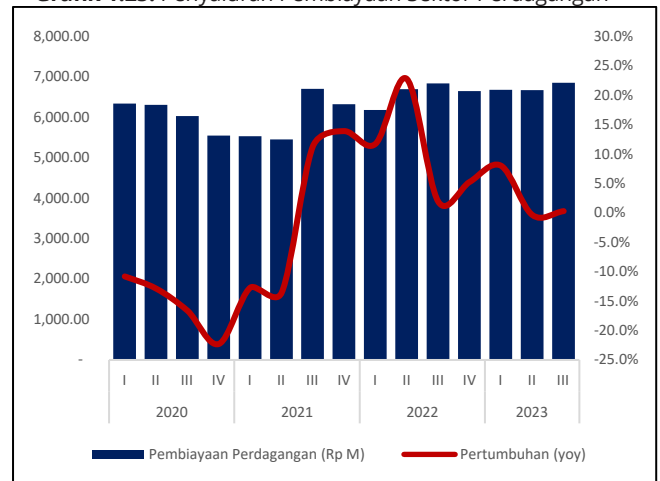
Penyaluran pembiayaan sektoral LU Perdagangan juga mengalami perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan laporan, posisi pembiayaan mencapai Rp6,84 Triliun atau tumbuh sebesar 0,30% (yoy) (Grafik 1.25).

Grafik 1.24. Perkembangan Penjualan Kendaraan



Sumber: BPKA, diolah

Grafik 1.25. Penyaluran Pembiayaan Sektor Perdagangan



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Selanjutnya dari sisi pelaku usaha yang bergerak di sektor perdagangan mobil dan perawatan mobil, akselerasi kinerja usaha terkonfirmasi melalui hasil liaison. Kontak menyatakan penjualan pada triwulan III 2023 secara tahunan mengalami peningkatan sebesar 5,52% (yoy).

Lapangan Usaha Konstruksi

Secara umum pada triwulan III 2023, kinerja lapangan usaha konstruksi tumbuh sebesar 6,31% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 10,86% (yoy) (Grafik 1.26).

Grafik 1.26. Pertumbuhan Lapangan Usaha Konstruksi

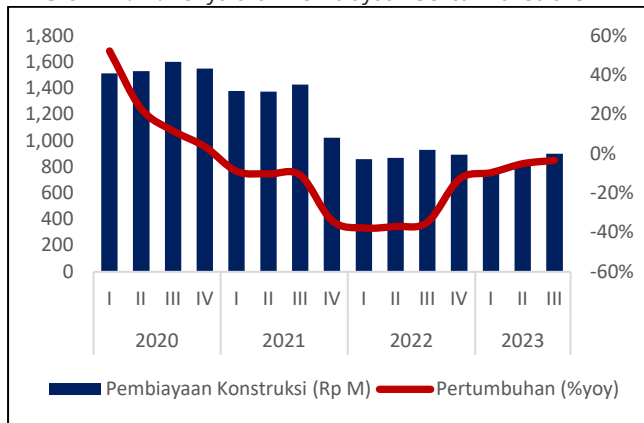


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Perlambatan pertumbuhan LU Konstruksi juga dipengaruhi oleh masih terkontraksinya penyaluran pembiayaan sektor konstruksi. Pada triwulan laporan, posisi pembiayaan LU Konstruksi mencapai Rp900,19 Miliar, atau mengalami

penurunan kontraksi dari sebesar 5,00% (yoy) menjadi 3,27% (yoy) (Grafik 1.27). Meskipun demikian, penyaluran pembiayaan LU Konstruksi diyakini menunjukkan tren perbaikan sejak tahun lalu.

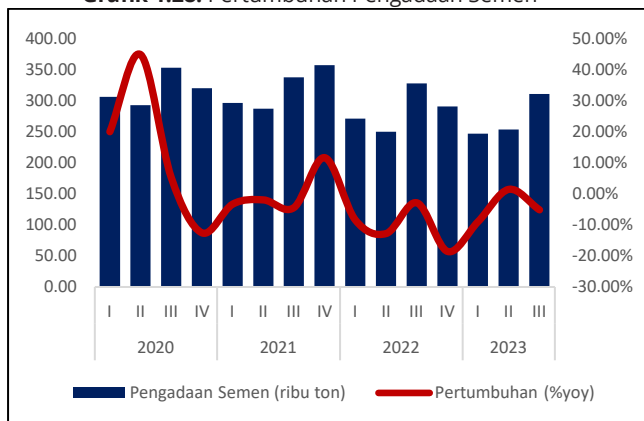
Grafik 1.27. Penyaluran Pembiayaan Sektor Konstruksi



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Perlambatan LU Konstruksi juga ditunjang oleh data realisasi pengadaan semen di Aceh. Pengadaan semen pada triwulan laporan mengalami kontraksi sebesar 5,16% (yoy), atau lebih lambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami akselerasi sebesar 1,41% (yoy). Nominal pengadaan semen pada triwulan laporan mencapai 310,20 ribu ton, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik 1.28).

Grafik 1.28. Pertumbuhan Pengadaan Semen



Sumber: Asosiasi Semen Indonesia (ASI), diolah

Meskipun demikian, kinerja LU Konstruksi tetap terjaga, didukung oleh realisasi proyek pemerintah di Provinsi Aceh, seperti proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), proyek bendungan dan irigasi, serta Pembangunan infrastruktur dalam rangka PON Aceh-Sumut 2024.

Lapangan Usaha Pertambangan

Pada triwulan laporan, kinerja lapangan usaha pertambangan tercatat mengalami kontraksi sebesar 1,84% (yoy), lebih baik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 5,35% (yoy) (Grafik 1.29).

Kontraksi juga sejalan dengan pertumbuhan nilai ekspor batubara pada triwulan laporan yang tercatat masih negatif, sebesar 39,94% (yoy). Meskipun demikian, kontraksi tersebut lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 32,56% (yoy). Produksi batu bara secara tidak langsung tercermin dari nilai ekspor ke luar negeri. (Grafik 1.30)

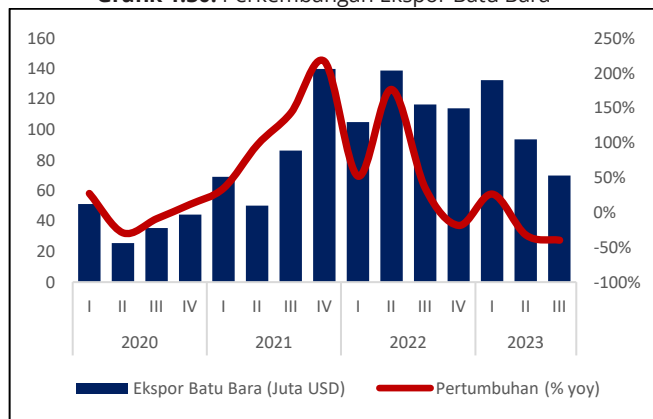
Grafik 1.29. Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertambangan



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

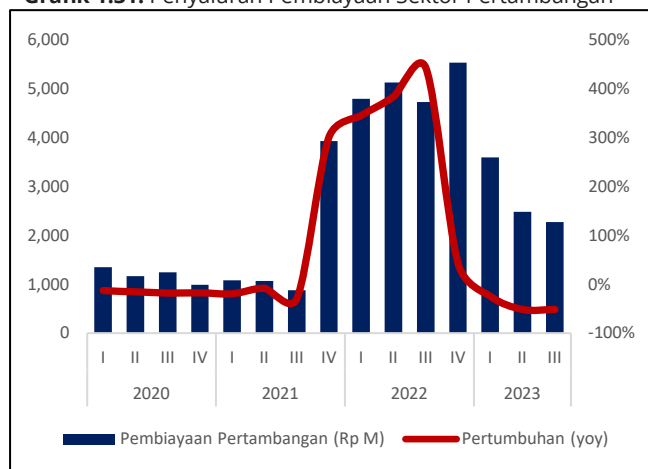
Kinerja LU Pertambangan yang terhambat juga sejalan dengan realisasi penyaluran pembiayaan LU Pertambangan dan Penggalian yang mengalami kontraksi dibandingkan triwulan sebelumnya maupun periode yang sama tahun lalu. Pada triwulan laporan, pembiayaan hanya mencapai Rp2,26 Triliun atau tumbuh negatif sebesar 51,94% (yoy) (Grafik 1.31).

Grafik 1.30. Perkembangan Ekspor Batu Bara



Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), diolah

Grafik 1.31. Penyaluran Pembiayaan Sektor Pertambangan



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah



BAB II

PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH

Kinerja keuangan daerah Aceh pada triwulan laporan tercatat mengalami penurunan. Hal tersebut tercermin dari penurunan persentase realisasi pendapatan maupun belanja pada APBA maupun APBN.

2.1. Gambaran umum

Realisasi Belanja dan Pendapatan Pemerintah di Provinsi Aceh sampai dengan triwulan III 2023 secara nominal maupun presentase terealisasi lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Realisasi agregat Belanja Pemerintah (APBN + APBD) pada triwulan III 2023 mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Secara nominal, total belanja mencapai Rp60,85 triliun atau setara dengan 70,35% dari pagu agregat belanja tahun 2023. Penurunan utamanya disebabkan oleh belum optimalnya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dengan nilai Rp23,34 triliun (lebih kecil dibanding triwulan II 2022 dengan selisih sebesar Rp4,09 triliun).

Sejalan dengan agregat Belanja Pemerintah, realisasi agregat Pendapatan Pemerintah (APBN + APBD) mengalami penurunan secara nominal maupun presentase dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya. Secara nominal, realisasi pendapatan pada triwulan III 2023 tercatat sebesar Rp29,66 Triliun, turun dari realisasi pada periode sebelumnya sebesar Rp 39,07 Triliun. Secara presentase pendapatan terealisasi sebesar 67,12% dari pagu atau lebih rendah dari triwulan III 2023 yang mampu terealisasi hingga 88,73% dari pagu. Dari sisi porsi, Pendapatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa memiliki pangsa terbesar (83,63%) dari total realisasi pendapatan APBD dengan realisasi 64,59% dari pagu triwulan II tahun 2023.

2.2. Perkembangan Kinerja Keuangan Daerah

Nilai pagu Belanja Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) di Aceh pada tahun 2023 berada pada nilai Rp86,49 triliun, terkontraksi sebesar 6,04% (yoy).

Secara umum, pagu APBD baik di level Provinsi maupun Kabupaten/Kota pada pagu belanja mengalami penurunan utamanya pada belanja

Modal. Namun, terjadi peningkatan pagu pada Belanja Pegawai, Belanja Subsidi, dan Belanja Bantuan Sosial.

Tabel 2. 1. Realisasi Belanja APBD (APBA+APBK)
Triwulan III 2023

REALISASI BELANJA PEMERINTAH DAERAH	
TW-III 2023	
 Belanja Operasi	61,28%
Belanja Modal	46,32%
Belanja Tidak terduga	21,12%
Belanja Transfer	64,36%

Sumber: DJPb Provinsi Aceh, diolah

Realisasi Belanja Pemerintah Daerah melalui alokasi APBA dan APBK hingga triwulan III 2023 mencapai 59,99% dari total pagu belanja (Rp38,90 triliun) atau sebesar Rp23,34 triliun, Capaian Belanja Pemerintah Daerah ini lebih rendah dibandingkan realisasi belanja di triwulan III 2022 yang tercatat sebesar 61,28% dari pagu belanja 2022 dengan nominal realisasi belanja sebesar Rp27,43 triliun.

Realisasi Belanja Daerah pada periode laporan umumnya didorong oleh Belanja Operasi, dengan realisasi sebesar Rp16,04 triliun atau sebesar 61,28% terhadap pagu. Realisasi tersebut menurun dibandingkan triwulan II 2023 yang terealisasi sebesar Rp18,55 Triliun atau 66,89% dari total pagu. Sejalan dengan Belanja Operasi, realisasi Belanja Modal juga turut mengalami penurunan realisasi dengan capaian sebesar sebesar Rp2,08 triliun pada triwulan III 2023 atau lebih rendah dibanding periode sebelumnya yang dapat terealisasi sebesar Rp3,63 Triliun.

Selanjutnya, Belanja Tidak Terduga terealisasi sebesar Rp39,13 triliun atau Rp 31,82 Triliun lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya dengan presentase realisasi terhadap pagu sebesar 21,12%. Pada Belanja Transfer, realisasi secara tahunan cenderung tidak mengalami perubahan yang signifikan dengan realisasi pada periode pelaporan sebesar sebesar Rp 5,17 Triliun atau 64,36% terhadap pagu triwulan III 2023.

Tabel 2. 2. Realisasi Belanja Transfer Antar Daerah dan Dana Desa Triwulan III 2023.

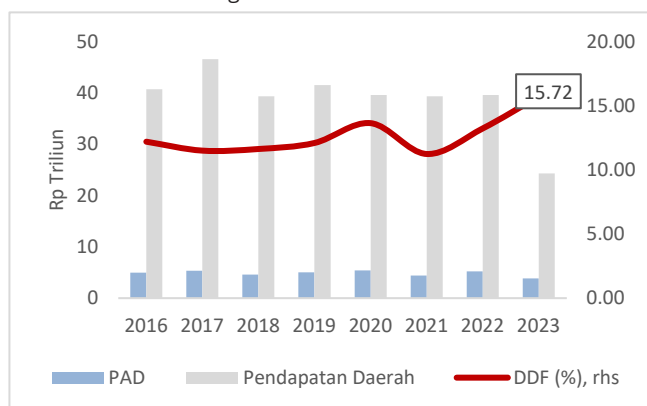
REALISASI BELANJA TRANSFER TW-III 2023

	Belanja Bantuan Keuangan	58,58%
	Belanja Bagi Hasil	75,62%

Sumber: DJPb Provinsi Aceh, diolah

Belanja Transfer mengalami penurunan realisasi secara nominal maupun secara presentase pada periode laporan. Komponen Belanja Transfer terdiri dari dua bagian yakni Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Pada triwulan III 2023 Belanja Bagi Hasil berhasil mengalami pertumbuhan sebesar 10,35% (yoy) (dengan nominal sebesar Rp 0,69 Triliun pada periode pelaporan). Namun demikian, Belanja Bantuan Keuangan tercatat turun dibandingkan triwulan III 2022 dengan realisasi sebesar 58,58% dari pagu Belanja Bantuan Keuangan 2023.

Grafik 2. 1. Perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah Provinsi Aceh



Sumber: DJPb Provinsi Aceh, diolah

Realisasi Pendapatan Daerah terhadap target pendapatan terdeselerasi secara persentase maupun secara nominal pada triwulan III 2023 jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan APBA dan APBK/D pada triwulan III 2023 sebesar 64,98% dari pagu Pendapatan Daerah 2023, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan II 2022 yang terealisasi sebesar 82,57% dari pagu pendapatan 2022. Secara nominal, realisasi mencapai Rp24,30 triliun atau mengalami deselerasi sebesar Rp9,69

triliun (secara *year-on-year* turun sebesar -28,51%). Berdasarkan porsi komponen Pendapatan Daerah, mayoritas berasal dari Pendapatan Transfer yang menyumbang 83,63% dari total realisasi pendapatan pada periode laporan atau sebesar Rp20,32 triliun. Sementara komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp3,82 triliun pada triwulan III 2023 dengan sumbangan sebesar 15,76% dari total realisasi pendapatan. Hal ini menandakan bahwa ketergantungan Pemerintah Daerah di Aceh terhadap Transfer Pemerintah Pusat masih tinggi. Perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) pada Grafik 2.1. menunjukkan perbaikan pada kurun waktu 2016 s.d 2023 dengan semakin terakselerasinya nilai DDF, meskipun pada 2021 sempat mengalami penurunan.

Tabel 2. 3. Realisasi Pendapatan APBD (APBA + APBK) se- Provinsi Aceh Triwulan III 2023

REALISASI PENDAPATAN APBD III 2023

	Pendapatan Asli Daerah	69,85%
	Pendapatan Transfer	64,59%
	Lain-Lain	33,19%

Sumber: DJPb Provinsi Aceh, diolah

Pada triwulan III 2023, seluruh komponen pendapatan (Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Pendapatan lain-lain yang Sah) mengalami penurunan presentase maupun nominal realisasi. Realisasi Pendapatan Daerah tercatat mengalami penurunan dari sebelumnya sebesar 82,57% dari pagu Pendapatan pada triwulan III 2022 menjadi sebesar 64,98% dari pagu Pendapatan pada triwulan III 2023. Secara Nominal juga terdapat penurunan realisasi pendapatan sebesar Rp9,69 triliun (dengan realisasi sebesar Rp 24,30 Triliun pada triwulan III 2023) pada periode laporan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pada triwulan laporan, pendapatan transfer turun sebesar Rp9,29 triliun atau berkontraksi sebesar 31,38% *year on year* dari realisasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp29,61 triliun. Pada saat yang sama realisasi Pendapatan lain-lain yang turut mengalami kontraksi sebesar Rp0,66 triliun

atau 30,66% dibanding periode sebelumnya di tahun 2022 dengan realisasi nominal sebesar Rp0,21 triliun. Penurunan tersebut sejalan dengan turunnya realisasi PAD secara nominal sebesar Rp0,33 triliun yakni Rp3,82 triliun pada periode pelaporan.

2.3. Belanja Pemerintah Pusat

Pada triwulan III 2023, realisasi belanja APBN secara persentase maupun nominal mengalami penurunan. Sejalan dengan pendapatan APBN yang juga berkontraksi secara persentase namun naik secara nominal. Belanja APBN di Provinsi Aceh pada periode laporan secara persentase mencatatkan realisasi sebesar 78,82% dari pagu Belanja Negara 2023 (secara nominal yaitu Rp37,50 triliun), menurun dibanding triwulan III 2022 yang terealisasi sebesar 85,78% dari pagu belanjanya (Rp40,56 triliun secara nominal). Sementara realisasi pendapatan APBN hingga periode laporan tercatat secara persentase sebesar 78,88% dari pagu pendapatan APBN (secara nominal Rp5,36 triliun) atau lebih tinggi dari persentase realisasi pada triwulan III 2022 sebesar 177,20%.

Tabel 2. 4. Realisasi Belanja APBN di Aceh Pada Triwulan III 2023

REALISASI BELANJA APBN TW-III 2023		
	Belanja Pusat	72,35%
	Transfer	82,70%

Sumber: DJPb Provinsi Aceh, diolah

Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (65,58% dari total Belanja APBN di Provinsi Aceh) mengalami penurunan secara persentase maupun secara nominal. Secara persentase, pada periode laporan realisasi tercatat sebesar 82,70% dari pagu Transfer ke Daerah 2023 (secara nominal Rp24,59 triliun) atau tumbuh negatif sebesar 16,83% (yoy) dibandingkan periode yang sama di tahun lalu yang terealisasi 91,08% dari pagu Transfer ke Daerah 2022 (secara nominal Rp29,58 triliun).

Tabel 2. 5. Realisasi Pendapatan APBN di Provinsi Aceh Pada Triwulan III 2023

REALISASI PENDAPATAN APBN TW-III 2023		
	Pajak	72,80%
	PNBP	127,97%

Sumber: DJPb Provinsi Aceh, diolah

Penerimaan Pajak (82,12% dari total Pendapatan Negara di Provinsi Aceh) mengalami penurunan pada persentase namun meningkat secara nominal. Secara persentase, Penerimaan Pajak pada triwulan III 2023 berada pada 72,80% dari pagu Penerimaan Pajak 2023 (secara nominal Rp4,40 triliun), lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat realisasi sebesar 171,13% dari pagu Penerimaan Pajak 2022. Meskipun demikian realisasi penerimaan pajak berhasil terakselerasi secara nominal dibandingkan periode yang sama tahun 2022 dengan pertumbuhan 8,01% (yoy).

Tabel 2. 6. Data Realisasi APBA & APBK Provinsi Aceh Triwulan III 2023

APBA & APBK PROVINSI ACEH	Pagu Anggaran Tahunan (Rp Miliar)		Realisasi Triwulan III (Rp Miliar)		Presentase Realisasi Triwulan III (%)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
PENDAPATAN	41.167,01	37.393,70	33.992,93	24.300,27	82,57%	64,98%
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5.558,02	5.481,66	4.160,37	3.829,03	74,85%	69,85%
Transfer Pemerintah Pusat	35.431,29	31.461,03	29.616,68	20.321,56	83,59%	64,59%
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	177,70	451,01	215,88	149,68	121,49%	33,19%
BELANJA	44.763,61	38.909,31	27.432,01	23.341,69	61,28%	59,99%
Belanja Daerah	35.386,60	30.873,92	22.260,32	18.170,01	62,91%	58,85%
Transfer	9.377,01	8.035,39	5.171,69	5.171,68	55,15%	64,36%
SURPLUS/DEFISIT	-3.596,60	-1.515,61	6.560,92	958,58	-182,42%	-63,25%

Sumber: DJPb Provinsi Aceh

Tabel 2. 7. Data Realisasi APBN di Provinsi Aceh Triwulan III 2023

BELANJA NEGARA (APBN) DI PROVINSI ACEH	Pagu Anggaran Tahunan (Rp Miliar)		Realisasi Triwulan III (Rp Miliar)		Presentase Realisasi Triwulan III (%)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
PENDAPATAN	2.865,95	6.801,26	5.078,45	5.365,07	177,20%	78,88%
Pajak	2.383,62	6.051,54	4.079,01	4.405,67	171,13%	72,80%
PNBP	482,33	749,72	999,44	959,40	207,21%	127,97%
BELANJA	47.290,90	47.587,68	40.564,62	37.509,32	85,78%	78,82%
Belanja Pusat	14.812,44	17.842,12	10.984,07	12.909,48	74,15%	72,35%
Transfer ke Daerah	32.478,46	29.745,56	29.580,55	24.599,84	91,08%	82,70%
SURPLUS/DEFISIT APBN	-44.424,95	-40.786,42	-35.486,17	-32.144,25	79,88%	78,81%

Sumber: DJPb Provinsi Aceh

Urgensi Kemandirian Fiskal Provinsi Aceh dalam Menghadapi Penurunan Dana Otsus (Kontribusi ISEI Banda Aceh)

Dana Otonomi khusus merupakan sumber penerimaan penting bagi pemerintah daerah di Aceh. Dana Otonomi Khusus Aceh diterima sejak Tahun Anggaran 2008. Hingga tahun Anggaran 2022, jumlah Dana Otonomi Khusus yang telah diterima adalah sebesar Rp 95,97 T. Secara rata-rata dalam kurun waktu 2008 hingga 2022, proporsi Dana Otonomi Khusus terhadap total penerimaan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Aceh berkisar 20,2%.

Karena pemberian Dana Otonomi Khusus telah mendekati batas waktu akhir, maka sangat diperlukan pemikiran yang dapat meningkatkan kemandirian fiskal Aceh. Tujuan pemberian Dana Otonomi Khusus adalah untuk membantu Provinsi Aceh dalam membiayai program dan kegiatan pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pembedayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan sosial. Namun, berdasarkan ketentuan undang-undang, Dana Otonomi Khusus bagi Aceh hanya diberikan Pemerintah Pusat selama 20 tahun. Hal ini menjadikan Aceh akan kehilangan Dana Otonomi Khusus pada tahun 2028 (Budiratna & Qibthiyah, 2020).

Sehingga, urgensi untuk Aceh memiliki kemandirian fiskal semakin tinggi. Kemandirian fiskal dapat ditempuh melalui peningkatan kemampuan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dalam membiayai pengeluaran Pemerintah Daerah seperti kegiatan pembangunan. Terlebih, Aceh memiliki kemandirian fiskal provinsi terendah di Sumatera, dengan PAD hanya sebesar 18%.

Tabel 2.8 Kemandirian Fiskal Provinsi di Sumatera Tahun 2021

No.	Provinsi	PAD/Pendapatan daerah
1	Provinsi Sumatera Utara	45.6%
2	Provinsi Lampung	43.5%
3	Provinsi Riau	43.2%
4	Provinsi Sumatera Selatan	40.2%
5	Provinsi Jambi	39.0%
6	Provinsi Sumatera Barat	38.1%
7	Provinsi Bengkulu	32.3%
8	Provinsi Aceh	18.0%

Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan (diolah)

Kemandirian fiskal daerah merupakan salah satu aspek penting dari otonomi daerah secara keseluruhan. Pengertian otonomi fiskal daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti pajak, retribusi dan lain-lain. (Suprajitno, 2003). Sama halnya menurut (Swandewi, 2014), ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonomi mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah, yang artinya daerah otonomi harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah.

Tabel 2.9 Hasil Estimasi GMM

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.442	0.248	-5.824	0.000	-1.478	0.259	-5.711	0.000
Kemiskinan	-0.003	0.001	-2.772	0.006	-0.002	0.001	-1.464	0.144
Pertumbuhan PDRB	1.041	0.332	3.131	0.002				
PDRB per capita					0.012	0.011	1.049	0.295
Belanja Modal	0.051	0.009	5.945	0.000	0.052	0.009	5.640	0.000
Penduduk	0.018	0.006	2.890	0.004	0.003	0.006	0.493	0.623
Kabupaten/Kota	0.040	0.011	3.585	0.000	0.025	0.014	1.736	0.084
R-squared	0.264	Mean dependent var		1.612	0.478	Mean dependent var		1.417
Adjusted R-squared	0.247	S.D. dependent var		1.698	0.467	S.D. dependent var		1.202
S.E. of regression	1.148	Sum squared resid		292	1.080	Sum squared resid		286
Durbin-Watson stat	2.057	J-statistic		0.158	2.106	J-statistic		0.512
Instrument rank	7	Prob(J-statistic)		0.691	7	Prob(J-statistic)		0.474

Sumber: Penulis, diolah

Dalam menemukan strategi yang dapat meningkatkan kemandirian fiskal Aceh, dilakukan estimasi model panel dinamis menggunakan metode estimasi Generalized Method of Moments (GMM). Hasil dari estimasi tersebut ditemukan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif terhadap kemandirian fiskal di Aceh. Pengurangan kemiskinan menandakan peningkatan kemakmuran pada daerahnya. Sehingga, semakin tinggi pendapatan yang diterima masyarakat maka semakin tinggi pula kemampuan untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (PAD) untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan daerah, sehingga meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

Ditemukan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif terhadap kemandirian fiskal di Aceh, PDRB dan jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap kemandirian fiskal, serta belanja modal juga memiliki pengaruh positif terhadap kemandirian fiskal. Temuan-temuan tersebut mengindikasikan bahwa kemiskinan perlu untuk diperhatikan secara cermat dalam upaya meningkatkan PAD di Aceh. Sedangkan, jumlah penduduk secara alamiah akan terus bertambah dan memiliki dampak positif terhadap kemandirian fiskal

Selanjutnya, melalui bukti deskriptif yang menguatkan, didapati bahwa belanja modal saja tidak cukup untuk meningkatkan kemandirian fiskal. Perlu untuk memastikan mutu dari penyediaan belanja modal berpengaruh terhadap peningkatan kemandirian. Belanja modal tersebut juga perlu untuk dipastikan bahwa proyek-proyek memiliki multiplier effect yang tinggi kepada masyarakat. Serta memberikan dorongan positif bagi pertumbuhan ekonomi, hilirisasi ekonomi, serta memiliki efek terhadap penurunan angka kemiskinan di Aceh. Seluruh hal ini perlu untuk diupayakan oleh Kementerian/Lembaga dalam usaha untuk kemajuan dan kemandirian Aceh.

--000--



BAB III

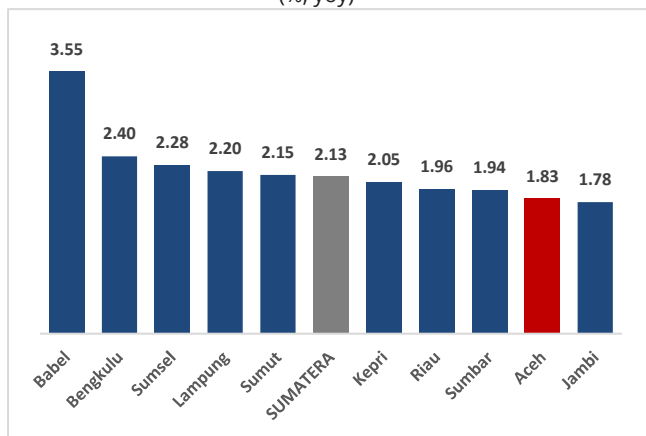
PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH

Pada triwulan III 2023, laju Inflasi Gabungan Kota IHK di Provinsi Aceh mengalami perlambatan dibandingkan dengan periode sebelumnya, seiring dengan deflasi pada beberapa komoditas pangan dan upaya pengendalian inflasi yang gencar dilakukan di Provinsi Aceh. Kendati demikian, perlu adanya kebijakan lebih lanjut dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Aceh untuk terus menjaga harga komoditas utama di wilayah Provinsi Aceh.

3.1. Perkembangan Umum Inflasi

Inflasi Gabungan 3 Kota IHK di Provinsi Aceh pada triwulan III 2023 tercatat sebesar 1,83% (yoy) atau lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 2,70% (yoy). Angka inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi Sumatera (2,13%, yoy) dan Nasional (2,28%, yoy). Jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Sumatera, Provinsi Aceh mencatatkan inflasi terendah kedua di Sumatera.

Grafik 3.1. Laju Inflasi Provinsi di Sumatera Triwulan III 2023 (% , yoy)



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

3.2. Analisis Perkembangan Inflasi

Tabel 3.1. Inflasi Kelompok Barang

Kelompok Barang dan Jasa	Tw II 2023		Tw III 2023	
	Inflasi (% yoy)	Andil (% yoy)	Inflasi (% yoy)	Andil (% yoy)
Makanan, Minuman, dan Tembakau	0,94	0,30	3,41	1,06
Pakaian dan Alas Kaki	1,79	0,13	2,60	0,19
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	1,88	0,34	0,21	0,04
Perlengkapan, Peralatan, & Pemeliharaan Rutin RT	1,57	0,07	0,73	0,03
Kesehatan	3,79	0,08	3,74	0,08
Transportasi	10,12	1,22	-0,16	-0,02
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0,11	0,00	0,14	0,01
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	5,28	0,07	4,19	0,05
Pendidikan	0,16	0,00	0,32	0,01
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	3,22	0,28	2,23	0,19
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	2,95	0,20	2,88	0,19
Inflasi Umum	2,70		1,83	

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Pada triwulan III 2023, laju inflasi Aceh lebih rendah dibandingkan dengan periode sebelumnya. Inflasi pada triwulan III 2023 utamanya didorong oleh kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil 1,06% dan tekanan inflasi 3,41% (yoy). Selanjutnya, diikuti oleh kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya dengan andil 0,19% dan tingkat inflasi 2,88% (yoy).

Kel. Makanan, Minuman, dan Tembakau

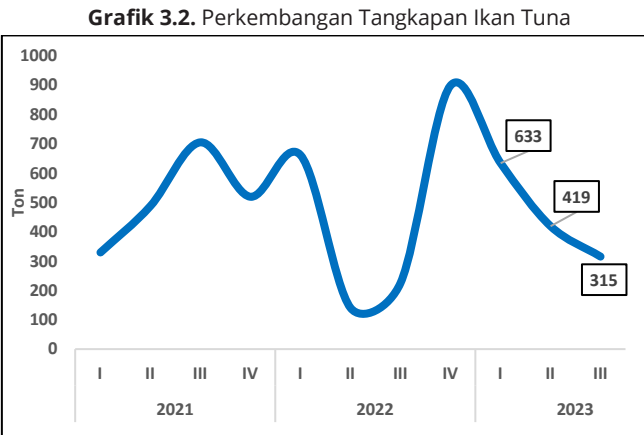
Tabel 3.2. Inflasi Kel, Makanan, Minuman, dan Tembakau

INFLASI 3,41% (yoy)		ANDIL 1,06%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Beras	0,52	Cabai Merah	-0,44
Rokok Kretek Filter	0,32	Bawang Merah	-0,10
Daging Ayam Ras	0,10	Jeruk	-0,07
Ikan Tuna	0,07	Semangka	-0,04
Minyak Goreng	0,06	Ikan Dencis	-0,03

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Secara tahunan, kelompok makanan, minuman, dan tembakau pada periode laporan mengalami inflasi sebesar 3,41% (yoy) dengan andil 1,06%, lebih tinggi dibanding periode sebelumnya (0,30%). Inflasi yang terjadi didorong oleh subkelompok rokok dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 9,00% (yoy). Komoditas utama yang menyumbang inflasi pada kelompok ini antara lain beras, rokok kretek filter, daging ayam ras, ikan tuna, dan minyak goreng. Harga beras yang cukup tinggi pada triwulan III 2023 menjadi penyumbang andil inflasi terbesar dari kelompok ini. Kenaikan ini didorong oleh terbatasnya pasokan dan terlambatnya musim panen gadu akibat El Nino serta peningkatan permintaan beras dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, juga turut mendorong permintaan daging ayam ras dan minyak goreng yang berdampak pada cukup besarnya andil inflasi dari kedua komoditas tersebut. Rokok kretek filter masih memiliki andil inflasi yang tinggi sebagai

dampak dari kenaikan cukai rokok sebesar 10% di tahun 2023. Sementara itu, Ikan tuna turut memberikan andil inflasi sejalan dengan turunnya tangkapan ikan tuna sepanjang tahun 2023. Pada Grafik 3.2, terlihat bahwasanya tangkapan ikan tuna pada triwulan III 2023 hanya sebesar 315 ton, turun dari triwulan II 2023 sebesar 419 ton dan triwulan I 2023 sebesar 633 ton.



Sumber: DKP Aceh, diolah

Di sisi lain, komoditas deflasi disumbang oleh cabai merah, bawang merah, jeruk, semangka, dan ikan dencis. Meningkatnya pasokan setelah panen raya mendorong turunnya harga cabai merah dan cabai merah dan bawang merah. Selain itu, upaya Pemerintah Provinsi dan Kota/Kabupaten di Aceh dalam mendorong kerjasama perdagangan komoditas strategis antar daerah, baik intra provinsi maupun antra provinsi, juga berkontribusi dalam perbaikan laju inflasi pada komoditas tersebut.

Sementara itu, terjadi anomali/ketidaksesuaian antara harga *Crude Palm Oil* (CPO) dunia atau minyak kelapa sawit dengan harga minyak domestik. Harga minyak kelapa sawit mengalami penurunan di tengah naiknya harga minyak goreng domestik. Pada Grafik 3.3 ditampilkan rata-rata harga minyak kelapa sawit secara triwulanan. Pada triwulan III 2023, harga minyak kelapa sawit berada pada level USD 821,84/*metric ton*, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang ada pada level USD 851,97/*metric ton*, serta lebih rendah dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya yang berada pada level USD 885,94/*metric ton*. Harga minyak goreng dalam negeri berusaha ditekan oleh Pemerintah dengan

penyempurnaan kebijakan *Domestic Market Obligation* (DMO) dan *Domestic Price Obligation* (DPO), serta penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp 14.000 per liter melalui Program Minyak Goreng Curah untuk Rakyat (MGCR).



Sumber: Bloomberg, diolah

Kel. Pakaian dan Alas Kaki

Tabel 3.3. Inflasi Kel, Pakaian dan Alas Kaki

INFLASI 2,60% (yoy)		ANDIL 0,19%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Seragam Sekolah Anak	0,03	-	-
Sepatu Anak	0,03	-	-
Celana Panjang Jeans Pria	0,02	-	-
T-Shirt Anak	0,02	-	-
Baju Muslim Anak	0,02	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Pada triwulan III 2023, inflasi kelompok pakaian dan alas kaki tercatat sebesar 2,60% (yoy) dengan andil 0,19%, lebih tinggi dibanding periode sebelumnya (0,13%). Tekanan inflasi yang terjadi tersebut utamanya didorong oleh sub kelompok pakaian yang mengalami inflasi sebesar 2,30% (yoy) dan subkelompok alas kaki yang mengalami inflasi sebesar 4,14% (yoy).

Komoditas penyumbang inflasi pada sub kelompok ini antara lain seragam sekolah anak, sepatu anak, celana panjang jeans pria, *T-shirt* anak dan baju muslim anak. Peningkatan harga produk pakaian tersebut terjadi seiring dengan meningkatnya permintaan atribut sekolah memasuki tahun ajaran baru.

Kel. Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga

Tabel 3.4. Inflasi Kel. Perum., Air, Listrik, Gas, & Bahan Bakar

INFLASI 0,21% (yoy)		ANDIL 0,04%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Sewa Rumah	0,03	-	-
Tukang Bukan Mandor	0,02	-	-
Kontrak Rumah	0,02	-	-
Cat Tembok	0,01	-	-
Pasir	0,01	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Secara tahunan, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mengalami inflasi sebesar 0,21% (yoy) dengan andil 0,04%, lebih rendah dibanding periode sebelumnya (0,34%). Inflasi pada kelompok ini didorong oleh subkelompok pemeliharaan, perbaikan, dan keamanan tempat tinggal/perumahan yang mengalami inflasi sebesar 1,30% (yoy). Secara detail, barang/jasa pemberi andil inflasi terbesar pada kelompok ini adalah sewa rumah, tukang bukan mandor, kontrak rumah, cat tembok, dan pasir.

Sewa rumah menjadi penyumbang andil tertinggi dikarenakan peningkatan tarif sewa rumah seiring kembali normalnya mobilitas dan pertemuan tatap muka pasca pandemi dan masuknya tahun ajaran baru bagi mahasiswa.

Kel. Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga

Tabel 3.5. Inflasi Kel. Perlengkapan & Peralatan RT

INFLASI 0,73% (yoy)		ANDIL 0,03%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Panci	0,01	-	-
Lemari Pakaian	0,01	-	-
Piring	0,01	-	-
Pembersih Lantai	0,01	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Pada triwulan III 2023, inflasi kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rumah tangga tercatat sebesar 0,73% (yoy)

dengan andil 0,03%, lebih rendah dibanding periode sebelumnya (0,07%). Inflasi pada kelompok ini didorong oleh subkelompok barang pecah belah dan peralatan makan minum dengan inflasi sebesar 6,86% (yoy). Secara lebih detail, komoditas penyumbang inflasi terbesar pada kelompok ini adalah panci, lemari pakaian, piring, dan pembersih lantai.

Kel. Kesehatan

Tabel 3.6. Inflasi Kel. Kesehatan

INFLASI 3,74% (yoy)		ANDIL 0,08%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Obat Dengan Resep	0,05	-	-
Obat Gosok	0,01	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Secara tahunan, kelompok kesehatan mengalami inflasi sebesar 3,74% (yoy) dengan andil 0,08%, sama dengan periode sebelumnya (0,08%). Tekanan inflasi pada triwulan laporan disebabkan oleh subkelompok obat-obatan dan produk kesehatan yang mengalami inflasi sebesar 7,20% (yoy). Secara lebih detail, komoditas penyumbang inflasi terbesar kelompok ini adalah obat dengan resep dengan andil 0,05% dan obat gosok dengan andil 0,01%.

Kel. Transportasi

Tabel 3.7. Inflasi Kel. Transportasi

INFLASI -0,16% (yoy)		ANDIL -0,02%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
-	-	Angkutan Udara	-0,20

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Pada triwulan III 2023, inflasi kelompok transportasi tercatat sebesar -0,16% (yoy) dengan andil -0,02%, lebih rendah dibanding periode sebelumnya (1,22%). Deflasi pada kelompok ini didorong oleh subkelompok jasa angkutan penumpang dengan deflasi sebesar 8,19% (yoy). Deflasi yang terjadi pada periode ini didorong oleh komoditas angkutan udara dengan andil -0,20%. Penurunan harga angkutan udara ini sejalan penurunan harga avtur dari Rp 18.130 per liter pada September 2022 menjadi Rp 16.672 per

liter pada September 2023 atau turun sebesar -8,04% (yoy).

Kel. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan

Tabel 3.8. Inflasi Kel. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan

INFLASI 0,14% (yoy)		ANDIL 0,01%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Biaya Ponsel	0,01	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Secara tahunan, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami inflasi sebesar 0,14% (yoy) dengan andil 0,01%, lebih tinggi dibanding periode sebelumnya (0,00%).

Tekanan inflasi yang ini disebabkan oleh subkelompok layanan informasi dan komunikasi dengan inflasi sebesar 0,20% (yoy). Komoditas yang mengalami inflasi ini berasal dari biaya pulsa ponsel dengan andil 0,01%.

Kel. Rekreasi, Olahraga, dan Budaya

Tabel 3.9. Inflasi Kel. Rekreasi, Olahraga, dan Budaya

INFLASI 4,19% (yoy)		ANDIL 0,05%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Buku Tulis Bergaris	0,02	-	-
Rekreasi	0,02	-	-
Pulpen/Bolpoint	0,01	-	-
Tas Sekolah	0,01	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Pada triwulan III 2023, inflasi kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya tercatat sebesar 4,19% (yoy) dengan andil 0,05%, lebih rendah dibanding periode sebelumnya (0,07%). Inflasi yang terjadi pada kelompok ini disebabkan oleh subkelompok layanan rekreasi dengan inflasi sebesar 7,06% (yoy). Komoditas yang mengalami kenaikan harga yaitu buku tulis bergaris dan rekreasi dengan andil inflasi 0,02% (yoy) serta pulpen dan tas sekolah dengan andil inflasi masing-masing 0,01% (yoy). Kenaikan harga ini

disebabkan oleh masa libur sekolah yang mendorong komoditas rekreasi, serta persiapan tahun ajaran baru yang mendorong inflasi alat tulis.

Kel. Pendidikan

Tabel 3.10. Inflasi Kel. Pendidikan

INFLASI 0,32% (yoy)		ANDIL 0,01%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Sekolah Dasar	0,01	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Secara tahunan, kelompok pendidikan mengalami inflasi sebesar 0,32% (yoy) dengan andil 0,01%, lebih tinggi dibanding periode sebelumnya (0,00%).

Inflasi utamanya terjadi pada subkelompok pendidikan dasar dan anak usia dini yang mengalami inflasi sebesar 1,24% (yoy). Kenaikan harga terjadi pada sekolah dasar dengan andil sebesar 0,01%.

Secara umum, kenaikan biaya pendidikan terjadi setiap tahunnya. Kenaikan rata-rata biaya pendidikan di Indonesia sebesar 10%-15% per tahun untuk keperluan operasional, pengembangan, dan lain-lain.

Kel. Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran

Tabel 3.11. Inflasi Kel. Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran

INFLASI 2,23% (yoy)		ANDIL 0,19%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Nasi Dengan Lauk	0,06	-	-
Mie	0,03	-	-
Ayam Bakar	0,01	-	-
Hamburger	0,01	-	-
Ikan Bakar	0,01	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Pada triwulan III 2023, inflasi kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran tercatat sebesar 2,23% (yoy) dengan andil 0,19%, lebih rendah dibanding periode sebelumnya (0,28%). Inflasi tertinggi terjadi pada

subkelompok jasa pelayanan makanan dan minuman yang mengalami inflasi sebesar 2,23% (yoy). Kenaikan terjadi pada komoditas nasi dengan lauk, mie, ayam bakar, hamburger, dan ikan bakar. Peningkatan harga pada produk makanan olahan tersebut sejalan dengan peningkatan inflasi kelompok bahan makanan.

Kel. Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya

Tabel 3.12. Inflasi Kel. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya

INFLASI 2,88% (yoy)		ANDIL 0,19%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Emas Perhiasan	0,17	-	-
Tarif Gunting Rambut Pria	0,02	-	-
Pembalut Wanita	0,01	-	-
Pasta Gigi	0,01	-	-
Hand Body Lotion	0,01	-	-

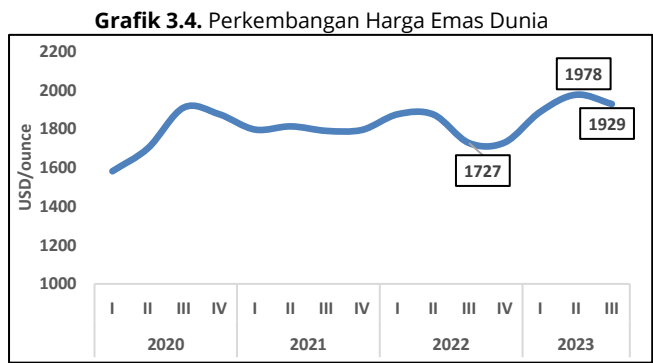
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Secara tahunan, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi sebesar 2,88% (yoy) dengan andil 0,19%, lebih rendah dibanding periode sebelumnya (0,20%). Inflasi utamanya terjadi pada subkelompok perawatan pribadi lainnya dengan inflasi sebesar 6,25% (yoy).

Komoditas yang menyebabkan inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan dengan andil 0,17% dan tarif gunting rambut pria dengan andil 0,02%. Sementara itu, pembalut wanita, pasta gigi, dan *hand body lotion* mengalami inflasi dengan andil masing-masing 0,01%. Kenaikan harga emas perhiasan disebabkan oleh pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat pada triwulan III 2023 serta meningkatnya ketidakpastian global dan ketidakstabilan geopolitik di berbagai wilayah.

Harga emas dunia pada triwulan III 2023 menunjukkan penurunan dibanding triwulan II 2023. Namun, apabila dibandingkan dengan triwulan III 2022, harga emas dunia saat ini melambung cukup tinggi. Data *Bloomberg* memperlihatkan rata-rata harga emas dunia (Grafik 3.4) pada triwulan III 2023 berada pada level USD1.929/ounce. Harga tersebut lebih rendah

dibandingkan periode sebelumnya sebesar USD1.978/ounce, walaupun masih lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2022 sebesar USD1.727/ounce.



Sumber: Bloomberg, diolah

3.3. Tracking Inflasi Triwulan IV 2023

Pada bulan Oktober 2023, Gabungan Kota IHK di Provinsi Aceh mengalami deflasi sebesar 0,14% (mtm), sedangkan secara tahunan mengalami inflasi 1,95% (yoy). Angka inflasi Aceh pada bulan laporan (-0,14%, mtm) tercatat mengalami deselerasi setelah pada bulan sebelumnya tercatat lebih tinggi (0,22%, mtm). Secara tahunan, inflasi pada Oktober 2023 tercatat sebesar 1,95% (yoy), lebih rendah dibandingkan Oktober 2022 yang berada pada angka 6,64% (yoy). Secara *year-to-date*, inflasi Gabungan 3 Kota IHK di Provinsi Aceh pada Oktober 2023 berada pada laju 1,14% (ytd). Secara bulanan, faktor pendorong utama deflasi di Aceh adalah cabai merah (-0,14%), ikan kembung (-0,05%), ikan dencis (-0,04%), udang basah (-0,03%), angkutan udara (-0,03%), cabai hijau (-0,03%), kentang (-0,02%), serta ikan bandeng, pir, dan semangka masing-masing sebesar -0,01%.

Pada bulan November 2023, secara bulanan kota gabungan IHK di Provinsi Aceh diperkirakan akan mengalami inflasi. Hal ini diindikasikan dari hasil pantauan Survei Pemantauan Harga (SPH) yang menunjukkan kenaikan harga untuk beberapa komoditas, seperti komoditas cabai merah, cabai rawit, beras dan emas perhiasan.

Pada triwulan IV 2023, laju inflasi Gabungan Kota IHK di Provinsi Aceh diperkirakan akan

meningkat dibandingkan periode sebelumnya.

Walaupun meningkat, capaian inflasi pada periode tersebut masih berada di sekitar batas bawah sasaran inflasi $3\pm 1\%$ (yoy). Hal ini sejalan dengan inflasi pada beberapa komoditas pangan. Kendati demikian, perlu adanya kebijakan lebih lanjut dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Aceh untuk mengatasi kenaikan harga komoditas pangan akibat pergeseran musim panen sebagai dampak dari El Nino yang terjadi di sebagian besar wilayah di Provinsi Aceh.

3.4. Inflasi Spasial

Secara spasial, inflasi pada Oktober 2023 terjadi di seluruh kota pantauan di Provinsi Aceh.

Secara tahunan, Lhokseumawe menjadi kota yang mengalami inflasi paling tinggi, yakni 2,40% (yoy), diikuti Kota Meulaboh (2,24%, yoy) dan Kota Banda Aceh (1,65%, yoy). Sementara secara bulanan, terdapat dua kota yang mengalami deflasi sementara satu kota lainnya mengalami inflasi. Kota Banda Aceh mengalami deflasi sebesar 0,25% (mtm) diikuti oleh Kota Lhokseumawe dengan laju deflasi sebesar 0,11% (mtm). Sedangkan Kota Meulaboh mengalami inflasi sebesar 0,30% (mtm).

Komoditas utama penyumbang deflasi bulanan di Kota Banda Aceh adalah cabai merah (-0,13%), ikan dencis (-0,08%), ikan kembung (-0,08%), angkutan udara (-0,05%), ikan tongkol (-0,04%), kentang (-0,03%), cabai hijau (-0,02%), udang basah (-0,02%), semangka (-0,02%), dan daging ayam ras (-0,01%). Sementara itu, komoditas yang menahan laju deflasi adalah beras (0,08%), bensin (0,05%), ikan tuna (0,03%), emas perhiasan (0,02%), rokok kretek filter (0,02%), jeruk nipis (0,01%), kontrak rumah (0,01%), ikan mujair (0,01%), dan cumi-cumi (0,01%).

Selanjutnya, komoditas utama penyumbang deflasi bulanan di Kota Lhokseumawe adalah cabai merah (-0,16%), udang basah (-0,05%), jeruk nipis (-0,04%), cabai hijau (-0,04%), pir (-0,03%), ikan dencis (-0,03%), ikan bandeng (-0,02%), besi beton (-0,02%), kentang (-0,02%), dan udang asin (-0,02%). Sementara itu, komoditas yang menahan laju deflasi adalah beras (0,13%), bensin (0,04%), ikan

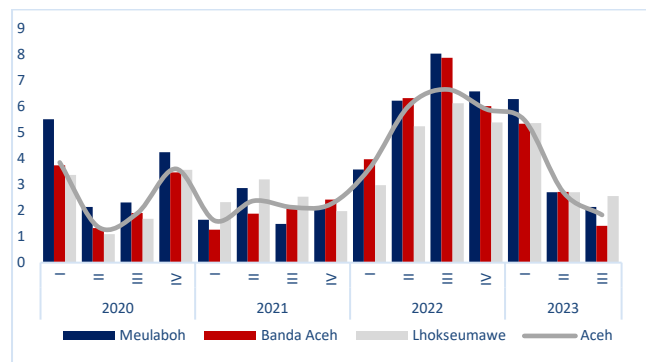
tongkol (0,03%), daging ayam ras (0,03%), pisang (0,03%), ayam hidup (0,03%), ikan biji Nangka (0,03%), bawang merah, (0,02%), sepatu anak (0,02%), dan semen (0,02%).

Disisi lain, komoditas utama penyumbang inflasi bulanan di Kota Meulaboh adalah beras (0,12%), kangkong (0,09%), ikan dencis (0,07%), ikan tongkol (0,07%), ikan kakap merah (0,04%), rokok kretek filter (0,04%), bensin (0,03%), ayam hidup (0,03%), emas perhiasan (0,02%), dan pisang (0,02%). Sementara itu, komoditas yang menahan laju inflasi cabai merah (-0,11%), ikan kembung (-0,06%), telur ayam ras (-0,03%), bawang merah (-0,02%), udang basah (-0,02%), kentang (-0,01%), ikan cakalang (-0,01%), sepatu pria (-0,01%), jeruk nipis (-0,01%), dan ikan bandeng (-0,01%).

Inflasi Aceh pada triwulan IV 2023 diperkirakan sedikit meningkat dibandingkan periode sebelumnya.

Hal tersebut dipengaruhi oleh peningkatan harga beberapa komoditas pangan yang disebabkan pergeseran musim panen akibat dari El Nino. Selain itu, inflasi pada triwulan IV 2023 diperkirakan akan lebih tinggi jika dibanding dengan triwulan III 2023 akibat meningkatnya permintaan komoditas pangan dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad yang berlangsung selama 3 bulan di Aceh. Untuk itu, kolaborasi dan sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Aceh perlu untuk ditingkatkan guna menjaga capaian inflasi tetap berada pada sasaran inflasi nasional $3\pm 1\%$ (yoy).

Grafik 3.5. Pergerakan Inflasi Kota Pantauan di Aceh (% , yoy)



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

3.5. Aktivitas Tim

Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Aceh

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Aceh akan terus berupaya melakukan pengendalian harga, melalui forum koordinasi dan langkah tindak lanjut dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Pada awal tahun 2023 telah dilakukan koordinasi pengendalian inflasi yang membahas program kerja serta anggaran TPID Provinsi Aceh sepanjang tahun 2023. Dalam kegiatan tersebut, telah disepakati beberapa program kerja yang akan menjadi fokus pengendalian inflasi sepanjang tahun 2023 untuk menjaga inflasi berada pada rentang target nasional $3\pm 1\%$.

Dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga, berbagai kegiatan telah dilaksanakan oleh TPID Provinsi Aceh triwulan III, meliputi:

1. Rapat Koordinasi wilayah dan Kunjungan dari Mendagri ke TPID Provinsi dan TPID Kab/Kota tanggal 25 Juli 2023.
2. Pasar Tani di Halaman Distanbun Provinsi Aceh tanggal 9 Agustus 2023.
3. Business Matching Pembiayaan CSR untuk mendorong ketahanan pangan pada tanggal 21 Agustus 2023.
4. Pemberian bantuan pompa air ke Kecamatan Samatiga, Aceh Barat untuk memastikan ketersediaan pasokan padi tanggal 22 Agustus 2023.
5. Event GNPIP di tanggal 21-22 Agustus dan disiarkan di media massa sebagai upaya peningkatan *awareness* masyarakat terhadap upaya Pemerintah dalam pengendalian inflasi di daerah.
6. Penjajakan Kerjasama Antar Daerah (KAD) komoditas cabai merah antara pedagang besar di pasar lambaro dengan penyuplai di Daerah Simalungun, Sumatera Utara pada tanggal 23 Agustus 2023.
7. Nonton Bareng kegiatan Rakornas TPID di KPwBI Provinsi Aceh pada 31 Agustus 2023.

8. *High Level Meeting* TPID Banda Aceh pada tanggal 27 September 2023.

Lebih lanjut, untuk menekan laju inflasi dalam jangka menengah, maka telah disusun Roadmap (peta jalan) Pengendalian Inflasi Daerah Aceh tahun 2022-2024 dengan strategi 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif dengan rincian program sebagai berikut:

1. Keterjangkauan Harga
 - Pemantauan dan pencatatan harga bahan pangan pokok (sembako dan komoditas ikan).
 - Optimalisasi program ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga (KPSH) untuk komoditas Beras.
 - Pelaksanaan pasar murah (Menjelang HBKN).
 - Pelaksanaan Sidak Pasar.
 - Menetapkan harga eceran tertinggi pada komoditas bahan pangan melalui penyusunan Qanun (Perda).
2. Ketersediaan Pasokan
 - Peningkatan produksi hortikultura penyumbang inflasi (bawang merah, cabai merah, dan cabai rawit).
 - Peningkatan produksi peternakan penyumbang inflasi (daging sapi, daging ayam, dan telur ayam).
 - Peningkatan produksi/tangkapan/budidaya komoditas perikanan penyumbang inflasi.
 - Pembangunan dan optimalisasi sarana produksi dan infrastruktur pertanian seperti pembangunan jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi, dan kanal pengendalian banjir (Aceh Tamiang).
 - *Learning Center* untuk peningkatan produksi komoditas hortikultura, peternakan, dan perikanan (UPTD).
 - Korporatisasi klaster komoditas pangan.
 - Pengaturan jadwal tanam komoditas pangan.
 - Koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk kuota impor komoditas bawang putih dan gula.

3. Kelancaran Distribusi

- Inisiasi KAD di setiap kab/kota baik intra provinsi maupun antar provinsi.
- Peningkatan transaksi KAD.
- Fasilitas Distribusi Pangan oleh Pasar Mitra Tani (PMT)/Toko Tani Indonesia Center (TTIC) dan Toko Mitra Tani (TMT)/Toko Tani Indonesia (TTI).
- Simulasi pengendalian inflasi di daerah.
- Pelaksanaan pasar lelang (komoditas lokal dan ekspor).
- Peningkatan dan pengembangan infrastruktur konektivitas antar wilayah guna mendukung kelancaran pergerakan logistik bahan pangan, antara lain: pemanfaatan tol laut.
- Penguatan implementasi digitalisasi UMKM pangan sisi hilir melalui: fasilitasi kerja sama UMKM pangan binaan dengan *e-commerce*
- Optimalisasi pemanfaatan *Cold Storage* untuk komoditas perikanan.

4. Komunikasi Efektif

- Penyediaan sistem informasi panel harga dan monitoring stok pangan strategis yang terintegrasi di tingkat provinsi dan kab/kota
- Peningkatan kualitas dan kuantitas laporan TPID baik Provinsi dan Kab/Kota.
- Penyusunan peta jalan pengendalian inflasi Kab/Kota.
- Pelaksanaan *High Level Meeting* TPID.
- Pelaksanaan *Capacity Building* TPID.
- Rilis pers/media terkait perkembangan harga dan ketersediaan pasokan.

Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Aceh 2023

GNPIP Aceh 2023 kembali diselenggarakan oleh KPwBI Provinsi Aceh dengan mengangkat tema “Sinergi Mendorong Produksi, Hilirisasi, dan Ketahanan Pangan dengan Digitalisasi Ekonomi”. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Kota Meulaboh pada 21-22 Agustus 2023 dengan rangkaian kegiatan *Business Matching* Pembiayaan CSR, Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi, Seremonial GNPIP 2023, serta Gerakan Tanam (Gertam) Padi Bersama.



Gerakan Tanam Bersama Padi di GNPIP Aceh 2023

Pelaksanaan kegiatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) merupakan salah satu wujud konsistensi, inovasi, dan sinergi Bank Indonesia serta Dinas terkait dalam upaya menjaga ketersediaan pasokan dan kestabilan harga komoditas pangan. Untuk mendorong pelaksanaan kegiatan ini, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Aceh berkolaborasi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Lhokseumawe serta Dinas terkait baik di level provinsi maupun kabupaten/kota. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat memperkuat upaya pengendalian inflasi pangan, melalui implementasi teknologi budidaya pertanian, bantuan alsintan dan saprodi pertanian, inovasi *digital farming*, serta perluasan kerja sama antar daerah (KAD). Selain itu, kegiatan tersebut juga merupakan bagian dari strategi komunikasi efektif kepada masyarakat serta bentuk apresiasi kepada pihak-pihak yang berkontribusi positif dalam pengendalian inflasi pangan.

GNPIP Aceh 2023 diselenggarakan di Kota Meulaboh pada 21-22 Agustus 2023 dengan mengangkat tema “Sinergi Mendorong Produksi, Hilirisasi, dan Ketahanan Pangan dengan Digitalisasi Ekonomi”. Rangkaian kegiatan dimulai dengan *Business Matching* Pembiayaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk Mendukung Ketahanan Pangan. Pada kegiatan yang dilakukan pada 21 Agustus 2023 tersebut, KPwBI Provinsi Aceh berkolaborasi dengan Biro Perekonomian Provinsi Aceh selaku sekretariat TPID dan BAPPEDA Aceh selaku pengurus CSR. Dalam kegiatan tersebut dihadirkan 19 UMKM/Poktan yang merupakan binaan 4 Dinas yang berkaitan dengan ketahanan pangan, yaitu Distanbun, DPMG, DiskopUKM, dan Disperindag yang membutuhkan pendanaan. Selain itu, dihadirkan pula 10 perusahaan yang terdiri dari BUMN, BUMD, hingga swasta yaitu PT

Pegadaian, PELINDO, PLN, Bara Energi Lestari, PT PEMA, PT Dunia Barusa, BSI, PGE, PT MIFA, hingga Bank Aceh Syariah, sebagai pihak yang hendak menyalurkan dana CSR. Dari kegiatan tersebut dihasilkan 11 MoU yang menyatakan ketertarikan antara penyalur (Perusahaan) dengan penerima manfaat CSR (UMKM/Poktan).



Rapat Koordinasi TPID Provinsi Aceh



Business Matching Pembiayaan CSR

Selanjutnya di tanggal yang sama, dilakukan kegiatan Rapat Koordinasi yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Aceh yang diwakili oleh Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Bapak Mawardi. Kegiatan diawali dengan pemaparan kondisi terkini inflasi oleh Kepala KPwBI Provinsi Aceh, Bapak Rony Widiarto P. Selanjutnya dilakukan diskusi serta tanya jawab dua arah antar peserta yang membahas terkait potensi risiko inflasi. Rapat tersebut menghasilkan beberapa kesimpulan terkait upaya pengendalian inflasi diantaranya pengfokusan Pelaksanaan Operasi Pasar (OP) dan Pasar Murah pada lokasi pasar tradisional, utamanya pasar sampel BPS, peningkatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) *Business to Business* untuk komoditas yang mempunyai andil inflasi tinggi, serta pemberian subsidi angkut untuk komoditas dengan andil inflasi tinggi.



Sambutan Kepala KPwBI Aceh



Penandatanganan KAD

Pada 22 Agustus 2023, dilaksanakan kegiatan puncak GNPIP Aceh 2023 di Desa Paya Lumpat, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Bupati Aceh Tengah dan Bupati Aceh Tamiang, pimpinan SKPA, KPwBI Lhokseumawe, serta turut disaksikan oleh UMKM/poktan binaan Dinas yang telah mengikuti *Business Matching* pada hari sebelumnya. Kegiatan ini diawali dengan sambutan dari SEKDA Kabupaten Aceh Barat selaku tuan rumah, Kepala KPwBI Provinsi Aceh, serta SEKDA Provinsi Aceh yang diwakili ASDA Provinsi Aceh bidang Perekonomian dan Pembangunan. Kegiatan selanjutnya adalah pemberian apresiasi bagi para pejuang inflasi yang terdiri dari 9 apresiasi yaitu, Inovasi *Digital Farming*, *Urban Farming*, Pupuk Organik, Penyerahan Bantuan Alsintan dan Saprodi, Produk Pangan Olahan Hasil Hilirisasi Agribisnis, Pasar Tani, Subsidi Angkut, Kerjasama antar Daerah, dan *Business Matching* Ketahanan Pangan. Rangkaian kegiatan GNPIP Aceh 2023 ditutup dengan Gerakan Tanam (Gertam) Padi Bersama di lahan milik warga yang menunjukkan semangat TPID untuk terus berkolaborasi dan

bersinergi menyokong ketahanan pangan di Provinsi Aceh.

Melalui GNPIP Aceh 2023, diharapkan dapat meningkatkan dukungan pemerintah daerah untuk optimalisasi Belanja Tidak Terduga (BTT), mendorong GerTam (Gerakan Tanam) untuk meningkatkan produksi pertanian, peningkatan inovasi dan kreatifitasnya dalam mendorong *Digital Farming* atau *Smart Farming* di Aceh, meningkatkan Kerjasama Antar Daerah (KAD) yang didorong dengan subsidi ongkos angkut, serta melanjutkan fokus operasi pasar dan pasar murah pada pasar tradisional yang menjadi sampel BPS.

--000--



BAB IV

PEMBIAYAAN DAERAH SERTA PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN & UMKM

Stabilitas Sistem Keuangan Provinsi Aceh pada triwulan III 2023 tetap terjaga. Hal ini tercermin dengan peningkatan pembiayaan berdasarkan lokasi bank maupun lokasi proyek. Berdasarkan lokasi bank, penyaluran pembiayaan mengalami peningkatan sebesar 12,01% (yoy). Sementara penyaluran pembiayaan berdasarkan lokasi proyek meningkat sebesar 2,91% (yoy). Sementara itu, jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami penurunan sebesar 0,41% (yoy). Pembiayaan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berdasarkan lokasi bank adalah 94,02%. FDR berdasarkan berdasarkan lokasi proyek adalah sebesar 126,02%.

4.1. Kinerja Perbankan

Stabilitas Sistem Keuangan menunjukkan kondisi yang terjaga. Aktivitas perbankan di Aceh pada triwulan III 2023 terpantau mengalami perbaikan.

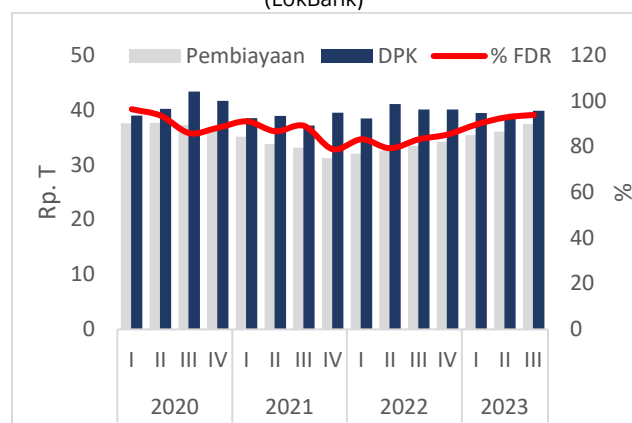
Berdasarkan lokasi bank, penyaluran pembiayaan mengalami peningkatan sebesar 12,01% (yoy). Sementara penyaluran pembiayaan berdasarkan lokasi proyek meningkat sebesar 2,91% (yoy). Sementara itu, jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami penurunan sebesar 0,41% (yoy).

Perbaikan kinerja sektor perbankan didorong oleh kembali normalnya aktivitas masyarakat pasca pandemi COVID-19. Pertumbuhan ekonomi yang terjaga membuat roda perekonomian berjalan dengan baik. Meskipun demikian, ketidakpastian global harus tetap diwaspadai. Kondisi geopolitik dunia yang masih belum stabil berpotensi memberikan dampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap sektor keuangan.

Beberapa indikator utama seperti penyaluran pembiayaan, Dana Pihak Ketiga (DPK), serta rasio jumlah pembiayaan yang disalurkan terhadap jumlah dana yang dihimpun atau *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terus dipantau untuk melihat bagaimana kondisi sektor keuangan. Indikator-indikator tersebut dapat menunjukkan bagaimana perbankan mampu menjalankan perannya sebagai lembaga intermediasi.

Berdasarkan lokasi bank, penyaluran pembiayaan di Aceh pada triwulan III 2023 tercatat sebesar Rp37,48 Triliun, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp33,45 Triliun atau naik sebesar Rp4,05 Triliun. Peningkatan penyaluran pembiayaan mendorong peningkatan FDR di triwulan laporan menjadi sebesar 94,02%, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 92,90%.

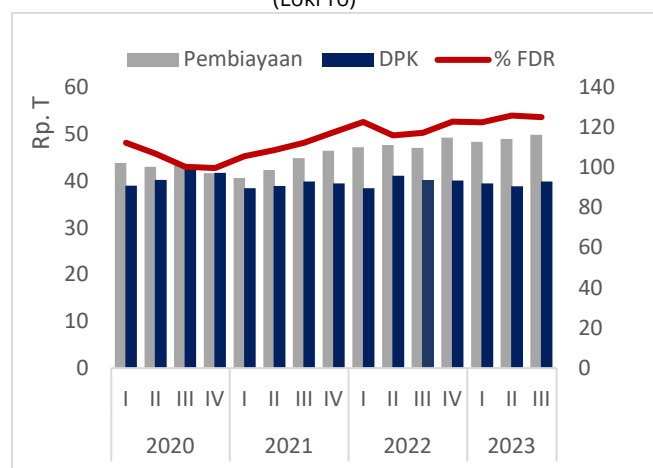
Grafik 4. 1 Perkembangan Intermediasi Perbankan Aceh (LokBank)



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Sementara itu, berdasarkan lokasi proyek, penyaluran pembiayaan di Aceh pada triwulan III 2023 tercatat sebesar Rp49,88 Triliun, meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp47,09 Triliun naik sebesar Rp2,78 T. Kemudian, FDR di triwulan laporan adalah sebesar 125,15%. Nilai FDR triwulan II 2023 sebesar 125,02 sehingga dapat dikatakan nilai FDR triwulan III memiliki angka yang lebih kecil. Penyebabnya adalah nilai DPK pada triwulan III lebih tinggi daripada triwulan II. Sehingga meskipun penyaluran pembiayaan meningkat, namun terkoreksi dengan nilai DPK yang juga meningkat dari triwulan sebelumnya.

Grafik 4. 2 Perkembangan Intermediasi Perbankan Aceh (LokPro)



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Pada triwulan III 2023, DPK di Aceh tercatat sebesar Rp39,86 Triliun, atau lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp38,86 Triliun. Terjadi kenaikan sebesar Rp1 T dibandingkan

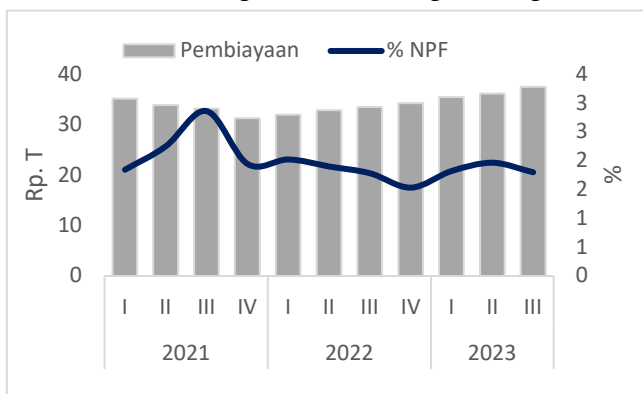
triwulan sebelumnya. Secara umum, DPK di Aceh mengalami tren penurunan sejak triwulan II 2022 sampai dengan triwulan II 2023. Namun, pada triwulan III 2023 terlihat terdapat kenaikan sebesar 0,41% (yoy). Nilai DPK di Aceh ke depan diharapkan kembali tinggi dengan penerapan sistem perbankan syariah.



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Pada triwulan laporan, *Non Performing Financing* (NPF) berdasarkan lokasi bank tercatat sebesar 1,80%, lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya sebesar 1,86% (Grafik 4.4.). Penurunan NPF ini menunjukkan bahwa kualitas penyaluran pembiayaan yang membaik dan tentunya NPF masih di bawah batas aman sehingga secara umum kualitas pembiayaan masih berada pada level yang terjaga.

Grafik 4.4 Perkembangan Non Performing Financing (LokBank)

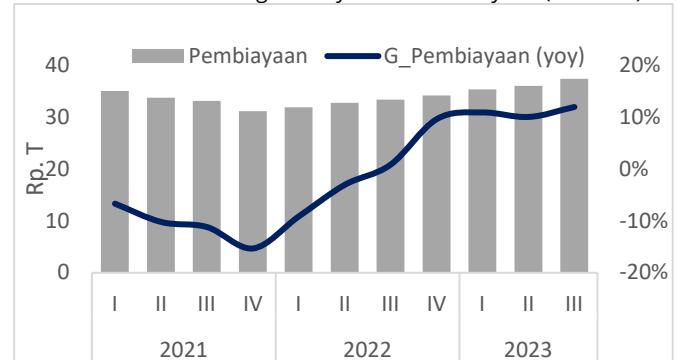


Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Penyaluran pembiayaan berdasarkan lokasi bank pada triwulan III 2023 tercatat sebesar Rp37,48 Triliun. Tren pertumbuhan pembiayaan masih berada di tren meningkat dengan pertumbuhan yang positif sejak triwulan III 2022 sampai dengan triwulan III 2023. Pertumbuhan pada triwulan III saat

ini berada pada tingkat pertumbuhan sebesar 12,07% (yoy) dan menjadi pertumbuhan pembiayaan tertinggi dalam setahun terakhir.

Grafik 4.5 Perkembangan Penyaluran Pembiayaan (LokBank)

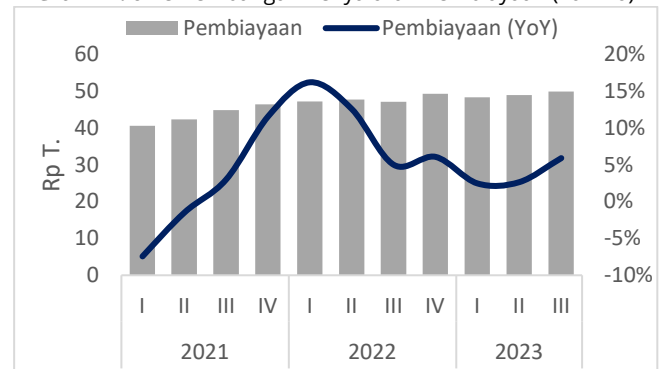


Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Pembiayaan yang disalurkan di Aceh tidak hanya dilakukan oleh perbankan yang berlokasi di Aceh. Dapat dilihat pada grafik 4.6 di bawah ini tentang perkembangan pembiayaan berdasarkan lokasi proyek. Penyaluran pembiayaan berdasarkan lokasi proyek pada triwulan III 2023 tercatat sebesar Rp49,88 Triliun. Pada triwulan yang sama di tahun lalu penyaluran pembiayaan adalah sebesar Rp47,09 Triliun, yang artinya penyaluran pembiayaan di triwulan ini sebesar 2,91% (yoy) atau lebih tinggi pertumbuhannya dibandingkan dengan triwulan lalu yang tumbuh 2,66 % (yoy).

Penyaluran pembiayaan berdasarkan lokasi proyek yang lebih besar dibanding berdasarkan lokasi bank mengindikasikan bahwa penyaluran pembiayaan di Aceh masih memerlukan sumber dana dari perbankan di luar Aceh.

Grafik 4.6 Perkembangan Penyaluran Pembiayaan (LokPro)



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

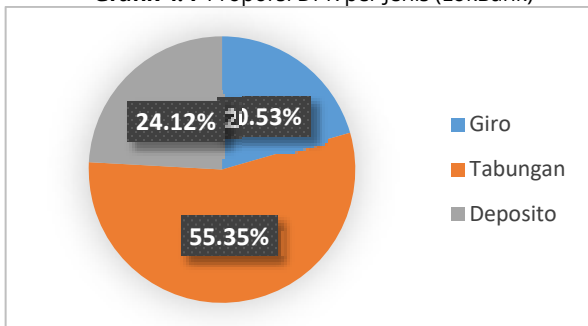
4.2. Intermediasi Perbankan

4.2.1. DPK Mengalami Kenaikan dari Jenis Tabungan, Giro dan Deposito.

Berdasarkan jenisnya, DPK terdiri dari giro, tabungan, dan deposito. Adapun pada triwulan laporan, DPK didominasi tabungan dengan proporsi sebesar 55,35%, diikuti deposito sebesar 24,12%, dan giro sebesar 20,53%.

Total DPK pada triwulan III 2023 adalah sebesar Rp39,86 Triliun, yang terdiri dari deposito sebesar Rp9,61 Triliun, giro sebesar Rp8,18 Triliun, dan deposito sebesar Rp9,61 Triliun.

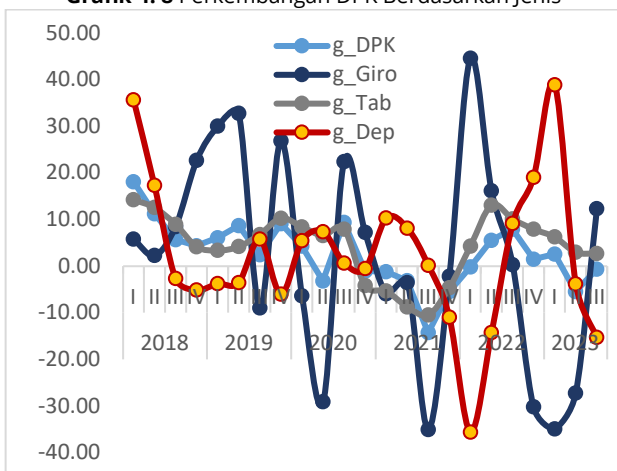
Grafik 4. 7 Proporsi DPK per Jenis (LokBank)



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Pada triwulan laporan, DPK jenis tabungan menjadi jenis DPK yang mengalami pertumbuhan tertinggi. DPK jenis giro dengan peningkatan sebesar 12,31% (yoy). Sementara itu, DPK jenis deposito mengalami penurunan sebesar 15,32% (yoy). Sementara itu, DPK jenis tabungan juga mengalami pertumbuhan sebesar 2,67% (yoy).

Grafik 4. 8 Perkembangan DPK Berdasarkan Jenis

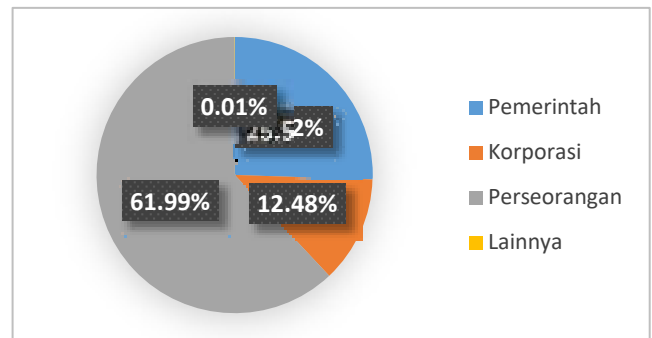


Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

4.2.2. Perkembangan DPK berdasarkan Pemilik

Berdasarkan kepemilikannya, DPK yang dimiliki oleh perseorangan memiliki porsi terbesar yaitu 61,99%. Sementara DPK milik pemerintah dan korporasi berturut-turut memiliki porsi sebesar 25,52% dan 12,48%.

Grafik 4. 9 Proporsi DPK Berdasarkan Kepemilikan (%)



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

DPK perseorangan pada triwulan laporan adalah sebesar Rp.24,71 Triliun terdiri dari giro dengan porsi sebesar 0,30%, deposito sebesar 15,54%, dan tabungan sebesar 84,16%. Masyarakat umum kebanyakan menyimpan dananya dalam bentuk tabungan. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya literasi keuangan dan faktor kemudahan membuka rekening tabungan.

Grafik 4. 10 Perkembangan DPK Perseorangan

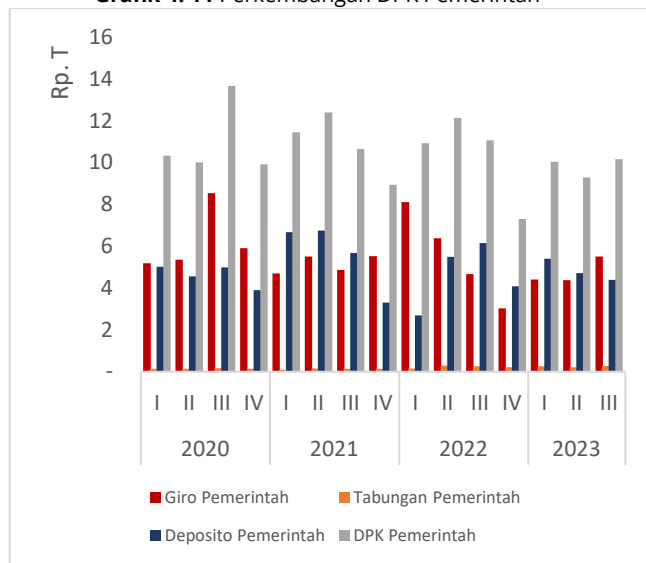


Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Perkembangan DPK pemerintah pada triwulan laporan masih terjaga meskipun mengalami penurunan dibandingkan triwulan yang sama pada tahun lalu. Pada triwulan laporan, penurunan DPK pemerintah tercatat sebesar 8,12% (yoy). Meskipun

mengalami penurunan namun penurunan DPK pemerintah di triwulan III tidak sedalam penurunannya di triwulan II yang turun sebesar 23,52% (yoy). Penurunan paling dalam terjadi pada deposito pemerintah yang 35,38% (yoy). Sementara itu, giro dan pemerintah mengalami perbaikan. Giro pemerintah meningkat sebesar 18,06% (yoy), dan tabungan pemerintah meningkat sebesar 6,85% (yoy). Penurunan DPK di triwulan III secara umum disebabkan realisasi belanja pemerintah yang tinggi menjelang akhir tahun .

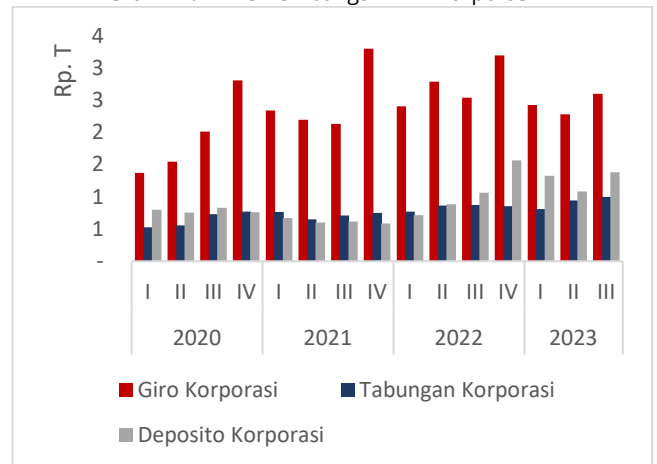
Grafik 4. 11 Perkembangan DPK Pemerintah



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Proporsi DPK korporasi pada triwulan laporan adalah sebesar Rp4,97 Triliun yang terdiri dari giro sebesar 52,25%, deposito sebesar 27,71%, dan tabungan sebesar 20,04%. DPK korporasi mengalami kenaikan 10,30% (yoy). Jika dilihat jenisnya, DPK korporasi jenis giro mengalami kenaikan sebesar 2,43% (yoy). Sementara itu, deposito dan tabungan masing-masing meningkat sebesar 29,87% (yoy) dan 14,54% (yoy).

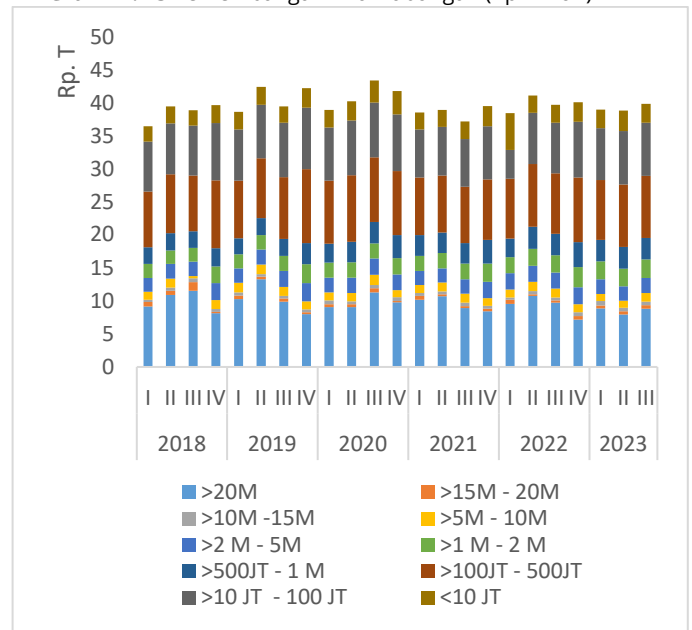
Grafik 4. 12 Perkembangan DPK Korporasi



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Berdasarkan kelompok nilainya, DPK dengan nominal nilai rekening antara >100 Juta – 500 juta memiliki persentase sebesar 23,65% dari total DPK. Persentase ini menjadi yang terbesar dibandingkan dengan kelompok nilai lainnya. Selanjutnya, DPK berdasarkan kelompok nilai yang memiliki persentase terbesar adalah kelompok nilai >10-100 Juta, dan >20 Miliar masing-masing memiliki persentase terhadap total DPK sebesar 20,84% dan 20,07%.

Grafik 4. 13 Perkembangan Nilai Tabungan (Rp Triliun)

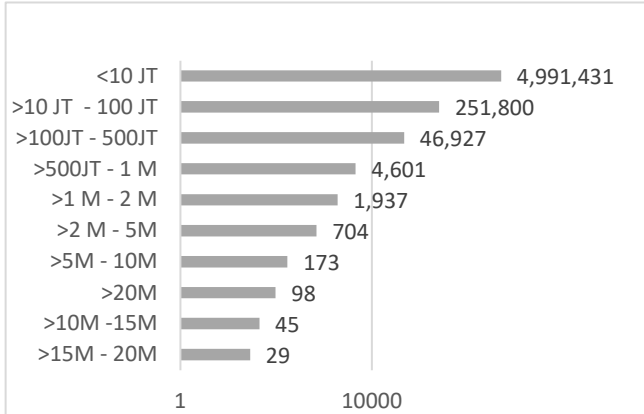


Sumber: Laporan Bank Umum diolah

Hingga triwulan III 2023, terdapat 5,29 juta pemegang rekening di Aceh, atau meningkat sekitar 600 ribu. Inklusi keuangan di Aceh dapat dikatakan semakin baik seiring semakin banyaknya masyarakat yang terhubung dengan layanan keuangan.

Dari keseluruhan jumlah rekening, pemegang rekening dengan saldo di bawah Rp10 juta mendominasi dengan porsi 94,06% dari total nasabah, atau sebanyak 5,2 juta orang pemegang rekening.

Grafik 4. 14 Jumlah Rekening per Saldo



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Secara spasial, penghimpunan Dana Pihak Ketiga di Provinsi Aceh belum tersebar secara merata dan masih terkonsentrasi di wilayah ibu kota provinsi.

Grafik 4. 15 Penghimpunan DPK Spasial (Rp Triliun)



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Kota Banda Aceh menyerap 44,75% dari total DPK di Aceh atau setara dengan Rp17,84 Triliun. Setelah ibu kota provinsi, wilayah Kabupaten/Kota yang

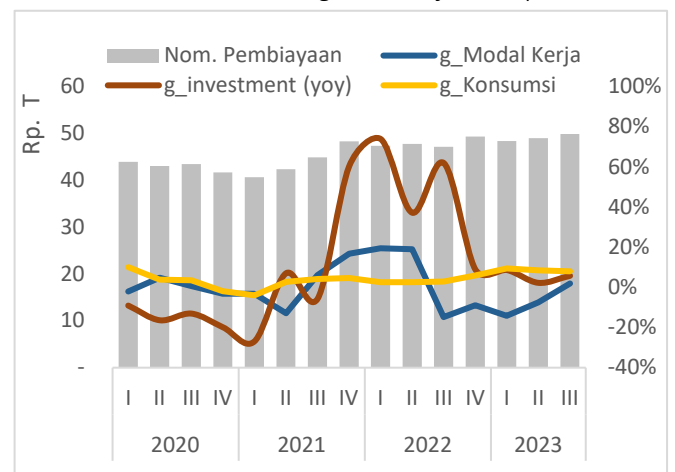
mendominasi penghimpunan DPK diantaranya adalah Lhokseumawe (Rp4,24 Triliun), Bireun (Rp2,17 Triliun), Langsa (Rp2,14 Triliun) dan Pidie (Rp2,05 Triliun). Jika dibandingkan dengan triwulan lalu, 5 besar Kabupaten/Kota dengan DPK tertinggi masih dipegang wilayah sama.

4.2.2. Perbaikan Penyaluran Pembiayaan Didorong Investasi dan Konsumsi

Penyaluran pembiayaan berdasarkan lokasi proyek pada triwulan III 2023 masih menunjukkan tren pertumbuhan positif sebesar 2,91% (yoy). Namun, pembiayaan di Aceh masih didominasi oleh pembiayaan konsumsi. Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran pembiayaan sektor produktif perlu didorong, utamanya untuk lapangan usaha atau sektor prioritas agar dapat memberikan efek *multiplier* terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh.

Pertumbuhan pembiayaan di triwulan laporan didorong oleh semua jenis pembiayaan.

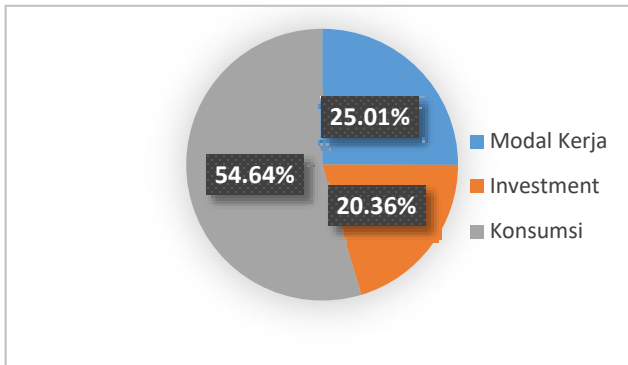
Grafik 4. 16 Perkembangan Pembiayaan (lokpro)



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Nilai pembiayaan yang bersifat konsumtif memiliki proporsi sebesar 54,64%, sementara penyaluran pembiayaan di sektor produktif memiliki proporsi sebesar 44,36%. Adapun pembiayaan dari sektor produktif dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan investasi dan modal kerja, masing-masing memiliki porsi sebesar 20,36% dan 25,01% dari total pembiayaan pada triwulan laporan

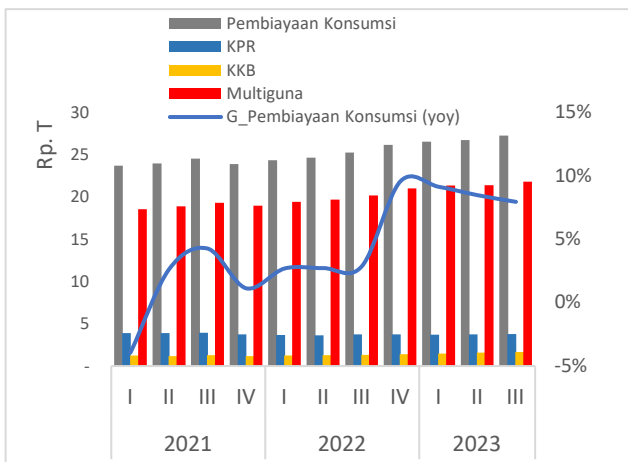
Grafik 4. 17 Proporsi pembiayaan berdasarkan penggunaan



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Penyaluran pembiayaan di Provinsi Aceh yang masih didominasi oleh pembiayaan sektor konsumsi menunjukkan bahwa pembiayaan ke sektor-sektor produktif belum tersalurkan secara optimal. Pembiayaan Konsumsi terdiri dari Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), dan kredit multiguna. Pada triwulan laporan, pembiayaan konsumsi meningkat sebesar 7,95% (yoy). Tren perbaikan pembiayaan konsumsi pada triwulan berjalan terus berlanjut setelah mengalami penurunan yang drastis sejak tahun 2020 akibat dampak pandemi COVID-19.

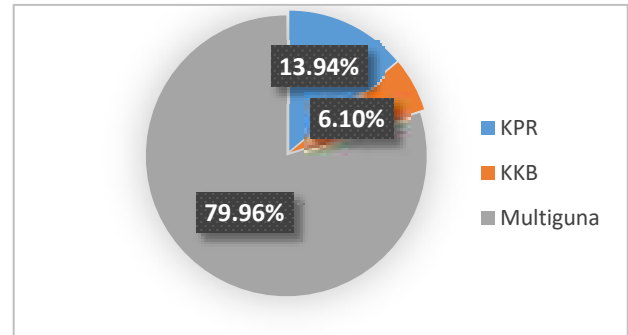
Grafik 4. 18 Pembiayaan Konsumsi



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Selanjutnya, proporsi pembiayaan Multiguna, KKB, dan KPR pada triwulan laporan secara berturut-turut sebesar 79,96%, 6,10%, dan 13,94%. Pembiayaan Multiguna paling banyak diminati masyarakat karena peruntukannya yang tidak spesifik dan relatif lebih mudah untuk diambil oleh masyarakat.

Grafik 4. 19 Proporsi Pembiayaan Konsumsi Berdasarkan Penggunaan



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Berikutnya, pada triwulan laporan, penyaluran KPR tercatat sebesar Rp3,78 Triliun, KKB sebesar Rp1,66 Triliun, dan multiguna sebesar Rp21,79 Triliun.

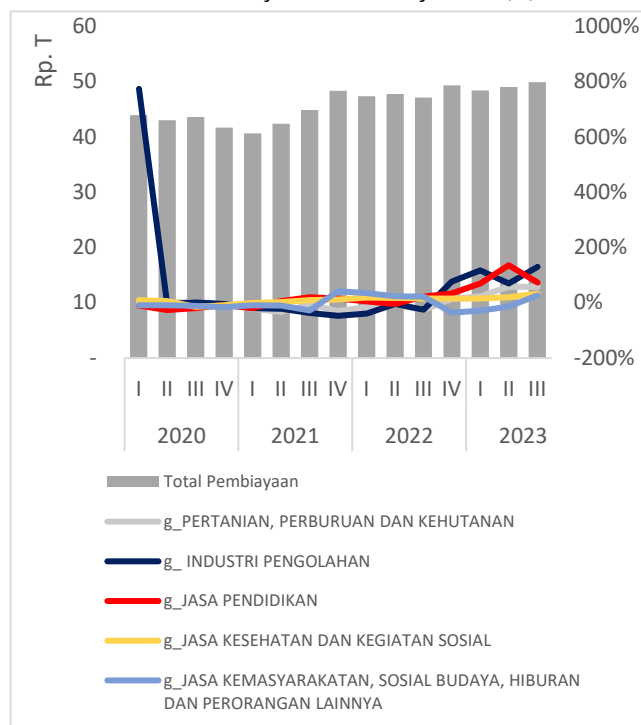
Peningkatan pembiayaan konsumsi sejalan dengan dengan kembali normalnya konsumsi pasca pandemi dan dikonfirmasi oleh hasil Survei Konsumen yang terjaga di zona optimis. Survei Konsumen yang dilaksanakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe di Kota Banda Aceh dan Kota Lhokseumawe mengindikasikan bahwa keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap berada pada zona optimis pada bulan September 2023 yaitu 120,24.

4.2.3. Perbaikan Penyaluran Pembiayaan Berdasarkan Lapangan Usaha Didorong Oleh LU Jasa Industri Pengolahan.

Berdasarkan lapangan usaha (LU), 5 lima LU dengan pertumbuhan pembiayaan tertinggi adalah LU Industri Pengolahan, LU Jasa Pendidikan, LU Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan, LU Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan LU Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya. Pada triwulan laporan LU Industri Pengolahan tumbuh sebesar 129,36% (yoy), LU Jasa Pendidikan tumbuh sebesar 72,30% (yoy), LU Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan tumbuh sebesar 56,46%, LU Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tumbuh sebesar 32,78%, serta teakhir LU Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya tumbuh sebesar 2,44% (yoy). Pertumbuhan penyaluran pembiayaan yang tinggi

di LU Industri Pengolahan merupakan indikasi yang bagus terhadap proses hilirasi di Aceh. Selanjutnya, selama tiga triwulan berturut-turut LU Jasa Pendidikan mengalami peningkatan yang mengindikasikan aktivitas ekonomi di bidang pendidikan mengalami kenaikan.

Grafik 4. 20 Penyaluran Pembiayaan LU (%)



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

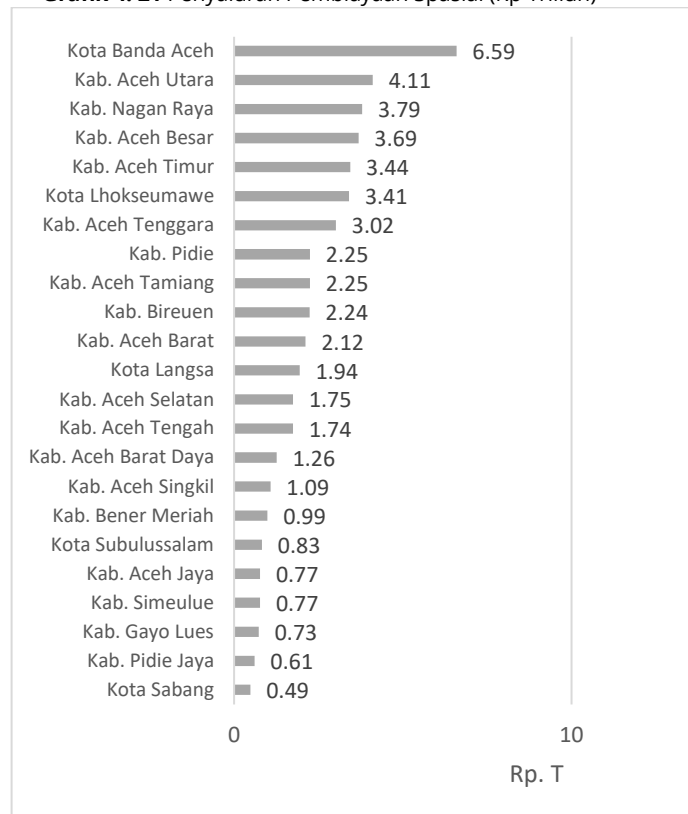
Secara spasial, penyaluran pembiayaan berdasarkan lokasi proyek di Aceh masih belum merata. Terkonsentrasinya penyaluran pembiayaan di 5 Kota/kabupaten ini menjadi indikator bahwa penyaluran pembiayaan di Provinsi Aceh masih belum merata.

Pada triwulan III 2023, penyaluran pembiayaan paling banyak terdapat di Kota Banda Aceh sebesar Rp6,59 Triliun, Kabupaten Aceh Utara sebesar Rp4,11 Triliun, Kabupaten Nagan Raya sebesar Rp3,79 Triliun, Kabupaten Aceh Besar sebesar Rp3,69 Triliun, dan Kabupaten Aceh Timur sebesar Rp3,44 T. Total pembiayaan di 5 Kab/Kota tersebut mencapai Rp21,62 Triliun atau mencapai 43,36% dari total pembiayaan.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang merata perlu ada penyaluran pembiayaan yang merata juga. Untuk itu, stimulus perekonomian harus dibuat diberbagai daerah

agar perbankan dapat menyalurkan pembiayaannya.

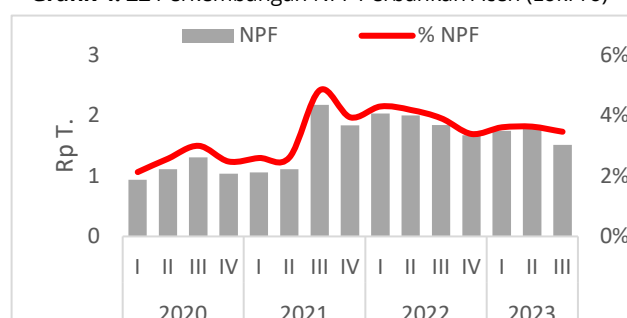
Grafik 4. 21 Penyaluran Pembiayaan Spasial (Rp Triliun)



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Kualitas pembiayaan di Provinsi Aceh pada triwulan III 2023 (berdasarkan lokasi proyek) terjaga Rasio NPF pada triwulan laporan adalah sebesar 3,46%, atau lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang berada pada tingkat 3,63%. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas penyaluran pembiayaan di Aceh.

Grafik 4. 22 Perkembangan NPF Perbankan Aceh (LokPro)



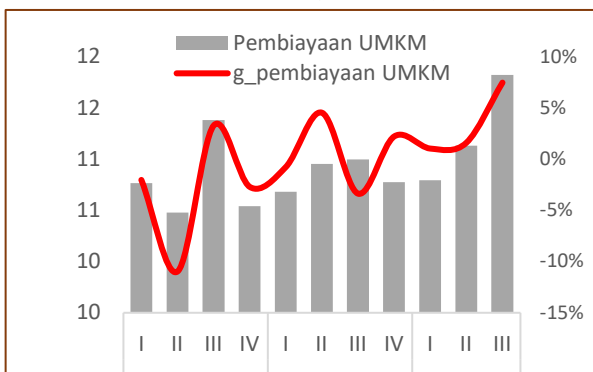
Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

4.2.4. Penyaluran Pembiayaan Kepada UMKM Mulai Membaik

Pada triwulan III 2023, nilai pembiayaan UMKM di Aceh adalah sebesar Rp11,82 Triliun terjadi peningkatan pembiayaan UMKM di Aceh sebesar

7,49% (yoy). Kenaikan ini lebih tinggi daripada kenaikan triwulan II yang hanya naik sebesar 1,62% (yoy).. Selanjutnya, rasio pembiayaan UMKM terhadap total pembiayaan di Aceh pada triwulan III 2023 sebesar 23,70%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat inklusivitas pembiayaan di Aceh masih potensial untuk terus ditingkatkan.

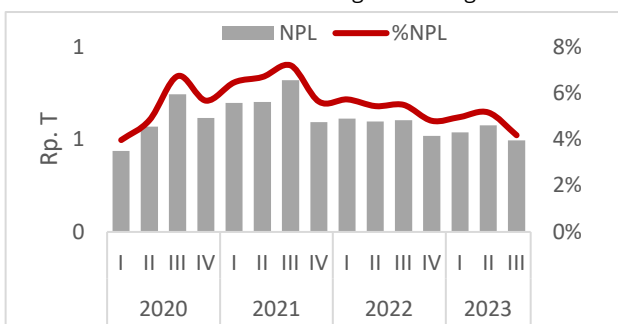
Grafik 4. 23 Perkembangan Pembiayaan UMKM



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Sementara itu, rasio *Non-Performing Financing* (NPF) pembiayaan UMKM di triwulan laporan adalah sebesar 4,18%. Nilai NPF di triwulan laporan lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang berada pada tingkat 5,17%. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbaikan kualitas penyaluran pembiayaan UMKM. Nilai NPF ini harus terus dipantau mengingat bahwa indikator ini merupakan proksi untuk melihat kualitas penyaluran pembiayaan.

Grafik 4. 24 Non Performing Financing UMKM

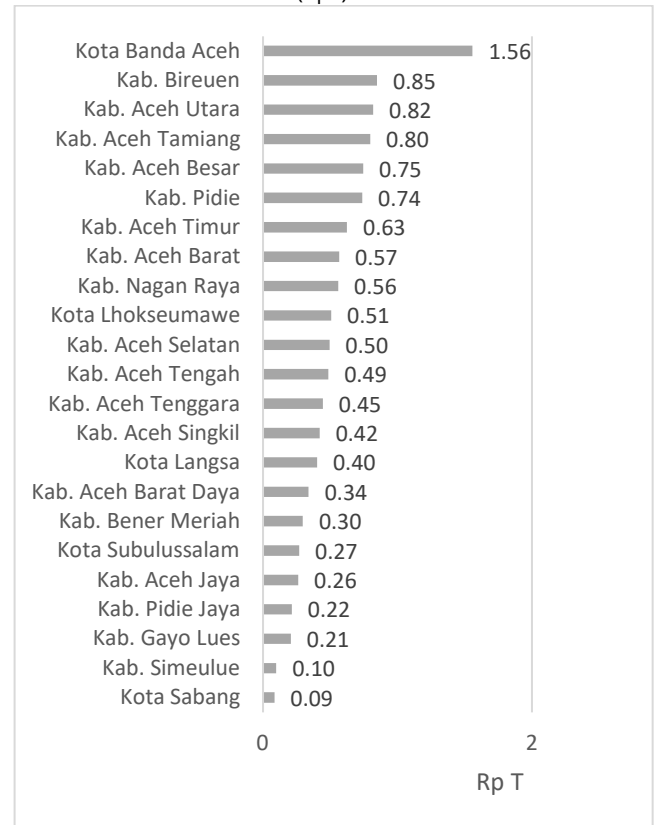


Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Secara spasial, penyaluran pembiayaan UMKM berdasarkan lokasi proyek di Aceh masih belum merata. Hal tersebut terlihat dari terkonsentrasinya penyaluran pembiayaan pada 5 (lima) Kabupaten/Kota yang mendominasi setengah dari total pembiayaan yang tersalurkan.

Pada triwulan laporan ini 5 kab/kota dengan total pembiayaan UMKM terbesar antara lain kota Banda Aceh (Rp.1,56 T), Kab.Bireun (Rp.0,85 T), Kota Aceh Utara (Rp.0,82 T), Kab. Aceh Tamiang (Rp.0,80 T), dan Kabupaten Aceh Besar (0,75 T).

Grafik 4. 25 Pembiayaan UMKM Triwulan III 2023 Secara Spasial (RpT)



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

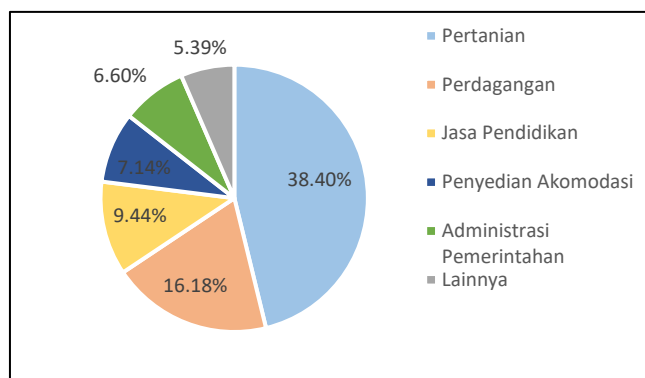
Bank Indonesia terus mendorong realisasi penyaluran pembiayaan UMKM dengan menetapkan target proporsi pembiayaan UMKM perbankan berdasarkan tahapan tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.24/3/PBI/2022. Selain itu, Bank Indonesia juga berupaya mendorong peningkatan kinerja pembiayaan/kredit UMKM melalui penerbitan kebijakan insentif seperti memperlonggar batasan *Loan to Funding Ratio* sebagaimana diatur dalam PBI No. 24/4/PBI/2022. Sementara itu, di tingkat regional KPw Bank Indonesia juga turut mendorong UMKM dengan melaksanakan program pengembangan UMKM di masing-masing daerah baik melalui pembinaan, pendampingan, fasilitasi, maupun kluster.

4.3. Kinerja Pembiayaan Rumah Tangga

Pada penyaluran pembiayaan kepada rumah tangga, sumber kerentanan terletak pada kinerja perekonomian, kondisi ketenagakerjaan dan penghasilan.

Penghasilan rumah tangga di Provinsi Aceh relatif belum terdiversifikasi. Hal tersebut tergambar dari jumlah tenaga kerja di Aceh yang mayoritas bekerja di lapangan usaha pertanian (38,40%). Sehingga, tekanan pada lapangan usaha tersebut mengakibatkan rumah tangga di Aceh terpapar risiko yang cukup tinggi di tahun 2023. Selain itu, hilirisasi di sektor pertanian belum berjalan sehingga produk dari sektor pertanian masih berupa barang mentah (*raw material*).

Grafik 4. 26 Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Usaha (2022)



Sumber: BPS Provinsi Aceh, diolah

4.4. Langkah Peningkatan Akses Keuangan

4.4.1. Pengembangan Infrastruktur Pendukung Sistem Keuangan di Aceh

Kerja sama antara Perbankan dengan penyedia jasa transaksi lintas negara melalui ATM seperti Visa/Mastercard baik sebagai *issuer* maupun *acquirer* perlu diakselerasi. Masih terbatasnya jaringan layanan Bank Syariah di Aceh yang terintegrasi dengan jaringan internasional menjadi isu tersendiri, terlebih lagi dengan mulai dibukanya pintu masuk wisatawan asing seiring dengan semakin membaiknya kondisi pandemi. Solusi jangka pendek yaitu mendorong transaksi

non tunai khususnya untuk wisatawan asing dengan memperbanyak EDC di *merchant* khususnya di kawasan wisata yang dapat melayani transaksi menggunakan kartu kredit/debit berlogo Visa/Mastercard.

4.4.2. Langkah KPw BI Provinsi Aceh dalam mendorong Penyaluran Pembiayaan UMKM

Sampai dengan September 2023, pembiayaan UMKM yang berasal dari bank di Aceh adalah sebesar Rp10,49 Triliun atau 28,01% dari total pembiayaan. Dalam hal mendorong penyaluran pembiayaan UMKM, KPw BI Aceh melakukan berbagai strategi untuk meningkatkan akses pembiayaan UMKM di antaranya adalah pengembangan dan pendampingan UMKM, pelatihan pembuatan laporan keuangan dengan optimalisasi SIAPIK dan BISAID, dan terakhir membuka akses pasar baik di dalam negeri maupun luar negeri untuk UMKM yang sudah siap dengan mengikutsertakan pelaku UMKM diberbagai kegiatan.

Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Bank Indonesia Provinsi Aceh untuk mendorong UMKM dan perekonomian Aceh adalah kegiatan Festival Meuseuraya. Dari kegiatan ini didapati *business matching* pembiayaan mencapai Rp8,6 M yang melibatkan 4 perbankan dan 35 UMKM.

Selanjutnya, Bank Indonesia juga terus melakukan upaya peningkatan pasar ekspor. Pada 6 Oktober 2023, UMKM binaan Bank Indonesia PT. Teluk Gayo Mandiri dan PT Meukat melakukan penandatanganan *letter of intent* bersama Indonesia Trading House Guangzhou (ITHG) untuk pengiriman *greenbean* ke China. Selanjutnya pangiriman perdana telah dilakukan pada 1 November 2023 sebanyak 15 ton dengan nilai Rp1,57 Miliar.

Aceh Gayo Sustainable Investment Dialogue (AGASID) 2023

Kegiatan forum investasi terbesar di Aceh dengan tajuk ***Aceh Gayo Sustainable Investment Dialogue (AGASID)*** kembali digelar oleh **Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh** bersama **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh** pada tanggal 10-11 Oktober 2023. Forum investasi ini telah dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun sejak tahun 2021 hingga 2023. Adapun tema yang diusung pada AGASID 2023 adalah ***“Strengthening Aceh’s Economy Through Sustainable Investment and Value Added Commodities”***. Tema ini dipilih mengingat bahwa investasi yang berkelanjutan dan komoditas-komoditas yang bernilai tambah mampu mengakselerasi dan memberikan efek *multiplier* pada perekonomian daerah. Harapannya perekonomian di Aceh mampu tumbuh kuat dengan sumber pertumbuhan yang inklusif. Kegiatan ini dihadiri oleh Wali Nanggroe Aceh, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Kepala DPMPTSP Aceh, Dirjen BKPM Hilirisasi Mineral dan Batu Bara, Kepala Daerah dari beberapa Kab/Kota di Aceh, pelaku usaha, perbankan, dan akademisi.



Opening Ceremony AGASID



Panel Discussion AGASID

Kegiatan AGASID 2023 merupakan upaya promosi investasi dan/atau perdagangan daerah guna mendukung peningkatan realisasi investasi di Aceh. Beberapa rangkaian kegiatan *road to AGASID 2023* yang telah terselenggara adalah seperti kegiatan *Aceh Investment Planning Forum (AIPF)*, Diseminasi Kajian Kelautan dan Perikanan Aceh: Optimalisasi dan Peluang Investasi, *Capacity Building* dan *Workshop* Pelaku Usaha Kopi Aceh, seminar nasional bertajuk *Aceh Economic Forum (AEF)*, serta beberapa perlombaan seperti lomba pembuatan video profil investasi, dan lomba penulisan artikel opini.

Setelah kegiatan di hari pertama selesai, kegiatan dilanjutkan pada hari kedua di tanggal 11 Oktober 2023. Para investor diajak melihat potensi dan peluang investasi di Pulau Weh, Kota Sabang. Beberapa lokasi yang dikunjungi antara lain CT 3, CT 1, Lhok Weng *Resort*, dan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) le Meulee. Peluang di sektor pariwisata masih terbuka luas dan perlu dikembangkan. Selain itu, usaha di bidang kepelabuhan juga perlu dapat didorong. Secara umum potensi yang dimiliki Kota Sabang sangatlah besar. Sinergi dan kerjasama antara pemerintah dengan swasta sanga penting untuk menata dan membangun Kota Sabang. Dan di sini Bank Indonesia akan senantiasa memfasilitasi dan terus memberikan *advisory* kepada pemerintah untuk penguatan ekonomi termasuk didalam mendorong realisasi investasi.

--000--



BAB V

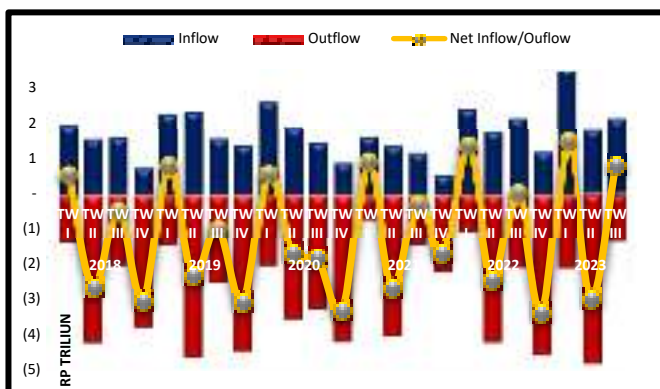
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Selama triwulan III 2023, perkembangan sistem pembayaran secara konsisten berjalan lancar dalam menopang pemulihan perekonomian Provinsi Aceh. Sistem pembayaran tunai berjalan sesuai dengan pola historisnya di mana terjadi *net inflow* pada triwulan laporan. Sistem pembayaran non tunai nilai besar mengalami pertumbuhan. Di sisi lain, penggunaan kartu kredit, uang elektronik dan QRIS terus menunjukkan tren pertumbuhan positif pada triwulan laporan.

5.1. Sistem Pembayaran Tunai

Pada triwulan III 2023, posisi pengedaran uang kartal di Bank Indonesia mengalami *net outflow*¹. Aliran uang kartal melalui Bank Indonesia di Provinsi Aceh mengalami *net inflow* sebesar Rp0,8 triliun, dengan total *inflow* sebesar Rp2,14 triliun dan total *outflow* sebesar Rp1,34 triliun (Grafik 5.1). Kondisi ini selaras dengan data tahun lalu yang menunjukkan *net inflow* terjadi pada triwulan III. *Net inflow* pada triwulan laporan mengimplikasikan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap uang kartal lebih rendah dibandingkan masuknya uang kartal dari masyarakat dan perbankan ke Bank Indonesia. *Net inflow* pada triwulan laporan merupakan lebih besar dibandingkan dengan *net inflow* tahun lalu.

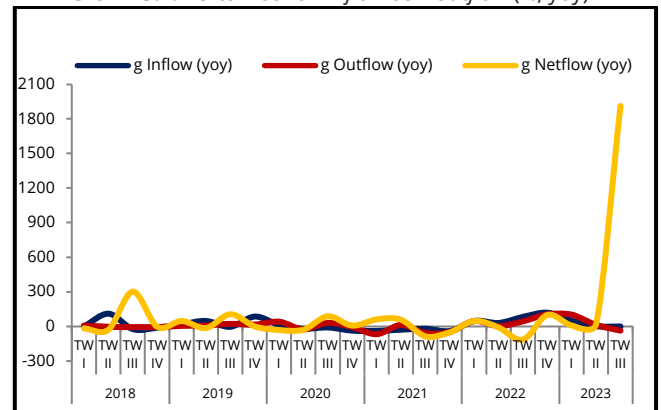
Grafik 5.1. Netflow Kas (Rp Triliun)



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Secara tahunan, tingkat *inflow* pada triwulan III 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 0,24% (yoy), sementara *outflow* menurun sebesar 36,02% (yoy) (Grafik 5.2). Nilai *outflow* yang mengalami penurunan sejalan dengan pola historisnya dimana *outflow* pada triwulan ketiga lebih rendah dari triwulan sebelumnya. *Baseline* periode yang sama tahun lalu yang rendah mendukung pertumbuhan yang sangat tinggi pada triwulan saat ini.

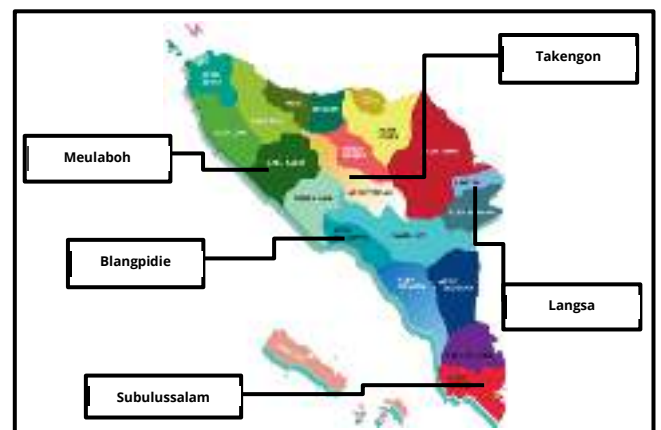
Grafik 5.2. Pertumbuhan Inflow dan Outflow (% ,yoy)



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Selain menjaga dan memelihara kestabilan nilai Rupiah, Bank Indonesia juga berupaya untuk memenuhi kebutuhan uang Rupiah di masyarakat melalui berbagai layanan, salah satunya yaitu Kas Titipan. Kas Titipan merupakan kegiatan penyediaan uang Rupiah milik Bank Indonesia yang dititipkan kepada kantor Bank Umum untuk mencukupi persediaan kas Perbankan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat di suatu wilayah/daerah tertentu.

Grafik 5.3. Kas Titipan Bank Indonesia



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Pada tahun 2020, terdapat 5 (lima) Kas Titipan di Provinsi Aceh yaitu di Blangpidie, Meulaboh, Subulussalam, Takengon, dan Langsa. Namun beberapa Kas Titipan mengalami penutupan pada triwulan IV tahun 2020, yaitu di Meulaboh (ditutup November 2020), Takengon (ditutup November 2020), Langsa (ditutup Desember 2020), dan Blangpidie (ditutup Desember 2020). Penutupan

¹ Aliran uang kartal dari perbankan dan masyarakat ke Bank Indonesia (*outflow*) lebih

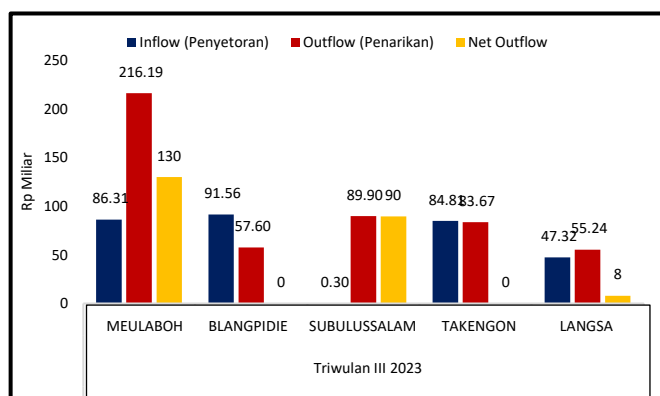
kecil dari aliran uang kartal dari Bank Indonesia ke sistem perbankan dan masyarakat (*outflow*)

tersebut dikarenakan adanya proses konsolidasi dan transisi Bank Pengelola Kas Titipan sehubungan dengan implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang mewajibkan Perbankan yang beroperasi di Aceh seluruhnya harus berbentuk syariah, dengan masa transisi paling lama tiga tahun atau hingga tahun 2021. Setelah melalui masa transisi, Kas Titipan tersebut kembali dibuka secara bertahap, diantaranya Kas Titipan Blangpidie yang kembali beroperasi pada Agustus 2021 dan Kas Titipan Takengon pada November 2021. Selain itu, kas titipan di Meulaboh dan Langsa juga dibuka kembali pada April 2022.

Secara agregat, Kas Titipan di Provinsi Aceh pada triwulan laporan mengalami *net outflow* sebesar Rp192,29 miliar (Grafik 5.5). Jumlah tersebut berasal dari lima Kas Titipan di Meulaboh, Subulussalam, Blangpidie, Takengon, dan Langsa. Aliran uang kartal yang masuk (*inflow*) sebesar Rp310,30 miliar atau mengalami penurunan sebesar 33,20% (yoy). Di sisi lain, *outflow* tercatat sebesar Rp502,59 miliar atau mengalami penurunan sebesar 47,38% (yoy).

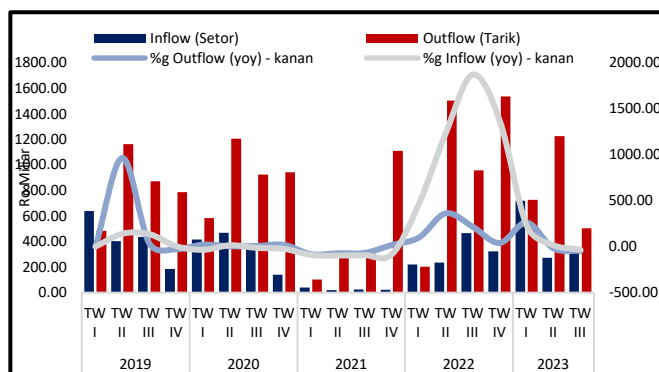
Temuan uang yang diragukan keasliannya (palsu) pada triwulan laporan tercatat mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya dengan hanya terdapat 7 lembar yang ditemukan dengan pecahan yang paling banyak ditemukan adalah pecahan Rp20.000,00.

Grafik 5.4. Transaksi *Inflow Outflow* per Kas Titipan Triwulan III 2023



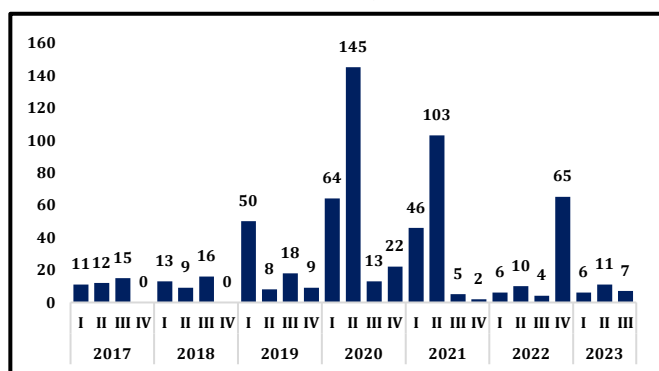
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.5. Total Transaksi Kas Titipan Triwulanan



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.6. Temuan Uang Palsu (Lembar)

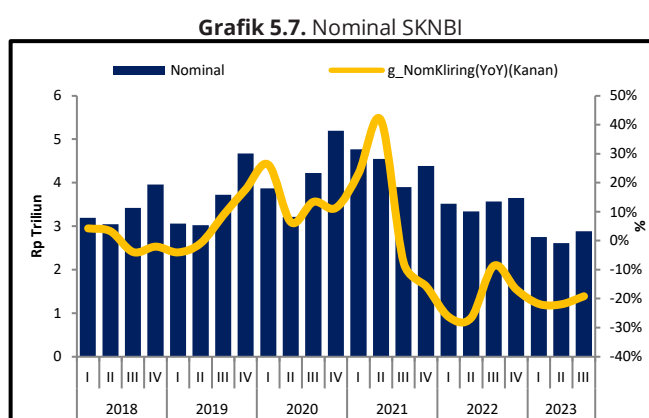


Sumber: Bank Indonesia, diolah

5.2. Sistem Pembayaran Non Tunai

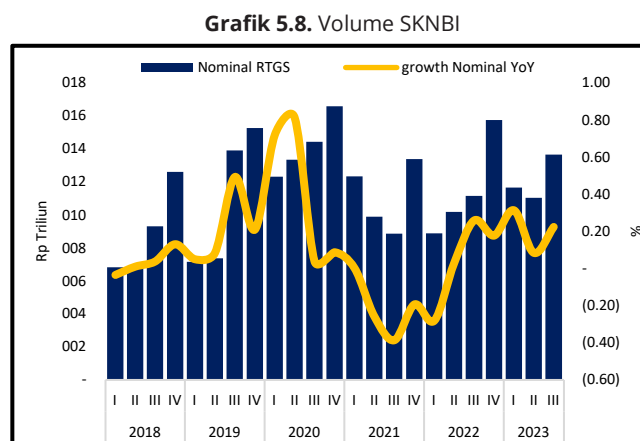
Sistem pembayaran non tunai, baik yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia maupun industri, menunjukkan tren pertumbuhan positif pada triwulan laporan. Sistem pembayaran nilai besar dan nilai ritel yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia menunjukkan pertumbuhan dibandingkan triwulan sebelumnya. Sementara itu, sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh industri menggunakan instrumen Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) tercatat mengalami penurunan secara agregat dalam transaksi. Namun penggunaan instrumen Uang Elektronik baik *server based* ataupun *chip based* di Provinsi Aceh tercatat mengalami peningkatan pada triwulan laporan. Secara umum, sistem pembayaran non tunai di Provinsi Aceh tetap terselenggara dengan baik dalam mendukung berbagai aktivitas transaksi masyarakat.

Memasuki triwulan III tahun 2023, transaksi sistem pembayaran non tunai yang diselenggarakan Bank Indonesia melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) menunjukkan penurunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini diperkirakan terjadi karena adanya transisi pengguna sistem pembayaran ritel yang semakin banyak beralih menggunakan BI-FAST. Pada triwulan laporan, nilai penyelesaian transaksi ritel melalui SKNBI tercatat sebesar Rp2,89 triliun atau tumbuh sebesar 0,11% (qtq) dibandingkan triwulan II 2023 yang tercatat sebesar Rp2,61 triliun. Sedangkan secara tahunan, nominal transaksi menurun sebesar 19,07% (yoy) dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp3,57 triliun (Grafik 5.7).

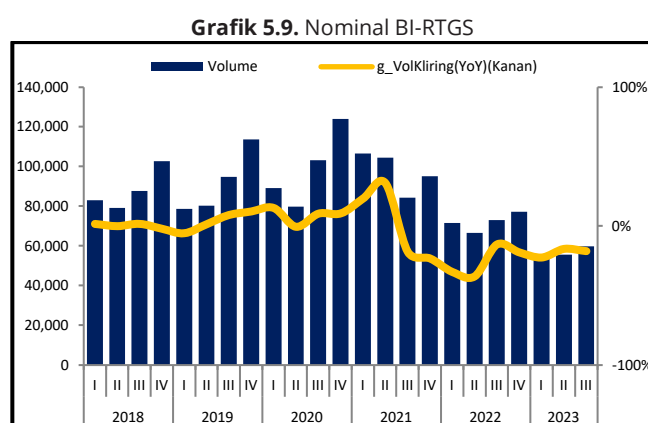


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Volume transaksi SKNBI pada triwulan laporan tercatat sebanyak 59.808 Data Keuangan Elektronik (DKE) atau meningkat sebesar 7,59% (qtq) dibandingkan triwulan II 2023 yang tercatat sebanyak 55.587 (Grafik 5.8). Sementara itu secara tahunan, volume transaksi ritel melalui SKNBI pada triwulan laporan tercatat mengalami penurunan sebesar 18,11% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.



Sumber: Bank Indonesia, diolah



Sumber: Bank Indonesia, diolah

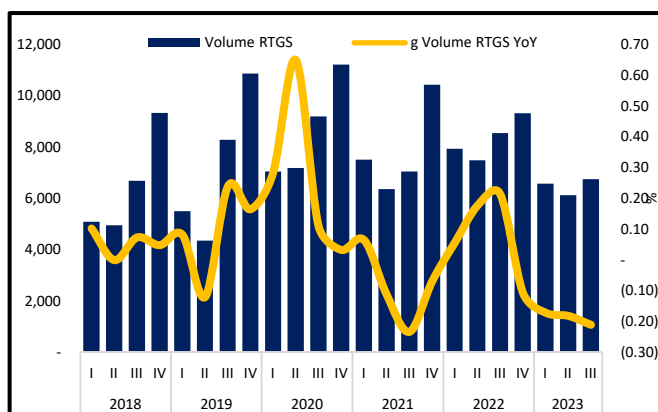
Sementara itu, perkembangan sistem pembayaran nilai besar tercermin dalam perkembangan data *Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS). Pada periode laporan, transaksi BI-RTGS secara nominal tercatat sebesar Rp13,64 triliun, atau mengalami kenaikan sebesar 22,45% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Grafik 5.9). Sementara jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, nominal transaksi BI-RTGS pada triwulan laporan tumbuh sebesar 23,76% (qtq) dibandingkan triwulan II 2023 yang tercatat sebesar Rp11,02 triliun.

Volume transaksi BI-RTGS pada triwulan laporan tercatat sebanyak 6.746 transaksi, mengalami pertumbuhan sebesar 10,17% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya sebanyak 6.123 transaksi (Grafik 5.10). Sementara itu secara tahunan, volume transaksi BI-RTGS tercatat turun sebesar 21,10% (yoy) dibanding triwulan yang sama tahun lalu yang mencapai 8.550 transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata nilai transfer pada periode laporan lebih tinggi dibanding periode yang

sama tahun sebelumnya, mengingat meskipun secara volume transaksi menurun namun secara nominal jauh meningkat.

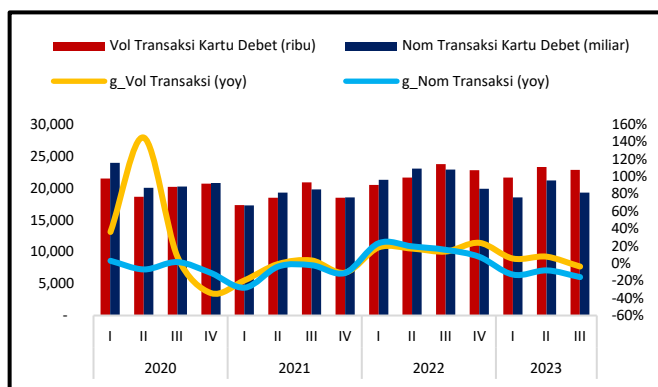
Perkembangan transaksi nilai besar melalui BI-RTGS maupun ritel melalui SKNBI secara agregat tahunan mengalami penurunan di triwulan III 2023 jika dibandingkan triwulan yang sama tahun lalu. Di samping itu, penurunan jumlah dan volume transaksi SKNBI pada triwulan laporan secara yoy diperkirakan karena terjadinya *user shifting* pasca implementasi BI-FAST² oleh Bank Indonesia sejak Desember 2021.

Grafik 5.10. Volume BI-RTGS



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.11. Transaksi ATM Debit



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Selanjutnya, transaksi non tunai menggunakan APMK yaitu kartu kredit, dan Uang Elektronik (UE) juga mengalami perkembangan, sementara penggunaan kartu ATM/debit mengalami penurunan. Perkembangan transaksi kartu kredit dan Uang Elektronik menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun

sebelumnya.

Dari sisi kartu ATM/debit, volume transaksi pada triwulan III 2023 tercatat menurun sebesar 3,76% (yoy) menjadi 22,82 juta transaksi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Grafik 5.11). Sementara nominal transaksi ATM/debit tercatat sebesar Rp19,28 triliun, atau mengalami penurunan sebesar 15,76% (yoy) jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kartu ATM/debit mayoritas digunakan oleh masyarakat untuk aktivitas tarik tunai dengan nominal transaksi sebanyak Rp11,12 triliun (57,65%).

Sementara itu dari sisi kartu kredit, volume transaksi mengalami peningkatan sebesar 0,89% (yoy) dari 118.790 transaksi pada triwulan III 2022 menjadi 119.850 transaksi pada triwulan III 2023 (Grafik 5.12). Secara nominal, pada triwulan laporan transaksi kartu kredit tercatat sebesar Rp140,42 miliar, atau meningkat sebesar 15,77% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp121,29 miliar.

Pertumbuhan transaksi kartu kredit pada triwulan laporan yang mengalami ekspansi dari triwulan sebelumnya menunjukkan adanya perbaikan ekonomi dan peningkatan konsumsi di masyarakat. Selama triwulan III 2023, transaksi kartu kredit mayoritas didominasi untuk keperluan belanja dengan nominal mencapai Rp135,09 miliar atau 96,20% dari total nominal transaksi dan volume sebanyak 115.548 transaksi atau 96,41% dari total volume transaksi.

Seiring dengan meningkatnya *awareness* masyarakat dalam menggunakan instrumen pembayaran non tunai, perkembangan transaksi menggunakan UE terus mengalami peningkatan. Transaksi UE secara nominal pada triwulan III 2023 mencapai Rp690,21 miliar, atau meningkat sebesar 4,59% (yoy). Sementara volume transaksi UE meningkat sebesar 1,12% (yoy) atau sebanyak 5,68 juta transaksi selama triwulan III 2023 (Grafik 5.13). Tren transaksi UE yang relatif terus meningkat

² BI-FAST adalah infrastruktur Sistem Pembayaran ritel nasional yang dapat memfasilitasi pembayaran ritel secara real-time, aman, efisien, dan tersedia setiap saat (24/7) yang diharapkan dapat memperkuat ketahanan Sistem Pembayaran Ritel nasional

dengan menyediakan alternatif terhadap infrastruktur Sistem Pembayaran nasional eksisting.

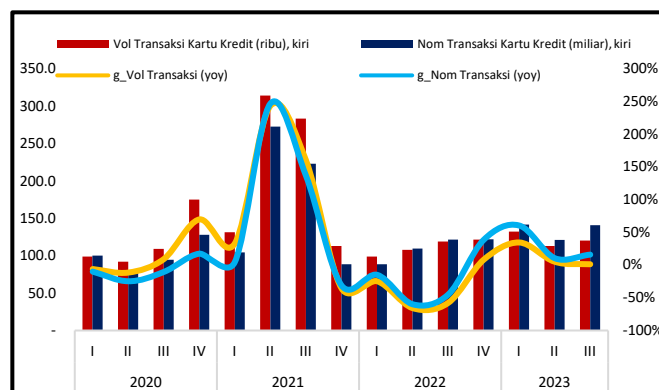
mengindikasikan semakin tingginya minat masyarakat dalam menggunakan UE baik dari sisi konsumen maupun *merchant*. Implementasi berbagai program elektronifikasi oleh Pemda juga berpengaruh terhadap peningkatan jumlah transaksi UE. Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat yang tinggi dalam menggunakan instrumen UE juga diiringi dengan peningkatan infrastruktur penerima pembayaran UE baik *chip based* ataupun *server based*. Peningkatan ini juga selaras dengan semakin tingginya intensitas penggunaan UE dalam aktivitas belanja masyarakat melalui *platform e-commerce* selama masa pandemi. Selama triwulan III 2023, transaksi UE mayoritas didominasi untuk keperluan belanja dengan jumlah nominal mencapai Rp453,54 miliar atau 65,71% dari total nominal transaksi dan volume sebanyak 4,26 juta transaksi atau 75,04% dari total volume transaksi.

Transaksi UE berbasis server (*server based*) juga mengalami kenaikan di Provinsi Aceh. Pemanfaatan salah satu metode pembayaran digital berbasis server yaitu melalui *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) mengalami peningkatan yang terlihat dari perkembangan jumlah *merchant* yang telah mengimplementasikan QRIS. Peningkatan ini didorong oleh *awareness* masyarakat yang semakin tinggi dalam memanfaatkan fitur pembayaran yang bersifat *contactless* untuk meminimalisir risiko penularan COVID-19. Hal ini juga mengindikasikan bahwa *demand* masyarakat untuk melakukan *contactless payment* semakin tinggi.

Hingga triwulan III 2023, terdapat 123.583 *merchant* yang telah mengimplementasikan QRIS sebagai salah satu alternatif kanal pembayaran non tunai (Grafik 5.14). Jumlah tersebut menunjukkan pertumbuhan sebesar 30,3% (yoy) jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 94.850 *merchant*. Secara triwulanan, jumlah *merchant* meningkat sebesar 8,51% (qoq) dari posisi triwulan sebelumnya sebanyak 113.893 *merchant*. Berdasarkan klasifikasi usaha yang telah mengimplementasikan QRIS, *share* terbesar dimiliki oleh usaha mikro (UMI) sebanyak 87.380 *merchant* (70,71%).

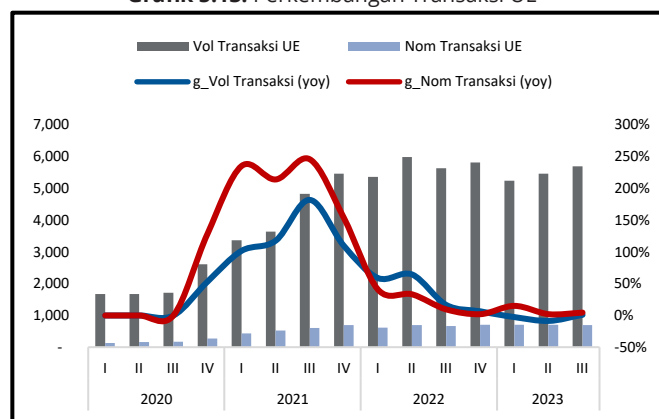
Sementara dari sisi jumlah pengguna, hingga triwulan III 2023 telah terdapat 455.371 pengguna atau bertambah sebanyak 60.629 selama triwulan laporan. Dari sisi volume transaksi, pada triwulan III 2023 terdapat 5,62 Juta transaksi dengan nominal transaksi mencapai Rp233 miliar.

Grafik 5.12. Transaksi Kartu Kredit



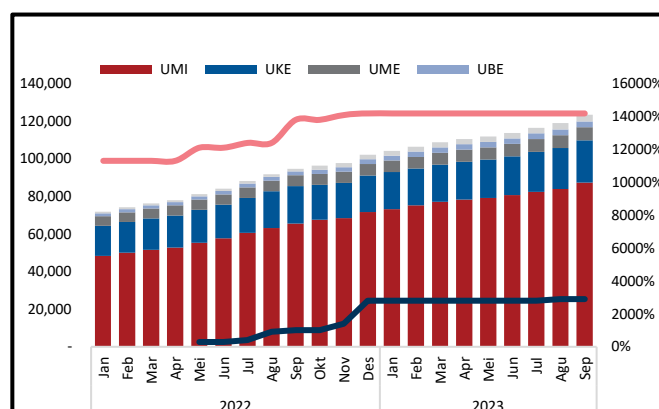
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.13. Perkembangan Transaksi UE



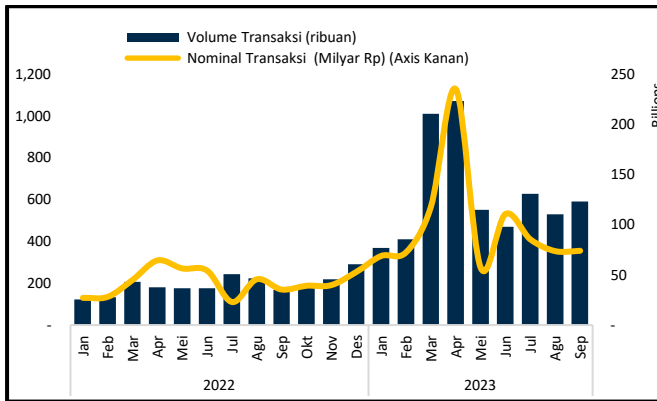
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.14. Pertumbuhan Merchant QRIS



Sumber: PT PTEN, diolah

Grafik 5.15. Pertumbuhan Nominal dan Transaksi QRIS



Sumber: PT PTEN, diolah

5.3. Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB)

Dalam rangka mewujudkan nilai tukar yang stabil guna mendukung terciptanya iklim stabilitas moneter, Bank Indonesia memandang perlunya regulasi yang mengatur pasar keuangan termasuk pasar keuangan valuta asing (valas).

Di bidang sistem pembayaran, Bank Indonesia berperan sebagai regulator yang menjamin terciptanya pasar keuangan valas yang sehat, profesional, dan menerapkan prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT).

Hingga triwulan III 2023, terdapat 16 (enam belas) KUPVA BB berizin di Provinsi Aceh yang melayani pembelian maupun penjualan Uang Kertas Asing (UKA). Sebanyak 8 (delapan) KUPVA BB beroperasi di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, sementara 8 (delapan) lainnya beroperasi di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe.

Pada triwulan laporan, transaksi KUPVA BB berizin di Provinsi Aceh menurun jika dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Transaksi KUPVA BB pada triwulan laporan menurun sebesar 0,93% (yoy) menjadi Rp8,97 miliar dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp9,06 miliar.

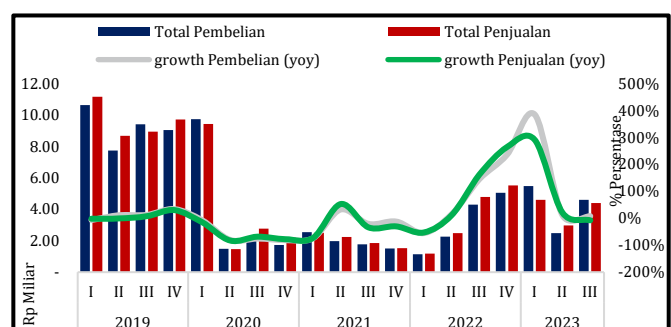
Berdasarkan jenis transaksi, pembelian UKA pada

triwulan laporan mengalami peningkatan sebesar 6,98% (yoy) menjadi Rp4,59 miliar dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp4,29 miliar. Sementara penjualan UKA pada triwulan laporan mengalami penurunan sebesar 8,05% (yoy) menjadi Rp4,38 miliar dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp4,76 miliar (Grafik 5.16).

Pada tanggal 29 September 2022 telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum & HAM Aceh dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) terkait Visa Kunjungan Saat Kedatangan atau *Visa on Arrival* (VoA) yang menjadi tanda kembali dibukanya rute penerbangan Internasional. Sebelumnya dalam menyelenggarakan VoA di seluruh wilayah Indonesia, Kementerian Hukum & HAM hanya bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI), akan tetapi pasca qanun LKS yang diterapkan di provinsi Aceh mengakibatkan BRI tidak lagi dapat memberikan layanan di Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) Provinsi Aceh. Kesiapan mekanisme VoA di Bandara SIM tentu akan memperlancar proses perizinan dari wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Provinsi Aceh.

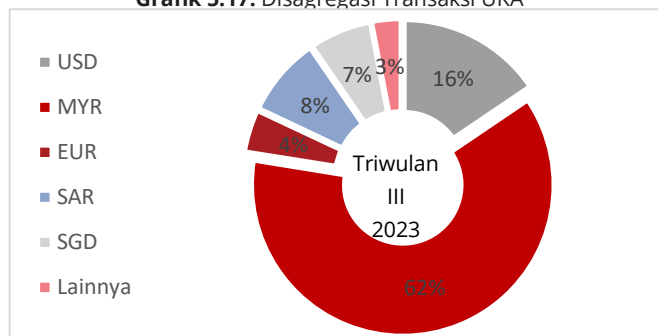
Sejalan dengan telah dibukanya VoA di Bandara SIM, saat ini telah terdapat 3 maskapai penerbangan yang membuka rute internasionalnya di Aceh. Air Asia menjadi maskapai pertama yang membuka rute internasional pasca pandemi COVID 19. Pada 3 Oktober 2022 Air Asia resmi membuka kembali rute Aceh – Kuala Lumpur, dan disusul oleh Batik Air dan Fire Fly yang membuka rute Aceh – Penang. Dan saat ini rute Air Asia dari/ke Kuala Lumpur telah terbang secara reguler setiap harinya.

Grafik 5.16. Transaksi KUPVA BB



Sumber: LKPBU, diolah

Grafik 5.17. Disagregasi Transaksi UKA



Sumber: LKPBU, diolah

Ke depannya transaksi penukaran UKA diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan kembali dibukanya rute penerbangan Internasional oleh beberapa maskapai penerbangan internasional.

Berdasarkan jenis UKA yang diperdagangkan, transaksi KUPVA BB pada triwulan laporan didominasi oleh UKA Ringgit Malaysia (MYR) sebesar 62% dan Dollar Amerika Serikat (USD) sebesar 16% (Grafik 5.17). Dominasi UKA tersebut tidak terlepas dari faktor ekspor impor, pariwisata, pendidikan, dan remitansi TKA yang mendorong terjadinya permintaan dan penawaran terhadap UKA di Provinsi Aceh.

Bank Indonesia bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga telah menyelenggarakan *capacity building* kepada seluruh pedagang valuta asing berizin di Provinsi Aceh. Tujuan dari *capacity building* ini adalah agar seluruh pedagang valuta asing dapat lebih memahami potensi penyalahgunaan valuta asing baik sebagai sarana pencucian uang ataupun pendanaan terorisme sekaligus menjalankan langkah mitigasi risiko tersebut. Selain itu juga dijelaskan bagaimana mekanisme pelaporan apabila terdapat transaksi yang mencurigakan melalui Sistem Informasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Dengan memahami secara lebih dalam terkait risiko yang ada dan bagaimana mekanisme pelaporannya, diharapkan kewaspadaan setiap pedagang valuta asing akan lebih meningkat utamanya mengenai profil *customer*.

5.4. Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan merupakan kondisi di mana

setiap masyarakat memiliki akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya yang terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Tingkat inklusi keuangan yang tinggi akan mendukung pasar keuangan yang semakin dalam dan bervariasi, sehingga dapat menurunkan risiko sistemik dan kerentanan terhadap gejolak (*shock*) dalam perekonomian.

Inklusi keuangan juga mampu berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat lebih mudah mengakses produk dan jasa keuangan seperti tabungan, pembiayaan, dan investasi yang berujung pada peningkatan pendapatan dan taraf hidup masyarakat. Guna mendukung percepatan peningkatan inklusi keuangan, maka kehadiran lembaga keuangan formal di seluruh daerah di Aceh merupakan hal yang harus diperhatikan. Layanan lembaga keuangan formal dimaksud terdiri dari layanan perbankan termasuk ketersediaan mesin ATM dan agen bank serta layanan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) seperti pegadaian, asuransi, koperasi dan lembaga pembiayaan.

Untuk mendukung inklusi keuangan dan pemulihan ekonomi, berbagai kebijakan stimulus pemerintah terus diberikan baik dari sisi fiskal maupun moneter dengan harapan mampu menjadi sentimen positif untuk mendorong konsumsi masyarakat. Dari sisi fiskal, pemerintah mendorong konsumsi masyarakat dengan melanjutkan program bantuan sosial.

Selain itu, Bank Indonesia juga turut berperan aktif pada proses penyaluran implementasi Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT) dan Program Elektronifikasi Pembayaran untuk mendorong inklusi keuangan digital. Peranan Bank Indonesia dalam Program BSNT yang terdiri atas Program Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah mendukung kelancaran penyaluran bantuan secara non tunai. Dukungan diwujudkan dengan menyediakan infrastruktur, sistem, dan mekanisme pembayaran bantuan sosial. Di sisi lain, Bank Indonesia berupaya mendorong masyarakat untuk

bermigrasi menggunakan sarana pembayaran non tunai dengan melakukan percepatan elektronifikasi sistem pembayaran di daerah baik yang sifatnya *People to Government (P to G)*, *Government to People (G to P)*, *People to People (P to P)*, dan *Government to Government (G to G)*.

5.5. Penyaluran Program Sembako dan PKH

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Salah satu langkah yang ditempuh adalah melakukan transformasi penyaluran bantuan sosial, dari tunai menjadi non tunai dengan menggunakan sistem perbankan. Jenis bantuan sosial yang disalurkan secara non tunai antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako. Pemerintah menyalurkan bantuan kepada masyarakat penerima bantuan atau disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). KKS yang juga dikenal dengan Kartu Kombo merupakan instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan tabungan yang digunakan oleh KPM dalam menerima bantuan sosial. Dengan demikian, KPM yang selama ini tidak memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal telah berubah statusnya menjadi *bankable*.

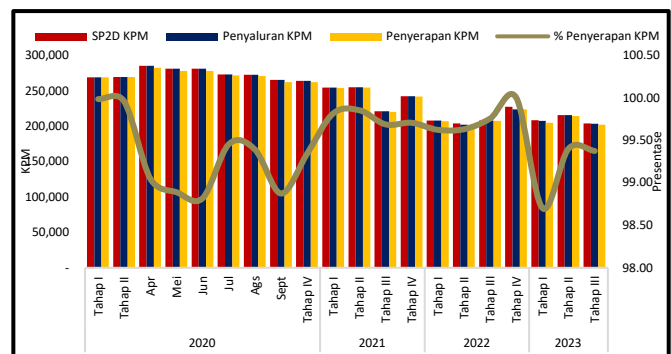
Dalam rangka mendukung kesuksesan perluasan implementasi penyaluran BSNT, Bank Indonesia juga senantiasa melakukan sosialisasi dan monitoring perluasan penyaluran bantuan sosial non tunai di Aceh. Adapun kegiatan monitoring dilaksanakan melalui pemantauan data secara *off site* maupun *on site* terhadap efektivitas/keandalan infrastruktur sistem pembayaran yang digunakan dalam penyaluran BSNT.

PKH disalurkan sebagai bagian dari jaring pengaman sosial yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk menjamin kebutuhan dasar masyarakat miskin di masa pandemi. Pada triwulan laporan, bantuan PKH Tahap III tahun 2023 di Provinsi Aceh

telah disalurkan sebesar 99,87% kepada KPM (Grafik 5.18). Jumlah KPM yang telah melakukan penyerapan untuk Tahap III tercatat sebanyak 202.027 atau telah mencapai 99,38% dari target jumlah penerima sebanyak 203.565 KPM.

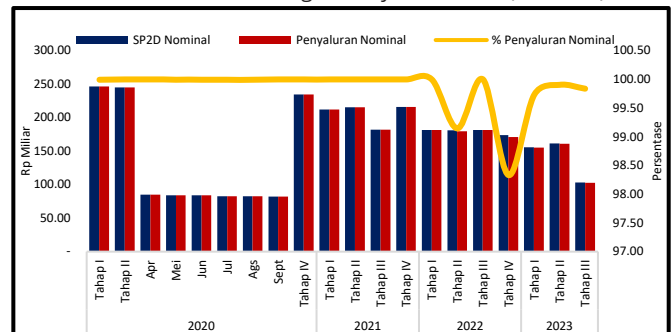
Di sisi nominal, jumlah bantuan per tahap yang disalurkan selalu berfluktuasi menyesuaikan dengan data KPM yang dimutakhirkan secara berkala oleh Kemensos RI. Pada triwulan III 2023, nominal bantuan yang disalurkan sebesar Rp102,57 miliar dengan persentase nominal penyaluran PKH telah mencapai 99,84% (Grafik 5.19). Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan triwulan II 2023 yaitu Rp160,95 miliar.

Grafik 5.18. Perkembangan Penyaluran PKH (KPM)



Sumber: Himbara, diolah

Grafik 5.19. Perkembangan Penyaluran PKH (Nominal)



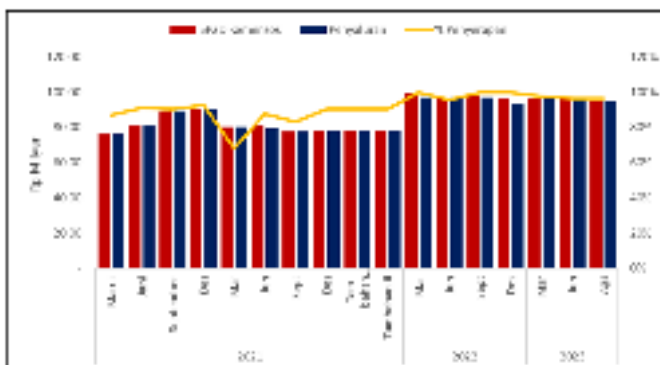
Sumber: Himbara, diolah

Sementara itu, penyaluran bantuan Program Sembako telah diperluas ke seluruh Kab/Kota di Provinsi Aceh. Nilai bantuan program sembako yang diterima masyarakat pada awalnya ditetapkan sebesar Rp150.000/bulan/KPM. Namun berdasarkan keputusan Presiden dalam rapat terbatas penanggulangan pandemi COVID-19, nilai bantuan dinaikkan menjadi Rp200.000/bulan/KPM hingga triwulan laporan. Dalam rangka membantu meringankan dampak pandemi COVID-19, pada bulan Desember 2021 Pemerintah memberikan

tambahan 2 (dua) bulan bantuan Program Sembako. Harapannya keluarga penerima manfaat mampu meningkatkan konsumsi ditengah pandemi COVID-19 yang masih melanda.

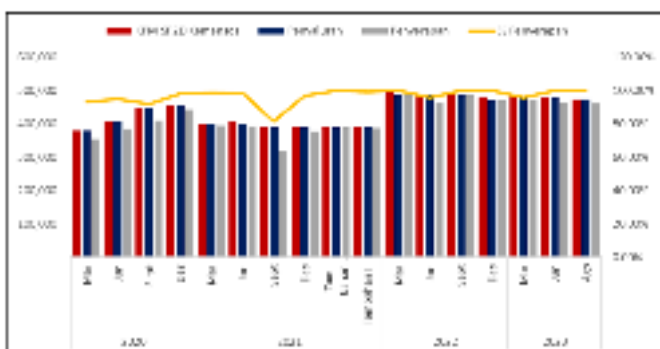
Sesuai hasil Rapat Tingkat Menteri (RTM) 17 Februari 2022 sebagai tindak lanjut Rapat Terbatas (Ratas) 15 Februari 2022, seluruh penyaluran Program Sembako disalurkan melalui PT Pos secara tunai/*cash* khususnya untuk penyaluran Januari hingga Maret 2022 yang dimulai dari Februari 2022 dan disalurkan 3 (tiga) bulan sekaligus per KPM. Untuk penyaluran bulan berikutnya, pihak penyalur akan dievaluasi dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kemenko PMK dan Kemensos. Sementara untuk tahun 2023 bantuan sembako disalurkan melalui BSI dengan proporsi sebesar 96,54%, sementara sisanya disalurkan melalui PT Pos.

Grafik 5.20. Perkembangan Program Sembako (Nominal)



Sumber: Himbara, diolah

Grafik 5.21. Perkembangan Program Sembako (KPM)



Sumber: Himbara, diolah

Sementara itu, jumlah KPM program sembako pada triwulan laporan mengalami penurunan menjadi 474 ribu KPM dari jumlah KPM posisi Juni 2023 sebanyak 474 ribu KPM (Grafik 5.21).

5.6. Elektronifikasi Sistem Pembayaran

Elektronifikasi sistem pembayaran merupakan serangkaian upaya untuk mengubah pembayaran yang dilakukan secara tunai menjadi non tunai. Elektronifikasi menjadi bagian program strategis Bank Indonesia yang bertujuan untuk mendorong transaksi keuangan secara elektronik agar mampu meningkatkan keuangan inklusif yang terarah, efisien, dan sinergis sekaligus mendukung percepatan ekonomi digital di Indonesia.

Sasaran utama program elektronifikasi adalah penciptaan ekosistem non tunai yang terintegrasi melalui elektronifikasi transaksi pemerintah, transaksi pembayaran ritel dan nilai besar, transaksi fasilitas dan transportasi umum, serta elektronifikasi di destinasi pariwisata. Instrumen yang dapat digunakan meliputi Uang Elektronik (*server dan chip based*), kartu kredit, dan kartu ATM/debit.

Pada triwulan laporan, Bank Indonesia telah melakukan beberapa kegiatan untuk meningkatkan akseptasi masyarakat dan *stakeholders* terhadap berbagai fitur pembayaran non tunai, khususnya melalui kanal QRIS. Meuseuraya Festival merupakan salah satu kegiatan yang diselenggarakan Bank Indonesia untuk mendorong penggunaan sistem pembayaran non tunai.

Meuseuraya Festival diselenggarakan dengan kolaborasi dengan berbagai pihak. Dari sisi pemerintah, terdapat booth pembayaran pajak kendaraan bermotor yang telah mengimplementasikan sistem pembayaran non tunai. Dari sisi transportasi, disediakan becak QRIS yang memudahkan transportasi antara dua venue utama kegiatan yaitu Balai Meuseuraya Aceh dan Taman Ratu Safiatuddin. Dari sisi komunitas olahraga sepeda, diselenggarakan QRIS Fun Bike dimana seluruh peserta diwajibkan untuk melakukan registrasi menggunakan QRIS dalam pelaksanaannya.

Pada kegiatan tersebut juga diresmikan penggunaan sistem pembayaran non tunai di

Pelabuhan Ulee Lheue. Saat ini pelabuhan Ulee Lheue telah mewajibkan penggunaan Uang Elektronik Chip Based bagi seluruh masyarakat yang akan memasuki kawasan. Ini merupakan kolaborasi aktif dari Dinas Perhubungan Aceh, Perbankan, dan Bank Indonesia guna mendukung terciptanya ekosistem digital di pemerintah daerah Aceh.

Kegiatan selanjutnya adalah Pekan QRIS Nasional (PQN). PQN diselenggarakan di Car Free Day Banda Aceh dengan berbagai kegiatan seperti, senam jantung sehat, lomba kebanksentralan tingkat Sekolah Dasar, dan expo UMKM. Tentunya seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan dengan mendorong penggunaan QRIS di setiap transaksinya.

Seluruh kegiatan di atas merupakan langkah proaktif Bank Indonesia bersinergi dengan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) untuk memfasilitasi pelaku UMKM ataupun *stakeholders* lainnya dalam rangka meningkatkan *supply side* QRIS melalui akuisisi *merchant* QRIS. Di samping itu, Bank Indonesia bersama Perbankan dan Pemda juga terus melakukan berbagai program sosialisasi

dan edukasi untuk meningkatkan *user experience* masyarakat dalam menggunakan QRIS sehingga *demand side* masyarakat untuk menggunakan QRIS juga terus bertumbuh.

Bank Indonesia juga secara proaktif melakukan koordinasi bersama dengan Pemerintah Provinsi, Kota, dan Kabupaten terkait dengan Tim Perluasan dan Percepatan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Pembentukan TP2DD merupakan amanat Keputusan Presiden No 3 Tahun 2021 tentang Satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah yang bertujuan untuk mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan tata kelola keuangan yang terintegrasi. Diharapkan pembentukan TP2DD akan menjadi katalis di daerah untuk mendorong perluasan elektronifikasi sarana/fasilitas umum, termasuk pendapatan daerah baik pajak dan retribusi.



BAB VI

KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) periode berjalan mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini sejalan dengan tingkat kemiskinan yang menunjukkan penurunan persentase. Namun demikian, dibandingkan dengan seluruh provinsi di Sumatera, TPT Aceh masih berada pada urutan kedua, sedangkan kemiskinan masih berada pada peringkat pertama.

6.1. Ketenagakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Aceh menurun. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Aceh pada Agustus 2023 tercatat 6,03%, mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 6,17%. Sementara itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tercatat sebesar 64,77%, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 63,50%. Hal ini menunjukkan semakin tinggi pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam satu perekonomian. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan kontribusi penyerapan tenaga kerja dengan persentase terbesar adalah Lapangan usaha (LU) sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Konstruksi, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum,

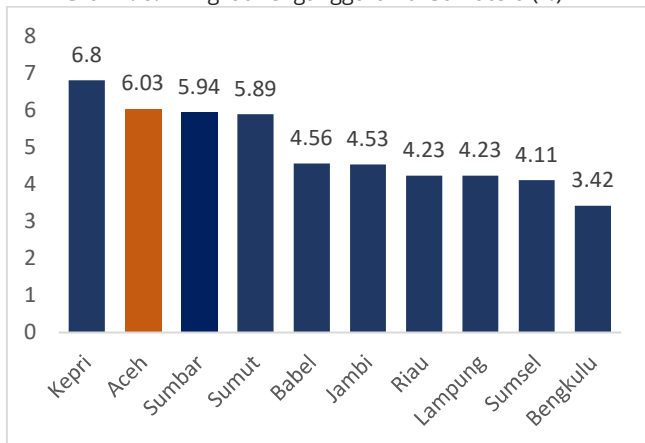
Tabel 6. 1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

	TINGKAT PENGANGGURAN %	
	Agustus 2022	6,17%
	Agustus 2023	6,03%

Sumber: BPS, diolah

Penurunan TPT disebabkan oleh meningkatnya jumlah angkatan kerja yang disertai dengan peningkatan jumlah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan Angkatan kerja, yaitu mencapai 2,6 juta orang (64,77%).

Grafik. 6.1 Tingkat Pengangguran di Sumatera (%)



Sumber: BPS, diolah

Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Sumatera, Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh menduduki peringkat kedua tertinggi setelah Provinsi Kepulauan Riau.

Perkembangan ketenagakerjaan di Provinsi Aceh diproyeksikan akan semakin membaik mengingat akan dilaksanakannya PON Aceh – Sumut Tahun 2024 yang akan menyerap tenaga kerja dari sektor konstruksi untuk perbaikan dan pembangunan *venue* pertandingan olahraga, serta bidang lainnya yang mendukung kegiatan nasional tersebut. Selain itu, kondisi *el-nino* yang diestimasi selesai di tahun 2024 akan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian, perhutanan, dan perikanan.

Tabel 6. 2. Perkembangan TPT

PENGANGGURAN	2022	2023
	Agustus	Agustus
Jumlah Angkatan Kerja (orang, dalam ribuan)		
Bekerja	2.395	2.447
Pengangguran	158	157
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		
Persentase TPAK (%)	63,50	64,77
Tingkat Pengangguran Terbuka		
TPT (%)	6,17	6,03

Sumber: BPS, diolah

Tabel 6.3. Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor

SEKTOR	Agustus 2023 (%)
Pertanian, Kehutanan & Perikanan	38,68
Perdagangan Besar & Eceran	14,65
Industri Pengolahan	10,03
Konstruksi	7,30
Jasa Pendidikan	7,12
Administrasi Pemerintahan	6,54
Akomodasi dan Makan Minum	5,58
Jasa Lainnya	3,56

Sumber: BPS, diolah

Lapangan usaha (LU) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja dengan porsi terbesar, yaitu mencapai 38,68%. Selanjutnya sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

(14,65%), Industri Pengolahan (10,03%), Kontruksi (7,30%), dan sektor Pendidikan (7,12%).

Tenaga kerja di Provinsi Aceh saat ini didominasi oleh tenaga kerja dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas. Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada Agustus 2023, penduduk bekerja masih didominasi oleh tamatan Sekolah Menengah Atas yaitu sebesar 32,65%. Sementara itu, penduduk bekerja tamatan Sekolah Dasar ke Bawah sebesar 26,08%, SMP sebesar 19,92%, Universitas sebesar 13,13%, SMK sebesar 4,69%, dan Diploma sebesar 3,53%. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama dengan Agustus 2022.

Tabel 6.4. Tenaga Kerja Menurut Pendidikan (%)

Pendidikan Tertinggi	Agustus 2022	Agustus 2023
Sekolah Menengah Atas	31,07	32,65
Sekolah Dasar ke Bawah	26,19	26,08
Sekolah Menengah Pertama	19,95	19,92
Diploma IV, S1, S2, S3	12,04	13,13
Sekolah Menengah Kejuruan	4,40	4,69
Diploma I/II/III	3,35	3,53

Sumber: BPS, diolah

Tenaga kerja berdasarkan pekerjaan didominasi status pekerjaan Buruh/Karyawan/Pegawai dengan porsi sebesar 35,92%. Sementara itu, status pekerjaan dengan porsi terkecil, yaitu berstatus Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar sebanyak 4,22%. Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka yang berusaha dengan dibantu buruh tetap/dibayar dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal. Pada Agustus 2023, penduduk yang bekerja di kegiatan informal sebanyak 59,86%, sedangkan kegiatan formal sebanyak 40,14% di mana keduanya menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Dibandingkan Agustus 2022,

persentase penduduk bekerja pada kegiatan formal mengalami kenaikan sebesar 1,59%.

Tabel 6.5. Tenaga Kerja Berdasarkan Pekerjaan

Status Pekerjaan	Agustus 2022	Agustus 2023
	Porsi (%)	Porsi (%)
Buruh/Karyawan/Pegawai	35,20%	35,92%
Berusaha Sendiri	25,23%	25,61%
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	13,29%	13,21%
Pekerja Keluarga	12,53%	11,58%
Pekerja bebas di pertanian	6,11%	4,79%
Pekerja bebas di nonpertanian	4,28%	4,67%
Berusaha dibantu buruh tetap	3,35%	4,22%

Sumber: BPS, diolah

Nilai Tukar Petani⁴ (NTP) pada Oktober 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan sebelumnya. Pada triwulan Oktober 2023, NTP tercatat sebesar 117,51 atau mengalami penurunan dari bulan sebelumnya sebesar 0,45%. Hal ini menunjukkan adanya penurunan tingkat daya beli petani. Nilai yang melampaui 100 pada periode laporan menunjukkan bahwa penerimaan petani terhadap hasil produksi lebih tinggi dibandingkan pengeluaran petani. Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) subsektor gabungan pada Oktober 2023 tercatat sebesar 117,33 atau mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 118,18. NTUP menggambarkan perbandingan antara Indeks Harga yang diperoleh Petani dengan Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM). NTUP di atas 100 menunjukkan bahwa petani berada dalam posisi surplus.

Tabel 6.6. Nilai Tukar Petani



NILAI TUKAR PETANI (NTP)

September 2023	118,18
Oktober 2023	117,33 ▼

Sumber: BPS, diolah

⁴ Rasio antara indeks harga diterima dan harga dibayar petani

6.2. Kemiskinan

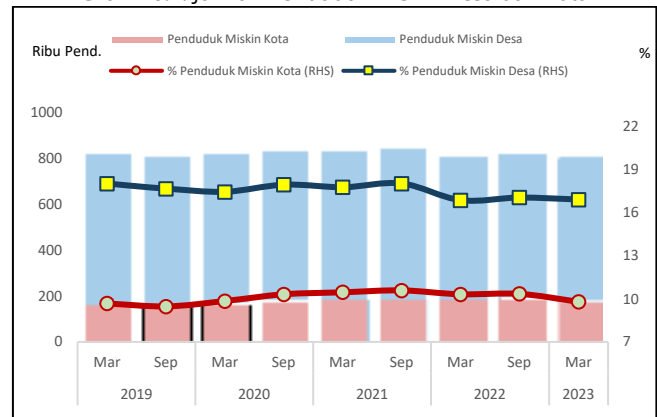
Berdasarkan data terakhir, persentase kemiskinan pada Maret 2023 tercatat sebesar **14,45%**, mengalami penurunan dibandingkan Maret 2022 sebesar **14,64%**. Penurunan persentase penduduk miskin didorong oleh penurunan baik di perdesaan maupun perkotaan, di mana persentase penduduk miskin di perdesaan dan perkotaan menurun masing-masing dari 16,87% dan 10,3% pada periode sebelumnya, menjadi 16,92% dan 9,79% (yoy).

Secara kuantitas, jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh pada posisi Maret 2023 sebanyak 806,75 ribu jiwa, lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebanyak 806,82 ribu jiwa. Jumlah penduduk miskin di perdesaan meningkat sebesar 0,66% (yoy) dari sebelumnya 613,49 ribu jiwa pada Maret 2022 menjadi 617,56 ribu jiwa pada Maret 2023. Sementara itu, jumlah penduduk miskin di perkotaan mengalami penurunan terbatas sebesar 2,15% (yoy), dari sebelumnya 193,32 ribu jiwa pada Maret 2022 menjadi 189,16 ribu jiwa pada Maret 2023.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh semakin membaik, perlahan meningkatkan optimisme pemulihan pasca pandemi yang diharapkan dapat terus menurunkan angka kemiskinan. Berdasarkan hasil Survei Konsumen Bank Indonesia per Juli 2023, Indeks Penghasilan dan Ketersediaan Lapangan Pekerjaan masih berada di atas 100, yaitu 123,5. Hal ini mengindikasikan masyarakat optimis akan pendapatan dan ketersediaan lapangan pekerjaan di saat ini.

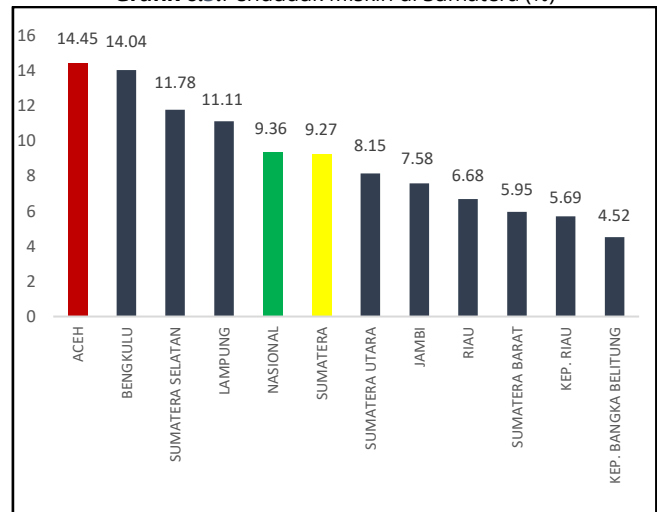
Data tingkat kemiskinan pada Maret 2023 menunjukkan Aceh masih menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Sumatera dengan porsi sebesar 14,45%. Nilai tersebut lebih tinggi dibanding rata-rata tingkat kemiskinan di Sumatera (9,27%) dan Nasional (9,36%).

Grafik 6.2. Jumlah Penduduk Miskin Desa dan Kota



Sumber: BPS, diolah

Grafik 6.3. Penduduk Miskin di Sumatera (%)



Sumber: BPS, diolah

Penurunan persentase kemiskinan juga turut memengaruhi sebaran garis kemiskinan di Provinsi Aceh. Hasil survei di Provinsi Aceh, pada periode September 2022 – Maret 2023, garis kemiskinan mengalami perubahan sebesar 1,66% sehingga pendapatan per kapita per bulan menjadi Rp627.534,- dari sebelumnya sebesar Rp617.293,- per kapita per bulan. Kontribusi komponen makanan masih memberikan andil terbesar terhadap Nilai Garis Kemiskinan baik di Perkotaan maupun Perdesaan yakni sebesar Rp475.838,- per kapita per bulan sementara komponen bukan makanan sebesar Rp151.689,- per kapita per bulan.

Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK) yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat bahwa peranan komoditas makanan sebesar 74,36% di perkotaan dan 76,68% di perdesaan yang terdiri dari

perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Beberapa komoditas utama yang memberikan sumbangan besar terhadap kenaikan garis kemiskinan baik di perdesaan maupun di perkotaan yaitu beras, rokok kretek filter, tongkol/tuna, telur ayam ras, dan kue basah. Sementara peranan komoditas bukan makanan berkontribusi sebesar 25,64% di perkotaan dan 23,32% di perdesaan.

Selain jumlah dan persentase penduduk miskin, terdapat hal lain yang perlu diperhatikan yaitu seberapa besar jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan (tingkat kedalaman) yang disebut dengan P1 dan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin (tingkat keparahan) yang disebut dengan P2.

Tabel 6.7. Indeks Kedalaman (P1) dan Keparahannya (P2) Kemiskinan

KEMISKINAN (%)		
SEPTEMBER 2022	14,75	▼
MARET 2023	14,45	
INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P1)		
MARET 2022	2,48	▼
MARET 2023	2,76	
INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P2)		
MARET 2022	0,61	▼
MARET 2023	0,77	

Sumber: Data BPS, diolah

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) pada periode Maret 2023 tercatat mengalami kenaikan dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya (yoy). P1 mengalami kenaikan dari 2,48 pada Maret 2022 menjadi 2,76 pada Maret 2023. Begitu pula dengan P2 yang mengalami kenaikan setelah sebelumnya 0,61 pada Maret 2022 menjadi 0,77 pada Maret 2023. Naiknya nilai Indeks Kedalaman kemiskinan ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin menjauhi garis kemiskinan. Begitu juga dengan kondisi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin cenderung semakin melebar.

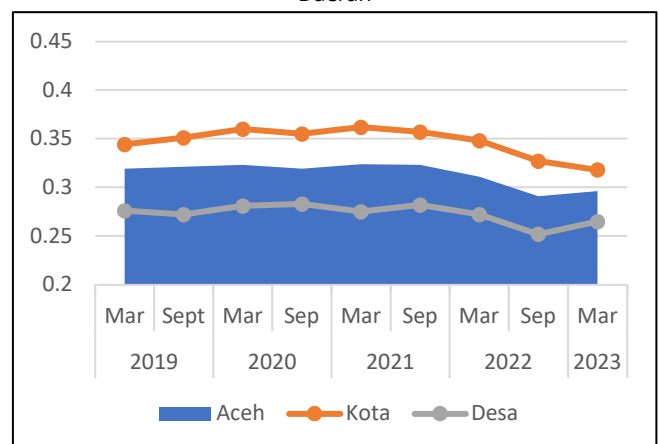
Tabel 6.8. Indeks Kemiskinan (P1 dan P2)

Daerah	2022		2023	
	MARET		MARET	
	P1	P2	P1	P2
Perkotaan	1,62	0,37	1,93	0,54
Perdesaan		0,73	3,20	0,89
Gabungan	2,48	0,61	2,76	0,77

Sumber: Data BPS, diolah

Dalam pengukuran ketimpangan/kesenjangan pengeluaran penduduk, digunakan indikator Rasio Gini⁵. Berdasarkan daerah, Rasio Gini pada perkotaan pada Maret 2023 sebesar 0,318, sedangkan pada perdesaan sebesar 0,265. Terjadi penurunan rasio di perkotaan dan perdesaan pada periode Maret 2023 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal tersebut mendorong secara keseluruhan Rasio Gini Provinsi Aceh mengalami penurunan menjadi sebesar 0,296 pada Maret 2023 dari sebesar 0,311 pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Grafik 6.4. Perkembangan Rasio Gini di Provinsi Aceh Menurut Daerah



Sumber: BPS, diolah

⁵Nilai Rasio Gini berkisar antara 0-1. Semakin besar nilai menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi



BAB VII

PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

Kinerja perekonomian Aceh pada tahun 2023 diperkirakan tumbuh 4,03%-4,53% (yoy) atau berpotensi lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya (4,21%, yoy). Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kinerja konsumsi pemerintah yang diperkirakan terakselerasi seiring dengan pertumbuhan yang rendah pada periode sebelumnya. Laju inflasi tahun 2023 diperkirakan berada di dalam batas bawah sasaran inflasi nasional sebesar $3\pm 1\%$, seiring dengan potensi perlambatan inflasi pada bahan-bahan makanan.

7.1. Prospek Makroekonomi

Kinerja pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2023 diperkirakan akan tumbuh positif meskipun dengan kecenderungan lebih rendah dibandingkan tahun 2022. Berdasarkan *World Economic Outlook "Navigating Global Divergences"* oleh International Monetary Fund (IMF) pada bulan Oktober 2023, perekonomian global tahun 2023 diperkirakan akan tumbuh sebesar 3,0% (yoy) (Tabel 7.1). Pertumbuhan ekonomi untuk negara maju dan berkembang diperkirakan mengalami perlambatan, meskipun risiko lebih berimbang akibat Amerika Serikat yang lebih kuat dari prakiraan, dan Euro Area yang lebih lambat dari prakiraan.

Tabel 7.1 *Global Economic Growth Outlook (%yoy)*

Wilayah	2022	2023*
World Output	3,5	3,0
Advance Economies	2,6	1,5
United States	2,1	2,1
Euro Area	3,3	0,7
Japan	1,0	2,0
United Kingdom	4,1	0,5
Emerging Market	4,1	4,0
China	3,0	5,0
India	7,2	6,3

Sumber: International Monetary Fund (IMF)

Risiko pada prakiraan berada pada posisi yang lebih berimbang dibandingkan 6 bulan yang lalu. Hal ini didorong oleh ketegangan yang lebih rendah pada batas hutang Amerika Serikat, serta aksi otoritas Amerika Serikat yang akomodatif terhadap guncangan finansial. Kemungkinan untuk *hard landing* pada ekonomi global telah mereda, meskipun keseimbangan risiko tetap lebih condong ke bawah. Terdapat potensi sector property Tiongkok dapat semakin dalam, dengan potensi *spillovers* pada ekonomi global terutama pada pelaku eksportir komoditas. Ekspektasi inflasi jangka pendek telah meningkat yang berpotensi untuk memberikan kontribusi pada tekanan inflasi inti yang persisten, dan membutuhkan kebijakan

suku bunga yang lebih agresif daripada yang sudah diperkirakan. Kendala cuaca dan kejutan pada geopolitik dapat menyebabkan kembali kenaikan harga bahan pangan dan energi ke level yang lebih tinggi. Geopolitik yang lebih intens dapat menghambat pergerakan komoditas dunia, yang meningkatkan volatilitas harga dan menghambat transisi kepada *green energy*.

Perekonomian Indonesia diperkirakan tetap tumbuh baik dan berdaya tahan terhadap dampak rambatan global. Pada triwulan III 2023, pertumbuhan ekonomi ditopang oleh konsumsi swasta, termasuk konsumsi generasi muda, yang meningkat sejalan peningkatan konsumsi di sector jasa dan keyakinan konsumen yang masih tinggi. Pertumbuhan investasi tetap baik didorong berlanjutnya penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN). Sementara itu, pertumbuhan riil ekspor barang menurun seiring pelemahan permintaan dari negara mitra dagang utama, dan penurunan harga komoditas, sedangkan ekspor jasa tetap tumbuh tinggi sejalan dengan kenaikan jumlah wisatawan mancanegara. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi diperkirakan dalam kisaran 4,5-5,3% pada 2023 dan meningkat pada 2024. Surplus neraca perdagangan masih berlanjut pada triwulan III 2023 sebesar 7,8 miliar dolar AS dan menopang prospek transaksi berjalan tetap sehat.

Pertumbuhan ekonomi Aceh pada tahun 2023 diperkirakan tumbuh pada kisaran 4,03%-4,53% (yoy), cenderung lebih tinggi dibanding dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang tumbuh 4,21% (yoy). Hal ini didorong oleh pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat yang tecermin dari peningkatan mobilitas seiring dengan meredanya pandemi COVID-19. Dari sisi pengeluaran, perbaikan kinerja ekonomi Aceh diperkirakan didorong oleh komponen konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB). Sedangkan dari sisi Lapangan Usaha (LU), laju pertumbuhan ekonomi diyakini akan ditopang oleh pertanian, kehutanan dan perikanan, serta perdagangan besar dan

eceran.

Pertumbuhan komponen konsumsi rumah tangga dipengaruhi oleh meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat. Langkah pemerintah yang telah mencabut kebijakan pembatasan sosial (PPKM) dan status pandemi semakin mendorong aktivitas dan mobilitas masyarakat yang akan diikuti oleh peningkatan permintaan. Selain itu, berdasarkan Survei Konsumen Bank Indonesia Provinsi Aceh pada Oktober 2023 mengindikasikan bahwa optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap mengalami peningkatan. Hal tersebut didukung oleh optimisme perekonomian secara nasional. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada bulan Oktober 2023 tercatat sebesar 122,7 meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 120,2. Lebih lanjut, Nilai Tukar Petani (NTP) pada Oktober 2023 tercatat sebesar 117,51 yang dipengaruhi oleh naiknya harga gabah kualitas GKP pada tingkat petani dan penggilingan. Angka tersebut masih melanjutkan tren perbaikan dari triwulan II yang tercatat sebesar 112,65.

Di sisi lain, kinerja komponen konsumsi pemerintah pada 2023 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun terdapat pengurangan pada komponen pendapatan. Berdasarkan informasi dari Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Aceh, terdapat penurunan pagu anggaran, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN. Berdasarkan Qanun No.6 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2023, rencana anggaran belanja Aceh tahun 2023 sebesar Rp11,09 triliun, lebih rendah dibandingkan anggaran belanja pada tahun 2022 sebesar Rp16,17 triliun. Penurunan anggaran APBD 2023 tersebut disebabkan oleh menurunnya penerimaan besaran dana otonomi khusus (Otsus) dari Rp7,5T pada tahun 2022 menjadi Rp3,9T pada tahun 2023 atau setara dengan 1% plafon DAU Nasional. Penurunan Otsus tersebut sesuai dengan MoU Helsinki di mana mulai tahun 2023 s.d. 2027, besaran dana Otsus berkurang menjadi

1% plafon DAU Nasional. Defisit anggaran tahun 2023 diperkirakan menurun menjadi Rp0,91 triliun dari sebelumnya sebesar Rp2,82 triliun pada tahun 2022.

Di sisi lain, pada tahun 2023 diperkirakan intensitas serta nominal *refocusing* tidak setinggi pada tahun 2022 sehingga diperkirakan mendorong kinerja pada tahun 2023. Meskipun demikian, berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), realisasi belanja negara pada Triwulan III 2023 lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Terdapat deviasi sebesar minus Rp4.090 miliar. Secara persentase, pendapatan negara terealisasi sebesar 64,98%, sementara belanja negara terealisasi sebesar 59,99%. Hal ini didorong oleh telah berlalunya THR dan gaji ke-13 yang menahan realisasi belanja pada triwulan III 2023. Meskipun demikian, proyek-proyek strategis nasional yang masih berjalan mampu menjaga realisasi belanja negara.

Kinerja PMTB/investasi pada tahun 2023 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan tahun 2022. Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh, target realisasi investasi tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 47,05% menjadi Rp10,0 triliun dari sebelumnya Rp6,8 triliun di tahun 2022. Meskipun demikian, realisasi investasi PMA dan PMDN pada triwulan III 2023 hanya mencapai Rp2,17 triliun, turun sebesar -69,55% (yoy). Namun, secara keseluruhan tahun hingga triwulan III 2023 (*year-to-date*), investasi di Aceh telah mengalami pertumbuhan 102,62%. Pada tahun 2023, realisasi investasi didorong oleh proyek PLTU 3 dan 4 di Nagan Raya, pabrik pupuk NPK oleh PT Pupuk Iskandar Muda, PLTA 1 dan 2 di Peusangan, Jalan tol trans sumatera (JTTS) ruas Banda Aceh – Sigli, Pabrik CPO di Aceh Barat Daya (baru diresmikan PT Mon Jambe) serta Kawasan Industri/Berikat di Krueng Raya yang sedang dalam tahap konstruksi.

Sementara itu, ekspor luar negeri secara keseluruhan tahun 2023 diperkirakan mengalami

penurunan jika dibandingkan dengan kinerja pada tahun 2022 yang tumbuh sebesar 32,17% (yoy). Hal ini diperkirakan didorong oleh normalisasi harga komoditas ekspor utama Aceh seperti batu bara, kopi, dan minyak kelapa sawit. Berdasarkan proyeksi harga komoditas dunia yang dirilis oleh Bank Dunia, harga batu bara tahun 2023 berpotensi mengalami penurunan menjadi USD 175/ton dari USD 344/ton pada tahun 2022. Harga kopi arabika juga diprediksi mengalami penurunan menjadi USD 4,45/kg dari USD 5,63/kg pada tahun 2022. Lebih lanjut, harga CPO diproyeksi mengalami normalisasi menjadi USD 1.070/ton dari USD 1.276/ton pada tahun 2022.

Dari sisi LU, perkiraan akselerasi pertumbuhan ekonomi tahun 2023 utamanya didorong oleh positifnya kinerja LU Konstruksi serta LU Pertanian. Secara umum, perkiraan kinerja positif pada LU Konstruksi didukung oleh kegiatan konstruksi yang cukup tinggi di Aceh seiring dengan meningkatnya anggaran bendungan Aceh sebesar 452,38% (yoy), dari Rp444,02 Miliar pada tahun 2022 menjadi Rp2.452,66 Miliar pada tahun 2023.

Lebih lanjut, kondisi cuaca yang lebih baik pada tahun 2023 juga dapat mendukung LU Pertanian. Kendala pemupukan yang terjadi di tahun 2022 akibat kenaikan harga diperkirakan tidak kembali terjadi di tahun 2023. Meskipun demikian, masih terdapat risiko penahan pertumbuhan LU Pertanian akibat proses pemupukan yang kurang optimal pada tahun 2022 sehingga berdampak pada produksi TBS yang diperkirakan lebih rendah pada tahun 2023. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Aceh juga didorong oleh membaiknya perekonomian dunia serta normalisasi aktivitas masyarakat sejalan dengan langkah pemerintah melakukan vaksinasi masal COVID-19 dan booster yang berlanjut di tahun 2023. Hal ini juga didukung oleh telah dicabutnya kebijakan pembatasan sosial (PPKM) dan status pandemi pada tahun 2023.

Di sisi lain, faktor penahan pertumbuhan berasal dari LU Pertambangan dan Penggalian, serta LU Industri Pengolahan. LU Pertambangan diperkirakan melambat akibat normalisasi harga

komoditas pasca COVID-19. LU Industri Pengolahan yang baru memiliki Pabrik Pupuk NPK milik PT. Pupuk Iskandar Muda belum mampu mendorong akselerasi kinerja industri. Industri juga tertahan oleh performa *lifting* migas yang kurang baik di Aceh seiring dengan harga migas yang lebih rendah dibandingkan tahun 2022.

Kinerja LU Pertambangan dan Penggalian diperkirakan akan lebih tertahan dibandingkan tahun 2022 yang tumbuh sebesar 4,30% (yoy). Prospek sektor pertambangan dan penggalian dari sisi migas, produksi diperkirakan tertahan akibat harga minyak dan gas yang lebih rendah pada tahun 2023 seiring rendahnya permintaan dunia terhadap komoditas tersebut. Meskipun demikian, kegiatan eksplorasi minyak dan gas masih dilakukan di laut Andaman atau 40 mil dari garis pantai Pidie Jaya, Pidie, dan Bireuen. Sementara itu, larangan ekspor komoditas batubara yang sudah dicabut berpotensi mendukung pertumbuhan produksi batu bara.

Selanjutnya, LU Perdagangan diperkirakan akan terakselerasi lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang tumbuh sebesar 6,36% (yoy). Perkiraan pertumbuhan yang masih positif didukung oleh pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat yang tecermin dari peningkatan mobilitas akibat pelonggaran pembatasan sosial dan dicabutnya status pandemi. Meskipun demikian, terdapat faktor penahan pertumbuhan yang berasal dari penghapusan insentif PPnBM pada akhir tahun 2022 sehingga berpotensi menghambat LU Perdagangan pada tahun 2023.

Sementara dari LU Transportasi dan Pergudangan, diperkirakan akan melanjutkan pertumbuhan dari tahun lalu. Pada tahun 2022, LU Transportasi dan Pergudangan mampu tumbuh sebesar 7,24% (yoy). Kinerja yang diperkirakan positif pada 2023 sejalan dengan peningkatan mobilitas masyarakat pasca dicabutnya peraturan PPKM dan tren infeksi COVID-19 yang terus melandai di Aceh. Dari sisi angkutan udara, tren peningkatan penerbangan domestik diperkirakan akan masih berlanjut di tahun 2023, didukung dengan pelonggaran syarat

penerbangan udara. Lebih lanjut, pembukaan rute penerbangan Banda Aceh - Medan oleh Citilink, Airasia, dan Lion serta tersedianya rute penerbangan internasional dari Banda Aceh dengan tujuan Penang dan Kuala Lumpur juga mendukung kinerja LU transportasi. Dari sisi pergudangan, meningkatnya tren belanja *online* dan pengiriman kargo diperkirakan dapat mendorong industri kargo dan pergudangan. Hal ini juga terkonfirmasi dari laporan salah satu pelaku bisnis pengiriman kargo dan pergudangan yang menyatakan bahwa terjadi peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2022 dan diperkirakan akan berlanjut di tahun 2023.

Prospek pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 diperkirakan berpotensi sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 meskipun terdapat risiko perlambatan ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi Aceh diperkirakan berada dalam rentang 4,03%-4,53% (yoy). Dari sisi permintaan, Konsumsi Rumah Tangga diperkirakan masih akan tumbuh, meskipun berpotensi tertahan akibat kenaikan suku bunga acuan. Dari sisi Konsumsi Pemerintah, diperkirakan masih akan tumbuh seiring dengan realisasi yang cukup baik hingga triwulan III, serta upaya untuk mengurangi SILPA di akhir tahun, meskipun alokasi dana Otsus turun menjadi 1% plafon DAU Nasional di tahun 2023. Selanjutnya, komponen Investasi/PMTB diperkirakan akan lebih tinggi, disebabkan oleh proyek pemerintah melalui PSN yang memiliki *timeline* diselesaikan pada tahun 2023. Meskipun berdasarkan keterangan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) tidak ada rencana Proyek Strategis Nasional (PSN) baru di 2023, melainkan lebih fokus pada penyelesaian proyek *existing*.

Prospek pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 diperkirakan akan sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2023, seiring dengan pemulihan ekonomi global dan domestik. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada dalam rentang 4,28-4,78%. Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga diperkirakan akan tetap kuat seiring dengan rendahnya risiko inflasi serta rendahnya risiko kenaikan suku bunga acuan. Dari sisi Konsumsi

Pemerintah, terdapat risiko penurunan akibat lebih rendahnya alokasi dana otonomi khusus, serta SILPA yang sudah lebih rendah. Selanjutnya dari komponen Investasi/PMTB diperkirakan akan stabil, seiring dengan proyek-proyek pemerintah (PSN) yang memiliki target penyelesaian di 2024. Menurut Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), direncanakan tidak ada Proyek Strategis Nasional (PSN) baru di 2023 dan berfokus pada penyelesaian proyek *existing*.

7.2. Prospek Inflasi

Berdasarkan prakiraan dari *The International Monetary Fund* (IMF), inflasi global diperkirakan menurun dari 8,7% (yoy) pada 2022 menjadi 6,9% (yoy) pada 2023 dan kembali menurun menjadi 5,8% (yoy) pada 2024. Angka tersebut masih berada di atas level pra-pandemi dengan kisaran 3,5% (yoy) pada tahun 2017-2019. Inflasi diperkirakan untuk tidak Kembali kepada target sampai dengan tahun 2025. Inflasi masih didorong oleh potensi kenaikan harga pada komoditas pangan dan energi akibat dampak konflik global. Sejalan dengan kenaikan inflasi global, inflasi domestik diperkirakan akan kembali ke dalam rentang target inflasi $3\pm 1\%$ (yoy).

Secara keseluruhan tahun 2023, laju inflasi gabungan 3 kota di Provinsi Aceh diperkirakan tetap terjaga dan berpotensi menyentuh batas bawah sasaran inflasi nasional sebesar $3\pm 1\%$ (yoy). Realisasi inflasi tahun kalender sampai dengan periode Oktober 2023 tercatat sebesar 1,94% (yoy). Inflasi berpotensi untuk Kembali meningkat pada akhir tahun 2023, seiring dengan potensi kenaikan harga bahan pangan pada akhir tahun.

Potensi kenaikan inflasi yang lebih tinggi diperkirakan juga didukung oleh respon kebijakan Bank Indonesia yang telah menaikkan suku bunga acuan BI *7-day reverse repo rate* (BI7DRR) menjadi 6,00% pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia Oktober 2023.

Dari sisi komoditas bahan makanan, pembatasan sosial yang telah ditiadakan diperkirakan akan

meningkatkan mobilitas dan permintaan masyarakat akan komoditas pangan. Tidak adanya kendala pada sektor pertanian diperkirakan mendukung normalisasi inflasi pada tahun 2023. Meskipun demikian, risiko cuaca buruk akibat badai El Nino dan gelombang laut yang tinggi masih berpotensi berdampak pada penurunan hasil tangkapan komoditas perikanan yang dapat mendorong inflasi.

Dari sisi barang yang harganya diatur oleh Pemerintah, kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) sebesar 10% pada tahun 2023 turut mendorong kenaikan inflasi. Meskipun demikian, diperkirakan tidak terjadi kenaikan harga BBM seperti tahun 2022.

Inflasi gabungan 3 kota di Provinsi Aceh pada 2023 diperkirakan mereda jika dibandingkan dengan tahun 2022. Hal ini didorong oleh beragam kegiatan GNPIP (Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan) yang dilakukan oleh TPIP, TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Aceh. Pemerintah Aceh, BI, Satgas Pangan, serta pihak-pihak terkait bersama-sama dalam TPID terus berkoordinasi dan bersinergi untuk menjaga inflasi agar tetap stabil dan terkendali. Strategi dan antisipasi manajemen pasokan untuk komoditas perikanan (salah satu inflator terbesar) juga terus digalakkan, diantaranya melalui pemanfaatan *cold storage* eksisting, pembangunan *cold storage* baru, kerja sama antar daerah, dan operasi pasar. Hal ini diperkirakan mampu meredam gejala kenaikan harga sehingga secara keseluruhan tahun 2023, inflasi gabungan 3 kota di Provinsi Aceh diperkirakan berada di batas bawah sasaran inflasi Nasional.

Inflasi gabungan 3 kota di Provinsi Aceh pada tahun 2024 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan tahun 2023, meskipun masih dalam rentang target inflasi nasional sebesar $2,5 \pm 1\%$. Risiko inflasi yang lebih tinggi di tahun 2024 mendorong inflasi Aceh untuk cenderung mendekati batas atas rentang inflasi tersebut. Namun demikian, program-program GNPIP yang dilakukan oleh TPIP, TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Aceh akan terus

dilakukan untuk menjaga inflasi yang rendah dan stabil.

7.3. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan kondisi ekonomi Aceh yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa rekomendasi terkait upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi sebagai berikut:

Pertumbuhan Ekonomi

1. **Mengurangi tingginya angka kemiskinan Aceh serta peningkatan serapan tenaga kerja** melalui langkah taktis replikasi *piloting* pengembangan kelompok subsisten melalui sinergi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, dan pemangku kebijakan terkait lainnya. Terdapat beberapa tahapan dalam usulan *piloting* tersebut, antara lain: (i) *Initial assessment*: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) dan Dinas Sosial (Dinsos) melakukan *initial assessment* terkait kelompok potensial yang akan dilakukan *piloting* pengembangan kelompok subsisten; (ii) *Implementing partner*: Dinas Koperasi dan UMKM (Diskopukm), DPMG bersama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) identifikasi *implementing partner* yang potensial di Aceh (industri yang mampu menjadi *offtaker*) termasuk potensi pemanfaatan BUMG di gampong-gampong; (iii) Pendampingan: BI, OJK, Kemenkeu dan OPD teknis melakukan pembinaan teknis pengembangan usaha kepada kelompok subsisten terpilih terkait dengan pemberdayaan ekonomi, perluasan akses, dan literasi keuangan, serta harmonisasi kebijakan; (iv) Pendampingan (lanjutan): fasilitasi promosi produk dari *implementing partner* daerah; (v) Monev: monitoring dan evaluasi pelaksanaan oleh seluruh pihak terkait; dan (vi) Replikasi: replikasi *success story* yang telah dilaksanakan secara *rapid* di berbagai kabupaten/kota.
2. **Mendorong pengembangan dan**

implementasi *green economy* dalam pembangunan berkelanjutan di Aceh.

Green Economy adalah suatu gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan, atau juga dapat diartikan sebagai aktivitas perekonomian yang sedikit atau tidak menghasilkan emisi gas-gas rumah kaca terhadap lingkungan, hemat sumber daya alam, dan berkeadilan sosial. Adapun pengembangan ekonomi berbasis komoditas hijau mencakup penerapan *Good Agricultural Practices*, sertifikasi komoditas pertanian, perkebunan, serta perikanan, pengembangan industri hilir dan usaha turunan, perbaikan rantai pasok dan rantai nilai, dukungan kemitraan dan permodalan, optimalisasi komoditas dengan Indikasi Geografis, serta mendorong intervensi yang bersifat spesifik terhadap komoditas unggulan di Aceh seperti kopi, kelapa sawit, nilam, pala, dan karet.

3. Mengakselerasi Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah.

Sebagai daerah yang memiliki kekhususan menerapkan syariat Islam dalam seluruh aspek, termasuk ekonomi, potensi ekonomi dan keuangan syariah di Aceh cukup besar. Namun, potensi yang besar tersebut dinilai belum dioptimalkan dengan baik. Diperlukan perhatian khusus serta kolaborasi antar pemangku kebijakan terutama dalam bidang keuangan syariah, industri halal, keuangan sosial syariah, dan ekonomi pesantren.

4. Dualisme sertifikasi produk halal di Aceh.

Berdasarkan Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal bertugas untuk menerbitkan sertifikasi halal produk. Sementara Qanun Aceh No.8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal menyatakan sertifikasi produk halal di Aceh diterbitkan oleh LPPOM MPU Aceh. Hingga saat ini proses sertifikasi halal di Aceh masih melalui LPPOM MPU, namun masyarakat yang

memerlukan sertifikasi halal nasional masih belum dapat memilikinya. Pemerintah Pusat perlu memberikan perhatian terhadap tumpang tindih regulasi sertifikasi halal yang ada di Aceh. Sebab kedua dasar hukum yang digunakan merupakan peraturan yang sah.

5. Perlunya mendorong penyaluran KUR dan UMi di Aceh untuk meningkatkan pembiayaan Kredit Program.

Penyaluran dapat diprioritaskan sesuai dengan program Pemerintah Aceh melalui peningkatan pembiayaan di sektor pertanian dan perikanan. Hal tersebut dapat diwujudkan salah satunya melalui upaya mendorong perbankan untuk lebih memprioritaskan pemberdayaan UMKM yang potensial dengan memperbesar porsi pembiayaan di tahun 2023.

6. Mendorong percepatan pemulihan ekonomi melalui penguatan Lapangan Usaha (LU) industri pengolahan.

Potensi pada sektor hulu yang dimiliki Aceh bisa dioptimalkan untuk mendorong sektor industri pengolahan sebagai sektor yang aman untuk dibuka, memiliki daya ungkit, menyerap tenaga kerja serta memberikan *multiplier effect* yang besar. Pemetaan pohon industri dari masing-masing komoditas unggulan serta kajian teknis mengenai potensi dari tiap pohon industri mutlak dibutuhkan agar tidak terjadi *jumping* lapangan usaha dari LU pertanian, perikanan dan kehutanan ke LU perdagangan besar dan eceran, tanpa melalui penambahan nilai yang dapat diberikan oleh LU industri pengolahan. Hal ini penting agar provinsi Aceh tidak kehilangan nilai tambah yang seharusnya bisa diciptakan oleh industri pengolahan.

7. Mendorong model bisnis *sharing factory* dalam rangka mendorong UMKM dan Industri.

Kawasan industri yang telah dimiliki oleh Pemerintah Daerah seperti KIA Ladang berpotensi untuk diarahkan menjadi *sharing factory* yang bisa menjadi rumah produksi bersama bagi UMKM-UMKM di Aceh untuk menciptakan nilai tambah dan produk yang

berdaya saing. *Sharing factory* berpotensi membantu para pelaku UMKM yang tidak memiliki modal kerja tinggi untuk mengembangkan usahanya karena semua fasilitas dasar akan disediakan oleh pengelola sentra industri. Model *sharing factory* juga sudah diterapkan di beberapa daerah dan mampu meningkatkan kualitas produk dan kapasitas UMKM.

8. **Memperkuat peran Tim Percepatan & Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di setiap daerah** untuk mendukung ekosistem keuangan digital di Aceh. Di tengah pandemi COVID-19, transaksi non tunai/digital diharapkan dapat menjaga *demand* masyarakat, sehingga roda perekonomian dapat terus berputar. Melalui transaksi non tunai/digital, diharapkan risiko penularan COVID-19 melalui uang kartal dapat dicegah. Transaksi non tunai/digital juga diperkirakan akan terus meningkat pasca pandemi sebagai penopang pemulihan ekonomi daerah. Di lingkungan Pemerintah Daerah, Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETPD) juga perlu diakselerasi melalui sinergi Pemda, BI, Perbankan, serta pihak terkait lainnya.
9. **Memperkuat peran Satgas percepatan investasi atau *Regional Investment Relations Unit (RIRU) Aceh***. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan diperlukan keterlibatan investasi swasta dalam menggerakkan roda perekonomian. Dalam hal ini, peran Satgas percepatan investasi menjadi penting dan perlu ditingkatkan dalam mengidentifikasi proyek *clean and clear*, mengikuti *event* promosi investasi, memetakan calon investor potensial, serta memperkuat peran media dalam memperkenalkan proyek-proyek investasi kepada calon investor potensial.
10. ***Debottlenecking* kendala atau hambatan investasi di Aceh**. Dalam *focus group discussion (FGD) Aceh Gayo Investment Dialog (AGASID) 2022*, diketahui beberapa kendala/hambatan

investasi di Aceh, diantaranya keterbatasan sumber daya manusia (SDM) Pemerintahan Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun BUMD di Aceh dalam menyiapkan proposal proyek yang layak dan komprehensif serta materi promosi krusial lainnya. Sebagai solusi dari kendala ini, RIRU Provinsi Aceh menyelenggarakan kegiatan *Capacity Building* penyusunan proposal investasi yang di dalamnya terdapat 7 aspek penting dalam penyusunan proposal investasi, termasuk simulasi perhitungan kelayakan proyek investasi. Status *clean and clear* untuk beberapa proyek investasi di Aceh masih belum jelas, bahkan beberapa proyek investasi masih terkendala hal mendasar seperti keterbatasan dukungan data. Selanjutnya, terdapat kendala kebijakan sewa lahan maksimal 5 (lima) tahun yang dikeluhkan oleh para investor, sehingga diperlukan percepatan perumusan dan pengesahan aturan perubahan untuk perpanjangan sewa lahan tersebut.

Inflasi

Pada tahun 2023, tekanan inflasi diperkirakan akan menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, tetap diperlukan kerjasama dengan TPID Aceh untuk dapat mengendalikan laju inflasi. Pada awal tahun 2023, TPID Provinsi Aceh dan 23 Kabupaten/Kota telah melakukan Rapat Koordinasi Wilayah dalam rangka sinkronisasi program pengendalian inflasi setahun ke depan. Lebih lanjut, pengendalian inflasi juga akan mengikuti peta jalan atau *roadmap* jangka pendek (2022-2024) yang telah disusun sebelumnya. Bank Indonesia bersama Pemerintah Aceh juga berkomitmen untuk melanjutkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di Provinsi Aceh pada tahun 2023. Adapun program pengendalian inflasi Aceh masih mengacu pada *framework* 4K, antara lain:

1. **Keterjangkauan Harga melalui stabilisasi harga pangan strategis** didukung oleh program pemantauan dan pencatatan harga bahan pangan pokok (sembako dan komoditas ikan), optimalisasi program ketersediaan

pasokan dan stabilisasi harga (KPSH) untuk komoditas beras, pelaksanaan pasar murah (terutama menjelang HBKN), pelaksanaan sidak pasar, dan menetapkan harga eceran tertinggi (komoditas bahan pangan) melalui penyusunan Qanun (Perda).

2. **Ketersediaan Pasokan melalui dua program strategis, yaitu peningkatan produksi pangan lokal dan importasi produk pangan.**

Peningkatan produksi pangan lokal terutama produksi hortikultura penyumbang inflasi (bawang merah, cabai merah, dan cabai rawit), produksi komoditas peternakan penyumbang inflasi (daging sapi, daging ayam, dan telur ayam), Peningkatan produksi/tangkapan/budidaya komoditas perikanan penyumbang inflasi. Peningkatan produksi juga didukung oleh pembangunan dan optimalisasi sarana produksi dan infrastruktur pertanian, pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi, dan kanal pengendalian banjir (contoh di Aceh Tamiang), korporatisasi klaster petani pangan, dan pengaturan jadwal tanam komoditas pangan. Selanjutnya, diperlukan juga impor komoditas yang sulit diproduksi secara lokal seperti bawang putih dan gula pasir.

3. **Kelancaran Distribusi melalui dua program strategis, yaitu penguatan dan perluasan kerjasama antar daerah (KAD), serta meningkatkan infrastruktur perdagangan.**

Program strategis pertama, dijabarkan menjadi inisiasi KAD di setiap kab/kota baik intra provinsi maupun antar provinsi, Peningkatan transaksi KAD, Fasilitasi Distribusi Pangan oleh Pasar Mitra Tani (PMT)/Toko Tani Indonesia Center (TTIC) dan Toko Mitra Tani (TMT)/Toko Tani Indonesia (TTI), pelaksanaan Pasar Lelang (komoditas lokal dan ekspor). Selanjutnya, program strategis kedua dijabarkan melalui peningkatan dan pengembangan infrastruktur konektivitas antar wilayah guna mendukung kelancaran pergerakan logistik bahan pangan yaitu melalui pemanfaatan tol laut, fasilitasi kerjasama UMKM pangan dengan *e-commerce*,

dan optimalisasi pemanfaatan *cold storage* untuk komoditas perikanan.

4. **Komunikasi Efektif melalui tiga program strategi, yaitu memperbaiki kualitas data dan laporan, peningkatan kapasitas dan koordinasi Provinsi dan Kab/Kota, dan mengendalikan ekspektasi inflasi.**

Perbaikan kualitas dan laporan dicapai melalui penyediaan sistem informasi panel harga dan monitoring stok pangan strategis yang terintegrasi di tingkat Provinsi dan Kab/Kota, serta peningkatan kualitas dan kuantitas laporan TPID baik Provinsi dan Kab/Kota. Selanjutnya, peningkatan kapasitas dan koordinasi dilakukan melalui penyusunan peta jalan pengendalian inflasi Kab/Kota, pelaksanaan *High Level Meeting* TPID, dan pelaksanaan *Capacity Building* TPID. Terakhir, pengendalian ekspektasi inflasi dilakukan melalui program rilis pers/media khususnya terkait upaya TPID dalam menjaga kestabilan harga dan ketersediaan pasokan komoditas strategis.

5. **Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Aceh**

secara garis besar terdiri dari program jangka pendek (*quick wins*) dan program jangka panjang (*long term*). Program *quick wins* berupa kerjasama antar daerah (KAD) dan operasi pasar/pasar murah. Sementara itu, program *long-term* diarahkan untuk ketahanan pangan dalam bentuk pengembangan klaster pangan. Selain itu, terdapat program komunikasi dalam bentuk Iklan Layanan Masyarakat (ILM) bijak berkonsumsi dan himbauan penggunaan cabai kering.

6. **Mewujudkan ketahanan pangan di Aceh**

untuk menjadikan Aceh sebagai daerah produsen pertanian yang menerapkan pertanian modern dan perekonomian sirkular. Secara garis besar, terdapat empat program utama dalam mewujudkan hal tersebut, kemandirian pupuk di tingkat petani, kemandirian bibit di tingkat produsen,

informasi *scheduling* tanam, dan penyimpanan. i) Kemandirian Pupuk (Petani) dilakukan melalui pengembangan pupuk organik mandiri untuk pemenuhan kebutuhan sendiri (*self-sufficiency*). Dibutuhkan kapasitas, standarisasi dan legalitas yang cukup serta mumpuni untuk pengembangannya. Salah satu contoh implementasinya melalui pengembangan pupuk dengan dekomposer. ii) Kemandirian Bibit (Produsen bibit), bibit cabai merah keriting (CMK) yang dikenal dengan udeng atau odeng dan cabai merah varietas Bemer adalah varietas cabai lokal unggul berasal dari Kab. Bener Meriah, Provinsi Aceh. Permasalahan yang muncul dalam proses pembibitan varietas lokal di atas adalah masih terbatasnya petani di Aceh yang membudidayakan varietas tersebut. Selain itu, kualitas bibit yang dibuat masih kurang baik. Masih perlu dilakukan pemuliaan tanaman agar konsistensi bibit yang dihasilkan sesuai standar dan berkualitas. Kementerian Pertanian dapat membantu proses pengembangan, proses sertifikasi, dan proses perizinan dari pemuliaan bibit lokal. Hal ini akan mengurangi ketergantungan pasokan bibit dari luar daerah. Begitu pun untuk program kemandirian pupuk. Hal ini akan mengurangi ketergantungan pupuk NPK yang mana bahan dasar ureanya sangat bergantung dari impor. iii) Informasi *scheduling* tanam, dilakukan dengan menghubungkan info antara pedagang besar yang mengendalikan pasar dan pedagang pengepul di daerah pertanian yang menjadi pemasok komoditas tersebut. Selanjutnya, pedagang pengepul meneruskan info tersebut ke para petani untuk dilakukan menyesuaikan pola tanam sesuai dengan kebutuhan pasar. Terakhir, iv) penyimpanan, khususnya untuk komoditas pangan yang perlu didukung *cold supply chain*, yaitu suatu wadah untuk mempertahankan hasil panen komoditas pertanian. *Buffer stock* yang ada saat ini dapat digunakan untuk mempertahankan dan menyeimbangkan jumlah pasokan dan kebutuhan di pasar. Informasi tersebut juga

dapat digunakan untuk menghitung jumlah pasokan yang dapat dijual ke luar daerah sebagai bentuk Kerjasama Antar Daerah (KAD).

7. **Menindaklanjuti arahan Gubernur Aceh pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi pada 18 Agustus 2022** yang antara lain mencakup usulan pembentukan satu data terpadu, pemetaan pelaku pasar dan sentra produksi di Aceh, *timing* panen dan sistem *stock*, serta koordinasi dengan bulog untuk *cold supply chain*. Anggaran tanggap darurat dapat dimanfaatkan untuk ongkos logistik bahan pangan. Dana gampong bersama-sama dapat digunakan untuk membangun pabrik beras premium. Kemudian akan disusun Pergub yang mewajibkan ASN membeli beras premium produksi Bulog Aceh/Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). APBA tahun 2023 akan diarahkan untuk mendorong pengendalian inflasi.
8. **Mendorong Kerja sama Antar Daerah (KAD) dan Stabilisasi Suplai Gabai untuk Menjaga Inflasi Komoditas Beras.** Pasokan beras kerap kali didatangkan dari luar Aceh pada periode-periode tertentu. Padahal jika dihitung secara tahunan, produksi beras Aceh mengalami surplus. Gabah dari Aceh dijual ke Sumatera Utara untuk diolah, kemudian beras dijual kembali ke Aceh. Kondisi ini menyebabkan harga beras dapat meningkat/lebih tinggi daripada harga lokal. Beras lokal berpotensi untuk kalah saing dengan beras luar yang kualitasnya lebih baik dan berdampak pada berkurangnya pendapatan. Hal yang dapat dilakukan antara lain menginisiasi optimalisasi Sistem Resi Gudang (SRG) yang dikelola oleh profesional terutama untuk komoditas beras dan meningkatkan kualitas pengolahan/penggilingan padi di Aceh untuk menjadi beras kualitas super. Lebih lanjut, melakukan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dapat dilakukan untuk memastikan ketersediaan beras di Provinsi Aceh. KAD dapat dilakukan dalam bentuk gabah, untuk menstabilkan pasokan gabah di Aceh

sepanjang tahun. Ataupun, dapat dilakukan langsung dengan berbentuk beras dengan upaya menstabilkan pasokan sepanjang tahun.

DAFTAR ISTILAH

Administered prices	Salah satu disagregasi inflasi, yaitu untuk komoditas yang perkembangan harganya diatur oleh pemerintah.
Andil inflasi	Sumbangan perkembangan harga suatu komoditas/kelompok barang/kota terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan.
APBA	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Rencana keuangan tahunan pemerintah Aceh yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
Bobot inflasi	Besaran yang menunjukkan pengaruh suatu komoditas terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan, yang diperhitungkan dengan melihat tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas tersebut.
Dana Perimbangan	Sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah.
Faktor Fundamental	Faktor fundamental adalah faktor pendorong inflasi yang dapat dipengaruhi oleh kebijakan moneter, yakni interaksi permintaan-penawaran atau <i>output gap</i> , eksternal, serta ekspektasi inflasi masyarakat
Faktor Non Fundamental	Faktor non fundamental adalah faktor pendorong inflasi yang berada di luar kewenangan otoritas moneter, yakni produksi maupun distribusi bahan pangan (<i>volatile foods</i>), serta harga barang/jasa yang ditentukan oleh pemerintah (<i>administered price</i>)
Indeks Ekspektasi Konsumen	Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap ekspektasi kondisi ekonomi 6 bulan mendatang, dengan skala 1–100.
Indeks Harga Konsumen (IHK)	Sebuah indeks yang merupakan ukuran perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat pada suatu periode tertentu.
Indeks Kondisi Ekonomi	Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini, dengan skala 1–100.
Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)	Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi kondisi ekonomi enam bulan mendatang, dengan skala 1–100.
Investasi	Kegiatan meningkatkan nilai tambah suatu kegiatan produksi melalui peningkatan modal.
Inflasi inti	Inflasi inti adalah inflasi yang dipengaruhi oleh faktor fundamental

Liaison	Kegiatan pengumpulan data/statistik dan informasi yang bersifat kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan secara periodik melalui wawancara langsung kepada pelaku ekonomi mengenai perkembangan dan arah kegiatan ekonomi dengan cara yang sistematis dan didokumentasikan dalam bentuk laporan
Migas	Minyak dan gas. Merupakan kelompok sektor industri yang mencakup industri minyak dan gas.
Mtm	<i>Month to month</i> . Perbandingan antara data satu bulan dengan bulan sebelumnya.
Omzet	Nilai penjualan bruto yang diperoleh dari satu kali proses produksi.
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto. Pendapatan suatu daerah yang mencerminkan hasil kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah tertentu.
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi suatu daerah seperti hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.
Perceived risk	Persepsi risiko yang dimiliki oleh investor terhadap kondisi perekonomian sebuah negara
Qtq	<i>Quarter to quarter</i> . Perbandingan antara data satu triwulan dengan triwulan sebelumnya.
Sektor ekonomi dominan	Sektor ekonomi yang mempunyai nilai tambah besar sehingga mempunyai pengaruh dominan pada pembentukan PDRB secara keseluruhan.
Volatile food	Salah satu disagregasi inflasi, yaitu untuk komoditas yang perkembangan harganya sangat bergejolak karena faktor-faktor tertentu.
Yoy	<i>Year on year</i> . Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun sebelumnya.

TIM PENYUSUN

PENANGGUNG JAWAB

Rony Widiarto P.

KOORDINATOR PENYUSUN

Yon Widiyono

TIM PENULIS

Alrikko Putra

Garry Rahmadhian Sutiasa

Fina Ananda

Andika Indra Kusuma

Lintang D. Ratri

M. Fikrisani

M. Indra Saputra

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI ACEH

JL. Cut Mutia No.15, Banda Aceh

Telp. (0651) 32320 ext. 8205 | Fax. (0651) 34116

Softcopy dapat diunduh pada tautan:

<https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/default.aspx?Kategori=aceh&Periode=>